

**PENGELOLAAN WISATA GUNUNG BERUK DI DESA WISATA
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan**

Disusun Oleh:

AWANDA RIZKI ANANTA

135120600111029



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

**PENGELOLAAN WISATA GUNUNG BERUK DI DESA WISATA
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG PONOROGO**

SKRIPSI

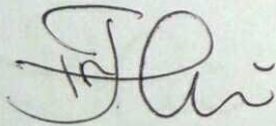
Disusun Oleh:

AWANDA RIZKI ANANTA

NIM 135120600111029

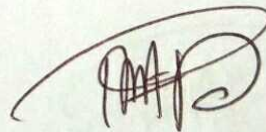
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama



Irma Fitriana Ulfah S.IP.,M. Si
NIK. 2013048811042001

Pembimbing Pendamping



Ratnaningsih Damayanti S.IP.,M.Ec.Dev
NIK.2014058609212001

Tanggal 2 Januari 2018

Tanggal 2 Januari 2018

**PENGELOLAAN WISATA GUNUNG BERUK DI DESA WISATA
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG PONOROGO
SKRIPSI**

Disusun Oleh:

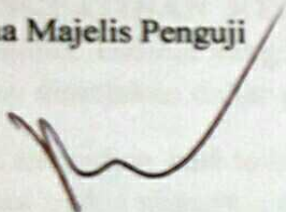
AWANDA RIZKI ANANTA

NIM 135120600111029

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Politik pada tanggal 2
Januari 2018

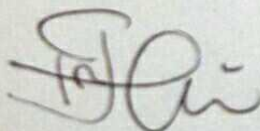
Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji



Fatur Rahman S.IP., MA
NIK. 20110982042191001

Anggota Majelis Penguji I



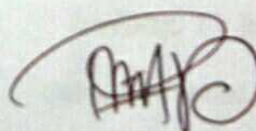
Irma Fitriana Ulfah S.IP., M.Si
NIK. 2013048811042001

Sekretaris Majelis Penguji



Laode Machdani Afala S.IP., M.A
NIK. 2016078703181001

Anggota Majelis Penguji II



Ratnaningsih Damayanti S.IP., M.Ec.Dev
NIK. 2014058609212001

Malang 2 Januari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak.
NIK. 196908141994021001

PERNYATAAN

Nama: Awanda Rizki Ananta

NIM: 135120600111029

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN WISATA GUNUNG BERUK DI DESA WISATA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG PONOROGO** adalah benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 11 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



Awanda Rizki Ananta
NIM. 135120600111029

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul PENGELOLAAN WISATA GUNUNG BERUK DI DESA WISATA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG PONOROGO. *Sholawat* beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammaad SAW yang telah melakukan revolusi dari zaman keterbelakangan ke zaman berkemajuan.

Skripsi yang disusun oleh penulis merupakan prasyarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Strata 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran dan persetujuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orangtua yang selalu saya banggakan Bapak Siswanto, Ibu Kinan Kumalasari yang tidak ada hentinya memberi semangat dan motivasi serta nasihat dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai, beliau berdua malaikat yang dikirim Tuhan untuk saya.
2. Kepada seluruh keluarga besar dan adik saya Wildan Saktika Nugraha yang selalu memberikan semangat dan do'a hingga proses pengerjaan skripsi ini selesai.
3. Kepada Ibu Irma Fitriana Ulfah S.IP, M.Sis selaku dosen penyabar yang merupakan pembimbing utama yang memiliki peranan yang sangat besar dalam memberikan arahan dan penyelesaian skripsi, serta selalu membuat jadwal bimbingan sehingga penulis selalu termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ratnaningsih Damayanti S.IP, M.Ec.Dev yang merupakan pembimbing kedua yang sabar saat penulis berikan pertanyaan-pertanyaan terkait skripsi, dan banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada seluruh kawan-kawan Ponorogo, Agung, Ricky, Dwindy yang telah membantu dalam terselesaikannya penelitian ini dengan ikhlas dan sabar.
5. Kawan-kawan kontrakan selama 4 tahun Nando, Yusuf, Dika, Ivan, Fajar yang telah banyak memberikan nasihat, pengalaman, saran dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Serta rekan-rekan GROUP IPM A Saduluran Saklawase dan seluruh rekan Ilmu Pemerintahan yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bakti anakmu kepadamu

Kupersembahkan gelar kebanggaanku ini padamu

Bukti tanggung jawab kepercayaanmu padaku

Seraya tanganku menadah “..ya Allah ya Rahman ya Rahim.. Terimakasih telah kau tempatkan aku di antara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu...”

Untukmu Ibunda Tercinta Kinan Kumalasari,,

Ayahanda Tercinta Siswanto...

Saudara kandungku Wildan Saktika Nugraha

Terimakasih... aku selalu bangga padamu

(Dari anakmu ARA)

ABSTRAK

Awanda Rizki Ananta 2017 : Pengelolaan wisata Gunung Beruk studi kasus di Desa Wisata Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo. Dosen Pembimbing : Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si, Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev

Penelitian ini diawali oleh realitas bahwa di Ponorogo banyak bermunculan daerah wisata baru dengan konsep desa wisata. Salah satu wisata yang paling mendapat sorotan adalah di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo yaitu wisata Gunung Beruk. Dalam menganalisa pengelolaan wisata Gunung Beruk yang ada di Karangpatihan tersebut, peneliti menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens. Peneliti menggunakan teori strukturasi dengan menitikberatkan peran agen atau aktor (Karangtaruna Wirataruna, Pemerintah Desa, LMDH, Dinas Pariwisata, Perhutani KPH Lawu DS dan Pemda Ponorogo) dan struktur (aturan dalam pengelolaan hutan Gunung Beruk sebagai daerah wisata yang dimiliki oleh para agen) yang berhubungan dalam sistem pengelolaan untuk menghasilkan praktik tindakan yaitu pengelolaan wisata Gunung Beruk di Desa Karangpatihan. Sementara itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap agen terkait serta dengan melakukan observasi terhadap pengelolaan wisata yang dilakukan oleh Karangtaruna Wirataruna dan peran beberapa agen lain dalam pembangunan wisata di Karangpatihan. Hasil dalam penelitian ini merujuk pada peran agen terkait pengelolaan Gunung Beruk masih di dominasi oleh agen utama yaitu Karangtaruna Wirataruna. Dominasi tersebut dapat dilihat dari hasil pemanfaatan wisata Gunung Beruk yang diambil alih oleh Karangtaruna. Legitimasi hukum, pengelolaan wisata Gunung Beruk telah mendapatkan izin yang sah dari Perhutani melaui Kesepakatan Bersama yang telah dibuat. Masalah yang ada adalah kerjasama pembagian hasil wisata yang belum disahkan oleh Perhutani sehingga untuk saat ini pengoptimalan wisata gunung beruk belum dapat maksimal karena tidak diperbolehkannya melakukan penarikan retribusi tiket masuk serta pengelolaan wisata yang belum dikelola secara profesional.

Kata kunci : *Pengelolaan wisata Gunung Beruk, Desa Wisata, Karangpatihan.*

ABSTRACT

Awanda Rizki Ananta 2017: Tourism Management Mountain Beruk A Case Study In Tourist Village Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo .Supervising lecturer:Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si, Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev

Research started by reality that in Ponorogo many springing tourist destinations new with the concept of the tourist village. One of tourism the most facing rejection is in the Karangpatihan Village subdistrict Balong Ponorogo the Beruk Mountain tourism. In analysis tourism management Beruk Mountain that is in Karangpatihan the, researchers used the theory strukturasi of Anthony Giddens. Researchers used the theory strukturasi with emphasises the role of an agent or actor (Karangtaruna Wirataruna, the Village Administration, LMDH, tourism agency, Perhutani KPH Lawu DS and local government ponorogo and a structure (rules in forest management mountain beruk for areas that have tourism by the an agent) who deals in management systems to produce practices the act of venerating tourism management mountain beruk in the village Karangpatihan. Meanwhile methods used in this study was a qualitative methodology, by doing interviewing agent related and by doing Observation of tourism management conducted by Karangtaruna Wirataruna and role of some other agent in the development of tourism in Karangpatihan .It is based on research results in the role of agent regarding the management of the beruk still in the chief agent of domination by the Karangtaruna Wirataruna .The problem can be seen from the use of the tourism Beruk taken over by Karangtaruna .Legal legitimacy , Beruk Mountain tourism management already has license melauai owned forest enterprise for example of valid agreement which has been made .The problem there is cooperation the results had not yet been passed by tourism owned forest enterprise for example so as to current optimalyzed Beruk tourism the maximum because they could not make withdrawals after the ticket and tourism management that are not managed professionally.

Keywords :*Beruk Mountain management tourism, village torism, Karangpatihan.*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERNYATAAN | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR BAGAN | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR ISTILAH | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.1 Latar Belakang..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2 Rumusan Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4.1. Manfaat Akademis..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4.2. Manfaat Praktis..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | Error! Bookmark not defined. |
| 2.1 Studi Penelitian Terdahulu | Error! Bookmark not defined. |
| 2.1 Kerangka Teoritik. | Error! Bookmark not defined. |
| 2.1.1 Teori Strukturasi | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2.2 Struktur (Aturan dan Sumberdaya)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2.3 Pengertian Pengelolaan Pariwisata | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2.4 Pengertian Desa Wisata | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2 Alur Pikir Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III METODE PENELITIAN | Error! Bookmark not defined. |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 3.2 Lokasi Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3 Fokus Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 3.4 Jenis Data | Error! Bookmark not defined. |
| a. Data Primer | Error! Bookmark not defined. |
| b. Data Sekunder | Error! Bookmark not defined. |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | Error! Bookmark not defined. |
| 3.5.1 Metode Observasi. | Error! Bookmark not defined. |
| 3.5.2 Metode Wawancara. | Error! Bookmark not defined. |
| 3.5.3 Penentuan Informan Terpilih | Error! Bookmark not defined. |
| 3.5.4 Dokumentasi | Error! Bookmark not defined. |
| 3.6 Teknik Analisis Data | Error! Bookmark not defined. |
| 3.6.1 Reduksi Data..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.6.2 Penyajian Data. | Error! Bookmark not defined. |
| 3.6.3 Pengambilan Keputusan..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV GAMBARAN UMUM..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1 Gambaran Umum Desa Karangpatihan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.1 Demografi | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.2 Mata Pencarian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.3 Keadaan Sosial..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.4 Keadaan Ekonomi..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.5 Keadaan Sumber Daya Alam..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.6 Keadaan Infrastruktur dan Utilitas... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.6.1 Jaringan Jalan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.6.2 Jaringan Drainase..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.6.3 Jaringan Air Bersih | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.7 Kondisi Pemerintahan Desa | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.8 Visi dan Misi Desa Karangpatihan .. | Error! Bookmark not defined. |
| 4.2 Gambaran Umum Wisata Di Desa Karangpatihan | Error! Bookmark not defined. |
| BAB V PEMBAHASAN | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1 Agen Dalam Pengelolaan Wisata Gunung Beruk | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.1 Peran Karangtaruna Wirataruna dalam Pengelolaan wisata Gunung Beruk | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.2 Peran LMDH Wonorekso Dalam Pengelolaan Wisata Gunung Beruk | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 5.1.3 Peran Perhutani KPH Lawu DS Terkait Pemanfaatan Hutan Gunung Beruk Sebagai Tujuan Wisata | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.4 Peran Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pengembangan wisata di Karangpatihan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.5 Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan desa wisata di Ponorogo..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.6 Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Penetapan Desa Wisata Karangpatihan Dan Pembinaan Pengelolaan Wisata Gunung Beruk. | Error! Bookmark not defined. |
| 5.3 Pengelolaan wisata Gunung Beruk secara Signifikasi | Error! Bookmark not defined. |
| 5.3 Pengelolaan Wisata Gunung Beruk Secara Dominasi | Error! Bookmark not defined. |
| 5.4 Legitimasi dalam pengelolaan Wisata Gunung Beruk Karangpatihan | Error! Bookmark not defined. |
| 5.4 Faktor Pendukung | Error! Bookmark not defined. |
| 5. 5 Faktor Penghambat..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB VI PENUTUP | Error! Bookmark not defined. |
| 6.1 Kesimpulan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 6.2 Rekomendasi | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR PUSTAKA..... | Error! Bookmark not defined. |
| LAMPIRAN..... | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan 2.1 Skema Struktural | 26 |
| Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian | 35 |
| Bagan 4.10 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo..... | 59 |
| Bagan 5.1 Struktur Organisasi Karangtaruna Wirataruna..... | 74 |
| Bagan 5.2 Struktur Pengurus LMDH Wonorekso..... | 76 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Peta Desa Karangpatihan..... | 58 |
|---|----|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 18 |
| Tabel 2.2 Dualitas Struktur (Strukturasi,Sistem, dan Strukturasi) | 28 |
| Tabel 3.1 Daftar Informan Kunci Penelitian | 42 |
| Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo Tahun 2016..... | 48 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016 | 49 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016 | 50 |
| Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016 | 50 |
| Tabel 4.5 Data Monografi Sumberdaya Ekonomi Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016 | 52 |
| Tabel 4.6 Data Monografi Sumberdaya Alam Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016 | 53 |
| Tabel 4.7 Data Kondisi Jalan Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016 | 55 |
| Tabel 4.8 Data Kondisi Drainase Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016 | 56 |
| Tabel 4.9 Data Kondisi Pengguna Sumber Air Bersih Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 | 57 |
| Tabel 5.1 Peran Aktor Dalam Pengelolaan Wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan | 68 |
| Tabel 5.2 Rencana Pembangunan Pengembangan Wisata Desa Karangpatihan..... | 85 |
| Tabel 5.3 Sarana Prasarana Wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan Ponorogo..... | 95 |
| Tabel 5.4 Serapan Tenaga Kerja Pariwisata Gunung Beruk..... | 97 |

DAFTAR ISTILAH

| | |
|---------------------|--|
| Agen | :Menurut Giddens dapat dikatakan sebagai aktor atau individu |
| Dominasi | :Penguasaan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain |
| Dualitas | :Merujuk pada dua hal yang bertentangan namun keduanya saling melengkapi |
| Evaluasi | :Memberikan penilaian terhadap suatu kinerja atau seseorang |
| Interrelasi | :Dimaknai sebagai suatu hubungan satu sama lain |
| Kedung | :Sungai dengan perairan dalam |
| Kesadaran Diskursif | :Perkataan yang mampu diucapkan oleh para aktor atau memberikan ekspresi verbal tentang kondisi-kondisi sosial, terutama kondisi aksi mereka sendiri |
| Kesadaran Praktis | :Sesuatu yang diketahui oleh para aktor tentang kondisi-kondisi sosial, terutama meliputi kondisi-kondisi aksi mereka sendiri, namun tidak bisa mengungkapkannya secara diskursif, seperti halnya alam tak sadar |
| Legitimasi | :Keterangan yang membenarkan segala sesuatu tindakan |
| Regulasi | :Dimaknai sebagai aturan |
| Signifikasi | :Mengacu pada struktur penandaan yang menyangkut |
| Struktur | :Peraturan dan sumber daya yang terlibat dalam artikulasi institusional sistem sosial. Mempelajari struktur, termasuk prinsip-prinsip |

struktural, berarti mempelajari aspek-aspek utama relasi transformasi/mediasi yang mempengaruhi integrasi sosial dan sistem

Strukturasi :Pembentukan relasi-relasi sosial lintas ruang dan waktu, dari sudut dualitas struktur

Stakeholder :Pembuat kebijakan, pihak atau aktor yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang di angkat atau lintas aktor dalam relasi sosial

Wengkon :Daerah pangkuan hutan

DAFTAR SINGKATAN

A

ASIDEWI yaitu, Asosiasi Desa Wisata

D

Dinpar yaitu, Dinas Pariwisata

K

KPH yaitu, Kordinator Pemangku Hutan

KKN yaitu, Kuliah Kerja Nyata

KK yaitu, Kepala Keluarga

L

LMDH yaitu, Lembaga Mastarakat Desa Hutan

M

Mbeji yaitu, kolam atau danau kecil peninggalan jaman dahulu

MoU yaitu, Memorandum Of Understanding

MCK yaitu, Mandi cuci kakus

P

Pemda yaitu, Pemerintah Daerah

PKS yaitu, Perjanjian Kerja Sama

PHBM yaitu, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

POKDARWIS yaitu, Kelompok Sadar wisata

R

RPJMDes yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

S

SKPD yaitu, Satuan Kerja Perangkat Daerah

SDA yaitu, Sumber Daya Alam

SDM yaitu, Sumber Daya Manusia

SK yaitu, Surat Keputusan Tunagrahita yaitu, penderita keterbelakangan mental

[illegible]



**KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Nama Mahasiswa : Awanda Rizki Ananta
NIM : 135420600111029
Peminatan : INOVASI PEMERINTAHAN
Dosen Pembimbing I : Irma Fitriana Ulfah, S.IP.M.Si
NIP : 2013048811042001
Dosen Pembimbing II : Ratnaningsih Damayanti, S.IP.M.Ed.Dev
NIP : 20140586092112001

| No | Tanggal Konsultasi | Materi Konsultasi | Keterangan | Paraf Dosen |
|----|--------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 14/Maret/2017 | Konsultasi Tema dan Judul | | Flu |
| 2 | 24/Maret/2017 | Konsultasi Masalah / Latar belakang | | Flu |
| 3 | 11/Mei/2017 | Konsultasi Bab 2 dan 3 | | Flu |
| 4 | 16/Mei/2017 | Revisi Teori dan latar belakang | | Flu |
| 5 | 20/Mei/2017 | Revisi Teori | | Flu |
| 6 | 30/Mei/2017 | Acc Sempro | | Flu |
| 7 | 10/Agustus 2017 | Revisi Sempro | | - |
| 8 | 14/Agustus 2017 | Acc lapangan | | - |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 20 | Linda Kusuma Wardani | 125120601111005 | marketing politik teman ahok dalam menaikkan citra politik ahok dipikada DKI Jakarta 2017 | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA | Tia Subekti, S.I.P., MA | Rachmad Gustomy, S.I.P., M.I.P | Rachmad Gustomy, S.I.P., M.I.P | Andi Setiawan, S.I.P., M.Si |
| 21 | Eriyan Hadisto | 135120607111003 | Film Jagal: Melawan Propaganda Hitam Terhadap PKI Pada Masa Rezim Orde Baru | Fathur Rahman, S.I.P., MA | Laode Rahdani Alah, S.I.P., MA | Restu Karlina Rahayu, S.I.P, M.Si | Restu Karlina Rahayu, S.I.P, M.Si | Ratnangsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev |
| 22 | Laras Saraswati | 145120601111015 | Strategi Perumusan City Branding Kabupaten Tulungagung "The Beginning of Life" | Andi Setiawan, S.I.P., M.Si | Tia Subekti, S.I.P., MA | Irina Fitriana Utiah, S.I.P., M.Si | Irina Fitriana Utiah, S.I.P., M.Si | Restu Karlina Rahayu, S.I.P, M.Si |
| 23 | Shobaqel Hafidz | 135120601111054 | Analisis Layanan Pemerintah Bojonegoro Melalui Sistem SIAP-LAPOR (Penyelesaian Laporan masyarakat di Bidang Pertanian Tahun 2016) | Ratnangsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA | Dr.Dra. Alfitriah Utaminingsih, M.Si | Fathur Rahman, S.I.P., MA | |
| 24 | Aditya Tamara | 115120607111026 | Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT. Kaltim Prima Coal Pada Program Desa Mandiri Di Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur | Rachmad Gustomy, S.I.P., M.I.P | Baqah Prantama, S.I.P., M.AP | Dr. M. Lukman Hakim, S.I.P., M.Si | Fathur Rahman, S.I.P., MA | |

10 JAN 2018

Matang
an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Siti Khoiloh, S.Sos., M.Si, Ph.D
NIP. 197509182005012001

| NIM | Judul SKRIPSI | Ketua Penguji | Sekretaris Penguji | Penguji I | Penguji II |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| 135120607111056 | Parai Politik dan Kebijakan Publik (Studi Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Dalam Perumusan Kebijakan Perburuan di DKI Jakarta) | Fathur Rahman, S.I.P., MA | Tia Subekti, S.I.P., MA | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA | Ratnangsih Damayanti S.I.P., M.Ec.Dev |
| 105120600111017 | Strategi Penanganan Kemiskinan Pedesaan Di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorego Tahun 2014 | Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si | Laode Machdani Afala, S.I.P., MA | Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si | Dr. Dra. Alifluahitri Utaminingsih, M.Si |
| 135120601111009 | Strategi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Tugas Daerah Lingkungan Pondok Sosial Untuk Lansia Terlantar di Kabupaten Sidoarjo) | Andi Setiawan, S.I.P., M.Si | Tia Subekti, S.I.P., MA | Dr. Dra. Alifluahitri Utaminingsih, M.Si | Ruth Agnesia Semetling, S.Sos., MA |
| 135120600111029 | Pengelolaan Wisata Gunung Beruk Di Desa Wisata Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorego | Fathur Rahman, S.I.P., MA | Laode Machdani Afala, S.I.P., MA | Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si | Ratnangsih Damayanti S.I.P., M.Ec.Dev |
| 125120600111011 | Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Usaha Sapi Perah (Studi di Gabungan Kelompok Tani Mayang Sari Desa Pesanggrahan) | Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si | Laode Machdani Afala, S.I.P., MA | Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si | Rachmad Gustom v, S.I.P., M.I.P |
| 135120601111020 | Implementasi Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut di Kabupaten Pulang Pisau | Fathur Rahman, S.I.P., MA | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA | Andi Setiawan, S.I.P., M.Si | Dr. M.Lukman Hakim, S.I.P., M.Si |
| 135120601111053 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM (Studi Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly Oleh Pemerintah Kota Surabaya) | Dr. George Towar Ikbai T, S.I.P., M.Si | Tia Subekti, S.I.P., MA | Dr. Dra. Alifluahitri Utaminingsih, M.Si | Andi Setiawan, S.I.P., M.Si |
| 145120601111068 | Analisis Problematika Perikanan Tambakan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Pasuruan) | Ratnangsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA | Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si | Dr. M.Lukman Hakim, S.I.P., M.Si |
| 145120600111003 | Analisis Pembentukan City Branding "The Heart Of East Java" di Kabupaten Malang | Dr. George Towar Ikbai T, S.I.P., M.Si | Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si | Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si | Dr. Dra. Alifluahitri Utaminingsih, M.Si |
| 145120600111014 | Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Desa Tangguh Bencana | Ratnangsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev | Laode Machdani Afala, S.I.P., MA | Dr. M. Lukman Hakim, S.I.P., M.Si | Barqah Prantama, S.AP., M.AP |
| 105120607111003 | Pengembangan Karir Pegawai Perempuan Berbasis Entry Position dan Promotion di Dinas Sosial Kota Malang | Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si | Laode Machdani Afala, S.I.P., MA | Dr. Dra. Alifluahitri Utaminingsih, M.Si | Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si |
| 135120607111029 | Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi (pulau merah) | Fathur Rahman, S.I.P., MA | Dr. George Towar Ikbai T, S.I.P., M.Si | Rachmad Gustom v, S.I.P., M.I.P | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA |
| 115120607111040 | Formulasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di Kota Malang | Rachmad Gustom v, S.I.P., M.I.P | Tia Subekti, S.I.P., MA | Dr. M. Lukman Hakim, S.I.P., M.Si | Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si |
| 125120600111034 | Kartelisasi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015 | Dr. George Towar Ikbai T, S.I.P., M.Si | Barqah Prantama, S.AP., M.AP | Dr. Dra. Alifluahitri Utaminingsih, M.Si | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA |
| 135120607111033 | Kebijakan dan Tata Kelola Industri Susu Koperasi SAE Kecamatan Pujon Kabupaten Malang | Dr. George Towar Ikbai T, S.I.P., M.Si | Tia Subekti, S.I.P., MA | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA | Rachmad Gustom v, S.I.P., M.I.P |
| 135120607111041 | Implementasi City Branding "Shining Batu" oleh Pemerintah Kota Batu | Andi Setiawan, S.I.P., M.Si | Laode Machdani Afala, S.I.P., MA | Ratnangsih Damayanti S.I.P., M.Ec.Dev | Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si |
| 135120607111061 | Relasi Aktor Dalam Pelaksanaan Program Festival Bedah Rumah di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Kecamatan Banyuwangi) | Dr. Dra. Alifluahitri Utaminingsih, M.Si | Fathur Rahman, S.I.P., MA | Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si | Dr. M.Lukman Hakim, S.I.P., M.Si |
| 145120601111042 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Pada Peserta Pengguna JAMKESMAS di Puskesmas Beji Kota Batu) | Dr. George Towar Ikbai T, S.I.P., M.Si | Barqah Prantama, S.AP., M.AP | Dr. Dra. Alifluahitri Utaminingsih, M.Si | Andi Setiawan, S.I.P., M.Si |
| 135120607111019 | Manajemen Kepegawaian dan Instansi Pemerintahan di Kab. Pamekasan | Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si | Laode Machdani Afala, S.I.P., MA | Fathur Rahman, S.I.P., MA | Ratnangsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev |



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250. Fax (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: fisip@ub.ac.id

SURAT TUGAS

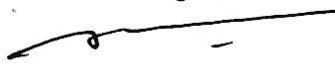
Nomor : **23** /UN10.F11.14.12/PP/ 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ini sebagai Dosen Penguji Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan nama terlampir. Surat perihal Dosen Penguji Skripsi disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan Rapat Ploting yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 27 Desember 2017
Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Program Studi Ilmu Pemerintahan

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Malang, **10 JAN 2018**
a.n. Dekan:
Wakil Dekan Bidang Akademik


Siti Kholifah, S.Sos., M.Si, Ph.D
NIP. 197509182005012001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
2. Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Nomor : 1342/UN10.F11.14.12/PP/2017

| Nama | Judul | Penguji 1 | Penguji 2 |
|-----------------|---|---|---|
| 135120607111029 | Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Di Pulau Merah) | Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA |
| 135120607111052 | Manajemen Jaringan Pemerintah Kota Batu Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA | Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP |
| 105120607111032 | Pelaksanaan Good Governance Di Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Batu | Fathur Rahman, S.IP., M.A | Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev |
| 135120607111020 | Implementasi Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut Di Kabupaten Pulangpisan | Andi Setiawan, S.IP., M.Si | Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si |
| 135120607111056 | Partai Politik Dan Kebijakan Publik (Studi Kasus: Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Dalam Perumusan Kebijakan Mengenai Perburuhan Di DKI Jakarta) | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA | Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev |
| 135120607111043 | Dualisme Pengelolaan Kawasan Air Terjun Tumpak Sewu Semeru Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2017 | Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si | Fathur Rahman, S.IP., M.A |
| 135120607111022 | Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si | Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA |
| 135120607111041 | Upaya Pembentukan Citra Kota Batu Melalui City Branding "Shining Batu" (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Batu) | Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev | Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si |
| 115120600111036 | Penerapan Good Governance Dalam Birokrasi Pemerintahan | Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si | Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si |
| 135120600111029 | Tata Kelola Pengeorganisasian Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Desa Karangpatihan Kec Balongikab Ponorogo | Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si | Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev |
| 135120607111061 | Relasi Aktor Dalam Pelaksanaan Program Festival Bedah Rumah Di Kabupaten Banyuwangi | Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si | Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si |
| 115120601111003 | Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Batu Tahun 2017 | Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si | Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si |
| 135120607111047 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat Kota Batuterdhadap Kepuasan Wajib Pajak(Studi Di Samsat Kota Batu) | Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev | Andi Setiawan, S.IP., M.Si |
| 135120607111013 | Kebijakan Relokasi Pasar Merjosari, Kota Malang | Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si | Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si |
| 135120607111058 | Upaya Koperasi Agro Niaga Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Anggota | Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP | Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si |
| 105120607111033 | Analisa Roadmap SIDA dalam Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015 | Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP | Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si |
| 105120607111009 | Strategi Calon Independen Abdul Majid Kasmani Idris dalam Pemilukada Kota batu Tahun 2017 | Fathur Rahman, S.IP., M.A | Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev |
| 105120600111027 | Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi pada Kecamatan Sukun Kota Malang) | Dr. M. Lukman Hakim S.IP., M.Si | Fathur Rahman, S.IP., M.A |



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: fisip@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1342 /UN10.F11.14.12/PP/ 2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ini sebagai Dosen Penguji Sempro mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan nama terlampir. Surat perihal Dosen Penguji Sempro disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan Rapat Ploting yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 9 Juni 2017
Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Program Studi Ilmu Pemerintahan

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Malang, 13 JUL 2017
a.n. Dekan:
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si, Ph.D
NIP. 197509182005012001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
2. Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: fisip@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 594 /UN10.F11.14.12/PP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang memperhatikan Surat Usulan perihal Pembimbing Skripsi oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan ini menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
NIP : 201348811042001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
NIP : 2014058609212001
Tugas : Pembimbing II

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1):

Nama Mahasiswa : Awanda Rizki Ananta
NIM : 135120600111029
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Bidang Peminatan : Tata Kelola Desa Wisata Dalam Pengelolaan Potensi
Pariwisata di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong
Ponorogo

Demikian perpanjangan surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 8 Mei 2017.

Malang, **31 MAY 2017**

a.n. Dekan:

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Stikholifah, S.Sos., M.Si

NIP. 197509182005012001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB;
2. Bagian Keuangan FISIP UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: fisip@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : ~~10696~~/UN10.11/AK/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang memperhatikan Surat Usulan perihal Pembimbing Skripsi oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan ini menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
NIP : 2013 0488110 42001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
NIP : 20140586092112001
Tugas : Pembimbing II

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1):

Nama Mahasiswa : Awanda Rizki Ananta
NIM : 13512060011029
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Bidang Peminatan : Inovasi Pemerintahan

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 25 November 2016.

20 DEC 2016

Malang,
a.n. Dekan:
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Maya Diah Nirwana, S.Sos., M.Si
NIP. 19770611 200912 2 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB;
2. Bagian Keuangan FISIP UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Dokumentasi Penelitian



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Peneliti bersama Mas Teguh Cahyono Peneliti bersama Pedagang sekitar Gunung Beruk



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Peneliti bersama Pak Jaimin Ketua LMDH Peneliti Bersama pedagang sekitar wisata



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Peneliti bersama Asper dan Mantri Perhutani KPH Peneliti Bersama Pak Marjudi Dinpar

Lawu DS

| JADWAL PIKET | | |
|--------------|--------------|---------------|
| SABTU | SABTU | MINGGU |
| 1. AGUS | 1. DAMAN | 1. DIDIK |
| 2. EBEL | 2. BAMBANG | 2. YUSUF |
| 3. YARDI | 3. ENDRA | 3. GIYONO |
| 4. KENYOT | 4. KETREK | 4. ALI |
| | 5. BASIR | 5. MCH |
| SABTU | SABTU | MINGGU |
| 1. CAIRO | 1. SIDOL | 1. KATEVO |
| 2. SUSONO | 2. KATIKAN | 2. WAHM |
| 3. KREMBOK | 3. KATENC | 3. PACE |
| 4. SOBIPIN | 4. KATENC | 4. JAHJI |
| SABTU | SABTU | MINGGU |
| 1. CAIRO | 1. SIDOL | 1. KATEVO |
| 2. SUSONO | 2. KATIKAN | 2. WAHM |
| 3. KREMBOK | 3. KATENC | 3. PACE |
| 4. SOBIPIN | 4. KATENC | 4. JAHJI |
| SABTU | SABTU | MINGGU |
| 1. CAIRO | 1. SIDOL | 1. KATEVO |
| 2. SUSONO | 2. KATIKAN | 2. WAHM |
| 3. KREMBOK | 3. KATENC | 3. PACE |
| 4. SOBIPIN | 4. KATENC | 4. JAHJI |

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Jadwal piket jaga Parkir



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

warung di sekitar wisata Gunung Beruk



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Lahan Parkir di dalam Rumah Bu Tukirah



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Mushola



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Taman Bunga dan Gembok Cinta



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Suasana Hutan Pinus Gunung Beruk



Sumber: Dokumentasi Penulis 2017

Gapura masuk Dukuh Tanggungrejo



Sumber: Instagram Pesona Gunung Beruk

Spot Foto dari atas Gunung Beruk



Sumber: Instagram Pesona Gunung Beruk

Spot foto rumah pohon



Sumber: Instagram Pesona Gunung Beruk

Spot foto jaring pohon



Sumber: Instagram Pesona Gunung Beruk

Kegiatan Out Bond



Sumber: Instagram Pesona Gunung Beruk

Spot foto bunga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah salah satu penggerak ekonomi rakyat dan dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Untuk itu maka sektor pariwisata terus mengalami perkembangan dan terus dimaksimalkan potensinya baik di tingkat nasional maupun skala kecil seperti di tingkat daerah maupun pada tingkat desa. Peran pariwisata dalam rangka pembangunan nasional sangat besar, peran tersebut antara lain berupa memperluas dan menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan angka pengangguran. Indonesia yang kaya akan potensi dan sumberdaya mempunyai peluang yang sangat besar untuk dikembangkan terutama untuk industri pariwisata. Pada sektor lokal daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu tetapi dapat menjangkau kalangan bawah. Masyarakat di sekitar obyek-obyek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan ekonomi misalnya tempat penginapan, layanan jasa (jasa transportasi, jasa informasi), warung dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekan tingkat pengangguran.

Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mensyaratkan terpenuhinya hak konstitusional desa beserta kesatuan masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa¹. Dengan adanya peraturan tersebut maka desa memiliki kekuasaan untuk mengelola potensi yang dimilikinya dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pembentukan desa wisata adalah salah satu bentuk hak pemanfaatan potensi dan aset desa di bidang pariwisata untuk meningkatkan kemandirian desa dan meningkatkan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan manusia yang ada di lingkup desa. Desa wisata merupakan suatu terobosan untuk mengoptimalkan potensi lokal desa baik itu budaya, adat istiadat serta alam.

Ponorogo merupakan daerah di Jawa Timur yang memiliki beragam potensi wisata antara lain wisata budaya, alam maupun industri kerajinan yang tersebar di berbagai tempat. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371,78 km² terdiri dari 21 Kecamatan dan 26 Kelurahan serta 279 desa, setengah dari luas wilayahnya merupakan dataran rendah dan sebagian kecil adalah dataran tinggi, memiliki bentang alam berupa perbukitan di sisi selatan dan timur, serata pegunungan kapur di sisi barat. Bentang alam ini membuat Ponorogo tidak hanya memiliki potensi wisata budaya saja namun juga potensi wisata alam. Bukan hanya terkenal akan budaya reyognya, tetapi ternyata Kabupaten Ponorogo juga mempunyai tempat – tempat wisata yang tidak kalah dengan daerah lainnya. Pengembangan wisata lokal di Ponorogo sangat berkembang pesat, apalagi sekarang didukung dengan mudahnya akses promosi lewat media- media sosial membuat potensi wisata lokal Ponorogo yang selama ini belum diketahui masyarakat saat ini mulai bermunculan, bersolek untuk menarik perhatian wisatawan datang.

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1

Tempat wisata tersebut rata-rata masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan dibantu oleh pemerintah desa. Di Kabupaten Ponorogo saat ini ada 95 desa yang mengajukan diri untuk menjadi desa wisata. Ada 70 desa pada tahun 2017 yang disahkan oleh Bupati Ponorogo melalui Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2017 tentang penetapan desa wisata di Kabupaten Ponorogo yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Ponorogo. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, desa yang akan ditetapkan sebagai desa wisata harus memiliki potensi yang layak dikunjungi, seperti air terjun dan hutan pinus, danau, cagar budaya, seni tradisi dan potensi lainnya. Selain itu, juga melihat partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Partisipasi masyarakat ini dibuktikan dengan adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing desa².

Dinas Pariwisata Ponorogo bersama Asosiasi Desa Wisata (ASIDEWI) Jatim sebagai fasilitator terus berusaha mengembangkan desa wisata di Ponorogo dengan adanya anggaran khusus yang akan diberikan kepada desa-desa yang melakukan inovasi sebagai desa wisata. Sebagai landasan hukum terbentuknya desa wisata Dinas Pariwisata Ponorogo sangat berupaya membantu terbitnya Surat Keputusan untuk menjamin pelaksanaan dan pengelolaan desa wisata. Sehingga dalam legitimasi hukum secara sah Desa Karangpatihan telah dinyatakan sebagai Desa Wisata dengan menggunakan Surat Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2017 tentang penetapan desa wisata.³

Dalam kasus lain, Dinas Pariwisata menjanjikan bantuan kepada setiap desa wisata namun bantuan tersebut belum bisa direalisasikan. Dinas Pariwisata telat dalam mencairkan dana bantuan sebesar 25 juta masing-masing desa wisata untuk pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), namun sampai saat ini belum diterima oleh desa .⁴

²<http://www.solopos.com/2017/01/31/wisata-ponorogo-jadi-desa-wisata-25-desa-bakal-digelontor-rp25-juta-789091> di akses pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 20.30

³Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2017 tentang penetapan desa wisata di Kabupaten Ponorogo

⁴ Hasil wawancara dengan Teguh ketua Pokdarwis Karangpatihan 29 April 2017 pukul 10.20

Desa Karangpatihan adalah salah satu desa di Kecamatan Balong Ponorogo, jarak Desa Karangpatihan dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekitar 20 Km atau dengan waktu tempuh 45 menit perjalanan, sementara akses jangkauan ke pusat Kecamatan Balong kurang lebih 5 Km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Kecamatan Balong Ponorogo sempat terkenal di media berita Indonesia karena di wilayah ini terdapat desa yang sebagian masyarakatnya memiliki keterbelakangan mental yaitu di desa Karangpatihan.

Terletak di bagian selatan kabupaten Ponorogo Desa Karangpatihan memiliki kontur tanah berupa dataran rendah di bagian timur dan perbukitan di sisi barat. Karangpatihan dahulu terkenal di kalangan masyarakat Ponorogo dan menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia karena di daerah ini banyak terdapat masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental atau disebut dengan tunagrahita, sehingga Karangpatihan sempat dijuluki sebagai kampung idiot. Letaknya yang terpencil dan jauh dari pusat kota membuat pembangunan di daerah ini tertinggal, akses masuk sedikit sulit karena jalan yang sempit dan menanjak serta berkelok-kelok⁵.

Secara demografi masyarakat Desa Karangpatihan merupakan desa yang mempunyai akulturasi yang hampir sama dari desa di sekitarnya. Namun keanekaragaman potensi kondisi alam dan masyarakat yang ada di desa ini membuat desa Karangpatihan berbeda dengan desa yang lain. Jumlah penduduk Desa Karangpatihan seluruhnya berjumlah 5.794 jiwa yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 2.860 jiwa (49,36 %) dan perempuan berjumlah 2.932 jiwa (50,60 %). Dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani.⁶ Masyarakat di Dukuh Tanggungrejo pada umumnya merupakan masyarakat yang

⁵ Hasil observasi penulis tahun 2017

⁶ Buku profil Desa Karangpatihan 2016

kurang mampu, tercatat sebanyak 290 KK (Kepala Keluarga) hidup di bawah garis kemiskinan dan 561 KK tergolong hampir miskin.⁷

Dukuh Tanggungrejo menyimpan potensi yang sangat luar biasa berupa pemandangan alam berupa pegunungan, mata air dan hutan pinus yang asri. Dibalik citra kampung idiot yang disandangnya Pemerintah Desa Karangpatihan bersama masyarakat terus berusaha melepaskan citra negatif tersebut dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup dan menghilangkan citra negatif kampung idiot yang telah melekat selama ini. Potensi alam berupa perbukitan dan pegunungan pinus yang ada disekitar desa Karangpatihan menjadi objek wisata unggulan yang di tawarkan kepada para wisatawan. Pada bulan Agustus 2015 menjadi tolak ukur dibukanya Gunung Beruk sebagai objek wisata oleh masyarakat desa Karangpatihan, dengan gotong royong masyarakat bersama karangtaruna Dukuh Tanggungrejo membangun sebuah rumah pohon di kawasan Gunung Beruk dengan inspirasi wisata Kalibiru di Jogjakarta. Gunung Beruk yang sebelumnya tidak terurus dan marak dijadikan ladang pembalakan liar oleh masyarakat mulai berbenah sebagai sarana objek wisata yang menawarkan suasana khas pedesaan.

Setelah diunggah ke media sosial ternyata respon yang diberikan masyarakat sangatlah baik, mereka kemudian penasaran untuk datang ke Gunung Beruk untuk sekedar berfoto dan menikmati suasana pegunungan yang asri. Pengelola Gunung Beruk juga menyediakan tempat untuk berkemah dan sarana outbond guna menunjang pariwisata di sana. Sampai saat ini Gunung Beruk terus berbenah dengan penambahan fasilitas-fasilitas baru agar pengunjung semakin betah dan dapat menambah jumlah wisatawan yang datang kesana. Dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa kepada Pokdarwis dan karangtaruna dukuh Tanggungrejo. Dalam hal ini Karangtaruna Tanggungrejo berperan aktif sebagai motor penggerak pengelolaan Gunung Beruk dan

⁷www.kompasiana.com diakses tanggal 3 Mei 2017 pukul 19.30

Pemerintah Desa di bawah pimpinan Eko Mulyadi sebagai kepala desa Karangpatihan dan Pokdarwis sebagai pembimbing sekaligus pelindung pengelolaan wisata yang ada di Gunung Beruk.

Pemerintah Desa Karangpatihan dalam hal ini diwakili Kepala Desa Eko Mulyadi juga sangat aktif dalam forum-forum rembug desa wisata baik di tingkat Ponorogo maupun provinsi guna meningkatkan pengelolaan desa wisata di Karangpatihan. Namun dalam kenyataannya ada beberapa masalah menyangkut wisata Gunung Beruk, lahan wisata Gunung Beruk adalah milik Perhutani KPH Lawu Ds. Wewenang sepenuhnya pengelolaan lahan hutan untuk dijadikan sebagai tempat wisata harus sesuai izin dari pihak Perhutani. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka Karangtaruna bekerjasama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Wonorekso dalam mengurus izin dan melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan petak hutan yang dijadikan sebagai wisata kepada pihak Perhutani Lawu DS. Setelah adanya konflik pengelolaan dan pembagian hasil dari wisata, maka LMDH dan karangtaruna sepakat melakukan MoU (Kesepakatan Bersama) pengembangan wisata alam hutan pinus Gunung Beruk. Namun perjanjian tersebut masih sementara, dan berlaku satu tahun sambil menunggu Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang bagi hasil wisata lebih terperinci disahkan oleh Perhutani dan dinas terkait.

Salah satu yang menarik peneliti untuk mengambil Gunung Beruk sebagai objek penelitian adalah karena wisata ini tergolong baru dan meyedot perhatian masyarakat Ponorogo, selain itu letak wisata ini berada di desa Karangpatihan yang dikenal dengan masyarakat sebagai kampung idiot. Dahulu orang datang ke Desa Karangpatihan untuk kegiatan sosial pemberian bantuan ke masyarakat tunagrahita, namun sekarang mereka datang kesini adalah untuk berwisata. Karangpatihan yang dahulu dikenal sebagai kampung idiot kini mulai bersolek dan mulai dikenal sebagai desa wisata dengan potensi Gunung Beruknya.

Terlepas dari segala potensi besar yang dimilikinya tentunya ada beberapa masalah yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan wisata Gunung Beruk. Percuma adanya potensi besar sumber daya alam wisata yang potensial apabila tidak dijalankan dengan manajemen pengelolaan wisata yang baik. Faktor tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan pariwisata yang ada disana, masalah yang *pertama* adalah terbatasnya anggaran membuat pengembangan wisata Gunung Beruk yang dilakukan Karangtaruna sebagai pengelola wisata menjadi terhambat. Keterbatasan inilah yang membuat proses pengembangan sektor pariwisata di Gunung Beruk menjadi kurang optimal. Dana pembangunan dalam memenuhi fasilitas wisata selama ini sebagian besar dipenuhi dari pemasukan parkir dan even acara. Karena jumlah pengunjung yang tidak menentu maka dana yang masukpun tidak dapat dipastikan, namun rata-rata dalam sehari ada sekitar 20 motor yang menggunakan jasa parkir dan pada hari libur jumlahnya bisa mencapai 50 motor lebih dengan estimasi biaya parkir sebesar Rp 5.000.00 rupiah.⁸

Yang kedua, akses masuk ke wisata Gunung Beruk yang masih harus dilakukan perbaikan. Jalan masuk menuju lokasi wisata masih banyak yang berlubang sehingga kurang nyaman untuk dilewati, dan juga diperlukannya pelebaran jalan mengingat jalan yang sempit sehingga kendaraan besar seperti mobil ataupun bus sulit masuk apabila berpapasan dengan kendaraan besar lainnya.⁹

Yang ketiga adalah adanya konflik antara pihak Desa Karangpatihan dengan pihak Perhutani, dimana Perhutani sebagai pemilik hutan lindung yang ada di Gunung Beruk merasa keberatan dengan diberlakukannya tarif tiket masuk ke dalam kawasan wisata Gunung Beruk.¹⁰ Meskipun sudah ada kesepakatan bersama dengan Perhutani tetapi itu hanya bersifat sementara. Belum disahkannya Perjanjian Kerjasama (PKS) atau kesepakatan yang

⁸ Hasil wawancara dengan Teguh ketua Pokdarwis Karangpatihan 29 April 2017 pukul 10.20

⁹ Hasil observasi penulis tahun 2017

¹⁰ <https://madiunraya.com/2017/03/28/permasalahan-clear-perhutani-dukung-pengembangan-wisata-gunung-beruk/> diakses 30 April 2017 pukul 11.20

mengatur tentang pembagian hasil dari wisata yang ada di Gunung Beruk membuat konflik akan terus terjadi. Dengan lamanya penerbitan PKS maka untuk saat ini segala macam penarikan retribusi masuk Gunung Beruk tidak diizinkan oleh Perhutani, dalam kata lain pengelola tidak boleh sepenuhnya mengeksploitasi Gunung Beruk untuk mencari keuntungan sepihak.¹¹ Ini jelas menjadi sebuah kerugian bagi pengelola disaat iklim wisata disana yang mulai naik daun.

Desa wisata adalah pengembangan suatu wilayah desa yang pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada tetapi lebih cenderung kepada penggalian potensi desa dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi rangkaian aktifitas pariwisata, serta mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukungnya..

Selain wisata alam unggulan yaitu Gunung Beruk desa Karangpatihan juga memiliki potensi wisata alam lain yang tidak kalah menarik. Objek wisata ini sedang dikenalkan kepada masyarakat agar menambah jumlah minat wisatawan untuk hadir ke Desa Karangpatihan, wisata itu antara lain Air Terjun Kedung Mimang, Watu Jolotundo, wisata sejarah situs Ngoro Den Panji dan kolam pemancingan ikan. Potensi alam lain yang dimiliki adalah berupa hasil tambang berupa pasir dan batu.

Wisata alam Karangpatihan juga memiliki potensi budaya yang besar dengan adanya beberapa kesenian yaitu seni reyog, seni gajah-gajahan, karawitan, campursari, ketoprak dan tayub atau gambyong. Bukan hanya kesenian dan potensi alam yang dimiliki desa Karangpatihan, namun dari sektor lainnya desa Karangpatihan juga memiliki potensi

¹¹<http://www.ponorogoinfo.com/2017/03/wisata-gunung-beruk-karangpatihan-belum.html> diakses 30 April 2017 pukul 13.20

agrowisata berupa kebun jeruk yang berada di bawah kaki Gunung Beruk. Hasil pertanian juga sangat beragam berupa palawija, padi, jagung, ketela dan lain-lain.

Sektor lain yang dimiliki Karangpatihan adalah dalam sektor kerajinan tangan dan industri makanan dimana masyarakat berkebutuhan khusus tunagrahita lebih mudah mempromosikan hasil kerajinan tangan mereka berupa keset dari kain perca, kerajinan mote dan lain-lain. Masyarakat desa Karangpatihan juga mengenalkan makanan khas berupa nasi tiwul dengan diolah menjadi berbagai masakan seperti tiwul goreng dan tiwul ikan asin. Selain tiwul, makanan khas lain dari wisata Gunung Beruk adalah sego pecel godong jati. Makanan tersebut dijual oleh masyarakat sekitar melalui warung-warung yang berada disekitar wisata Gunung Beruk dengan ijin dari pengelola.

Berkembangnya kegiatan pariwisata di desa wisata Karangpatihan dapat memberikan dampak atau pengaruh yang luas baik itu dampak positif maupun negatif terhadap kondisi lingkungan fisik, kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut. Dengan bangkitnya Karangpatihan menjadi desa wisata maka lebih banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat pada umumnya adanya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana. Misalnya perbaikan jalan, penerangan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana ini dapat dilihat dengan dibangunnya lampu penerangan jalan, perbaikan jalan, saluran air dan gapura masuk desa.

Dengan adanya potensi yang besar tersebut maka diperlukan pengelolaan yang tepat agar pariwisata yang mulai dibangun oleh masyarakat Karangpatihan dapat bertahan dan terus berkembang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dengan mesin penggerak utama Karangtaruna Wirataruna Dukuh Tanggungrejo Gunung Beruk telah disulap menjadi objek wisata yang menarik, wisata yang dikelola oleh Karangtaruna tersebut telah menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Setelah adanya desa wisata

maka dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat di desa tersebut, seperti usaha warung makan, penginapan, tempat penitipan kendaraan dan lain sebagainya. Adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas di kawasan desa wisata dapat mempengaruhi pendapatan penduduk desa Karangpatihan dan memperkenalkan citra baru desa Karangpatihan sebagai desa wisata dan bukan lagi dikenal sebagai kampung idiot seperti selama ini.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengelolaan wisata Gunung Beruk studi kasus di Desa Wisata Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo**”. Dengan menggunakan teori strukturasi penelitian ini memfokuskan mengenai tata pengelolaan desa wisata di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, peneliti memiliki pertanyaan untuk diajukan yakni :

Bagaimana pengelolaan wisata Gunung Beruk di desa wisata Karangpatihan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan :

Mengkaji pengelolaan wisata Gunung Beruk yang dilakukan oleh pemerintah desa Karangpatihan bersama Karangtaruna Wirataruna melalui teori strukturasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka didapatkan manfaat secara akademis maupun praktis yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini, yakni :

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Sebagai penambah literatur mengenai pengembangan desa wisata
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian tentang pengelolaan desa wisata dan dampaknya bagi masyarakat.
3. Sebagai pelengkap bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memperoleh hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat mengenai proses pengembangan desa wisata .
2. Menjadi contoh rujukan bagi desa wisata lain untuk lebih meningkatkan kinerjanya membangun pariwisata di setiap daerahnya.
3. Sebagai contoh sistem pengelolaan wisata kepada daerah lain yang memiliki potensi dan sumber daya yang sama sebagai desa wisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini ada tiga hal utama yang penulis bahas untuk menunjang analisis mengenai *Pertama*, studi penelitian terdahulu, sebagai dasar dan acuan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. *Kedua*, kerangka konseptual berisi tentang teori dan definisi yang peneliti gunakan untuk menganalisa penelitian mengenai pengelolaan desa wisata di Desa Karangpatihan. *Ketiga*, alur berpikir menjelaskan secara umum tentang sebuah penelitian yang dilakukan.

2.1 Studi Penelitian Terdahulu

Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Rika Puspita Sari, yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata Oleh Kelompok Sadar Wisata DewaBejo Di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten GunungKidul*”. Bentuk penelitian ini adalah skripsi dan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini berfokus pada program kerja Kelompok Sadar Wisata Dewabejo dalam mengembangkan objek wisata sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat, kontribusi yang telah diberikan dalam mengembangkan objek wisata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, serta mendeskripsikan factor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi jalannya pengembangan obyek wisata yang sebagai upaya pemebrdayaan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian

ini adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan ojek wisata , serta konsep kelompok social. Hasil dari penelitian ini adalah program yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata Dewabejo dalam mengembangkan obyek wisata sebagai usaha memberdayakan masyarakat, diantaranya pelatihan manajemen organisasi, pelatihan standart operating procedure, pelatihan K3, pelatihan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pelatihan pemanduan, pelatihan pengenalan batu karst, dan pelatihan tata ruang desa wisata yang baik, selain itu permasalahan yang dihadapi Kelompok Sadar Wisata Dewabejo diantaranya, kecemburuan sosial diantara masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perubahan yang ada di lingkungan mereka, dan kurangnya perhatian dari pihak dinas terkait. Adapun faktor pendukung yang ada meliputi, semangat dan motivasi dari semua pengurus maupun anggota, dorongan dari keluarga, sikap kekeluargaan yang ada, tidak ada jenjang sosial antara bawahan dan atasan, sikap gotong royong yang masih kental, dan pengurus yang kreatif dan mampu mengayomi anak buahnya.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anggrisi Yudo Asmoro yang berjudul Peranan Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Sebagai Desa Wisata Dalam Mempertahankan Budaya Lokal penelitian ini merupakan skripsi yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini meneliti bagaimana perwujudan desa wisata yang terdapat di Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, serta melihat peran dan dampak perubahan pada social budayanya masyarakat setelah menjadi desa wisata. Penelitian ini mengambil desa wisata sebagai teorinya dan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk desa wisata yang ada di Desa Piton berupa *live in* dan *home stay* pusat dari desawisata terdapat pada Dusun Krajan Wetan. Dalam mempertahankan budaya lokal sikap dan budaya masyarakat setempat yang menganut ajaran segala bentuk contoh yang baik harus di miliki oleh setiap warga sehingga budaya local tidak punah selain

¹Nur Rika Puspita Sari, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata Oleh Kelompok Sadar Wisata DewaBejo Di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten GunungKidul".Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.2012 diunduh dari eprints.uny.ac.id tanggal 13Maret 2017, pukul 18.50 WIB

itu dari pihak masyarakat sendiri tetap mempertahankan dan memperbaiki demi kehidupan yang baik. Selain itu bentuk budaya lokal yang dimiliki Desa Piton tidak berubah secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya budaya lokal sebelum dan sesudah desa Piton menjadi desa wisata. Budaya lokal Desa Piton berasal dari tradisi Jawa nenek moyang yang sampai sekarang masih seperti keasliannya.²

Ketiga, Yuliana Titis Wahyuningrum, *Dampak Ekonomi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Rumah Dome, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*³, diterbitkan tahun 2015. Tulisan ini memaparkan tentang profil dari Desa Wisata Rumah Dome, partisipasi warga Kampung NewNglepen dalam pengembangan pariwisata, serta dampak ekonomi desa wisata bagi warga Kampung New Nglepen. Selain itu, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dari sisi penawaran pariwisata (4A), Desa Wisata Rumah Dome memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Berdasarkan sisi permintaan, pengunjung yang datang adalah kalangan anak-anak muda dan aktivitas pengunjung yang datang hanya sekedar melihat karena penasaran. Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan pengelolaan desa wisata yang dilakukan oleh warga Kampung New Nglepen, tapi tingkat partisipasinya masih kurang. Pembentukan desa wisata ini memberikan dampak ekonomi bagi warga, yaitu peningkatan pendapatan dan pembebasan pembayaran sewa tanah.

² Anggris Yudo Asmoro. "Peranan Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Sebagai Desa Wisata Dalam Mempertahankan Budaya lokal". Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2009 diunduh dari lib.unnes.ac.id pada tanggal 13 Maret 2017, pukul 18.40 WIB

³ Yuliana Titis Wahyuningrum, "Dampak Ekonomi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Rumah Dome, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015. Diunduh dari <http://eprints.uns.ac.id/>, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 19.20 WIB.

Keempat, Susi Lestari, *Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum, Sleman)* diterbitkan tahun 2009.⁴ Tulisan ini membahas tentang usaha untuk mengembangkan sektor pariwisata khususnya desa wisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa wisata Kembang Arum, Sleman. Tulisan ini juga menjelaskan tentang partisipasi aktif masyarakat secara langsung mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pemeliharaan desa wisata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *community enterprises* yang dikemukakan oleh Tadjuddin Noer Effendi. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Penelitian Dan Tahun | Hasil Penelitian |
|----|--|--------------------------------------|---|
| 1. | <i>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata Oleh Kelompok Sadar Wisata DewaBejo Di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul</i> | Nur Rika Puspita Sari (2012) | . Pada penelitian ini berfokus pada program kerja Kelompok Sadar Wisata Dewabejo dalam mengembangkan objek wisata sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat, kontribusi yang telah diberikan dalam mengembangkan objek wisata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, serta mendeskripsikan factor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi jalannya pengembangan obyek wisata yang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Hasilnya adalah pengembangan obyek wisata dilakukan sebagai usaha memberdayakan masyarakat, diantaranya pelatihan manajemen organisasi, pelatihan standart operating procedure, pelatihan K3, pelatihan bahasa inggris, bahasa Indonesia, pelatihan kependamuan, pelatihan pengenalan batu karst, dan pelatihan tata ruang desa wisata yang baik. |
| 2. | Peranan Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan | Anggris Yudo Asmoro, skripsi (2009) | Dengan menggunakan teori pendekatan sosiolog, hasil dari penelitian ini adalah bentuk desa wisata yang ada di Desa |

⁴Susi Lestari, "*Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum, Sleman)*", Skripsi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. Diunduh dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 20.13 WIB.

| | | | |
|----|--|---|---|
| | Sebagai Desa Wisata Dalam Mempertahankan Budaya Lokal | | Piton berupa <i>live in</i> dan <i>home stay</i> pusat dari desawisata terdapat pada dusun KrajanWetan. Dalam memepertahankan budaya lokal sikap dan budaya masyarakat setempat yang menganut ajaran segala bentuk contoh yang baik harus di miliki oleh setiap warga sehingga budaya lokal tidak punah selain itu dari pihak masyarakat sendiri tetap mempertahankan dan memperbaiki demi kehidupan yang baik. Selain itu bentuk budaya lokal yang dimiliki Desa Piton tidak berubah secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya budaya lokal sebelum dan sesudah desa Piton menjadi desa wisata. Budaya lokal Desa Piton berasal dari tradisi Jawa nenek moyang yang sampai sekarang masih seperti keasliannya |
| 3. | Dampak Ekonomi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Rumah Dome, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | YulianaTitis Wahyuningrum, skripsi (2015) | Membahas tentang bagaimanakah proses penyebaran informasi tentang Keputusan Bupati Sukoharjo tentang pencanangan Desa Wirun sebagai desa wisata dan apa harapan masyarakat Desa Wirun terhadap hal tersebut. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata di Desa Wirun. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa telah dilakukan ketiga tahapan partisipasi yakni pembangunan lokalitas, perencanaan sosial serta aksi sosial. Walau dari ketiga tahap tersebut telah dilaksanakan mulai dari sosialisasi, promosi, pembentukan Kelompok Sadar Wisata, kerjasama dengan hotel-hotel yang ada di Solo, namun di masa tertentu hasil yang diinginkan tidak dapat tercapai. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori Partisipasi yang dikemukakan oleh Roothman. Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif |
| 4. | Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi | Susi Lestari, skripsi (2009) | Membahas tentang partisipasi aktif masyarakat di desa Kembang Arum secara langsung mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pemeliharaan desa wisata melalui |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|
| | di Desa Wisata Kembang Arum, Sleman) | | pendekatan teori <i>community enterprises</i> . Yang menghasilkan beberapa dampak dari adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat tentang pengembangan wisata dan hambatan yang dialami oleh masyarakat. |
|--|--------------------------------------|--|---|

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2017.

Dari keempat hasil penelitian yang penulis sajikan, maka penelitian penulis yang berjudul **Pengelolaan Wisata Gunung Beruk Di Desa Wisata Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo** sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis sajikan diatas. Penulis berfokus pada pengelolaan wisata yang ada di Desa Karangpatihan khususnya wisata Gunung Beruk serta peran masyarakat, pemerintah desa dan para *stakeholder* dalam pengelolaan wisata, penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthonie Giddens untuk menganalisis rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian.

2.1 Kerangka Teoritik.

2.2.1 Teori Strukturasi

Strukturalisme dan fungsionalisme menekankan secara kuat keunggulan keseluruhan sosial atas bagian-bagian individunya (aktor atau subyek manusia). Menurut teori strukturasi Anthony Giddens domain dasar kajian ilmu-ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik-praktik sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. Aktivitas-aktivitas sosial manusia, seperti halnya benda-benda alam yang berkembang-biak sendiri, saling terkait satu sama lain.⁵ Aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus-menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu.

⁵Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Stukturasi Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hlm 3

Agen yang dimaksud dalam strukturasi adalah agen manusia yang terlibat langsung terhadap praktik-praktik sosial. Definisi agen menurut the Oxford English Dictionary dalam Anthony Giddens yang diartikan sebagai orang yang menggunakan kuasa atau menghasilkan dampak. Agensi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku dalam artian bahwa individu itu bisa bertindak berbeda dalam setiap fase apa pun dalam suatu tindakan tertentu. Bisa disebut pula bahwa agensi mengacu pada perbuatan.⁶

Proposi utama teori strukturasi adalah aturan-aturan dari sumber daya yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi tindakan sekaligus merupakan sarana-sarana reproduksi sistem⁷. Hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas bukan dualism, dualitas ini terjadi pada praktik sosial yang berulang dan terpolat dalam lintas ruang dan waktu. Anthony Giddens menjelaskan bahwa hal seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai dualism yang dimana salah satu dari dualitas maupun dualism tersebut bisa mendominasi dari terbentuknya praktik sosial yang terjadi.

Teori strukturasi lebih mendasarkan hubungan agen dan struktur yang mempunyai sifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Struktur mempunyai kemampuan untuk membatasi tetapi disisi lain struktur juga memberikan kemungkinan pada agen untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini tindakan dapat diartikan terkait hubungannya dengan dengan struktur yang memaksa yakni agen mempunyai kekuasaan untuk melakukan pertentangan, meskipun struktur itu sendiri bersifat mengekang namun struktur juga memberikan peluang bagi agen.⁸

Ada tiga tingkatan kesadaran dalam strukturasi yang berkaitan dengan agen atau aktor⁹ :

⁶*Ibid* Hlm 16

⁷*Ibid* Hlm 30

⁸*Ibid*

⁹ Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Strukturasi Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hlm 10-12

1. Kesadaran praktis

Gagasan kesadaran praktis sangat penting dalam dalam teori strukturasi, kesadaran praktis adalah karakter agen atau subjek manusia yang terutama luput dari perhatian structuralism. Karakter ini adalah apa yang aktor percaya tentang kondisi-kondisi sosial khususnya kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Apa yang diketahui aktor ketahui khususnya tentang kondisi sosial dan tindakannya sendiri namun aktor tidak dapat mengekspresikan tindakannya secara diskursif.

2. Kesadaran diskursif

Yaitu apa yang mampu dikatakan atau diberi ekspresi verbal oleh para aktor, tentang kondisi-kondisi sosial khususnya tentang kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. tidak ada dinding pembatas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif, hanya saja ada perbedaan antara yang bisa dikatakan dan apa yang semata-mata telah dilakukan.

3. Motif atau kognisi

lebih merujuk ke potensial bagi tindakan ketimbang cara (mode) tindakan itu dilakukan oleh si agen. Motif hanya memiliki kaitan langsung dengan tindakan dalam situasi yang tidak biasa yang menyimpang dari rutinitas. Dalam melakukan tindakan sehari-hari, agen tidaklah secara langsung dilandaskan pada motivasi tertentu.

Agen dapat dipahami sebagai pelaku atau orang yang terlibat dalam sebuah praktik sosial. Sedangkan untuk membedakan agen dan agensi terlihat bahwa agensi mencerminkan aktivitas yang terpola (disengaja) oleh individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Dapat dikatakan agensi berkaitan erat dengan kekuasaan yang kemudian mampu mewujudkan kehadiran agen.¹⁰ Menganalisa strukturasi dari sistem-sistem sosial berarti mempelajari cara-cara bagaimana sistem-sistem seperti itu yang tertanam dalam aktivitas-aktivitas aktor tertentu yang berpegang teguh pada aturan-aturan dan sumber daya dalam

¹⁰Daddi H. Gunawan. 2014. *Perubahan Sosial di Pedesaan Bali: Dualitas, Kebangkitan Adat, dan Demokrasi Lokal*. Serpong: Marjin Kiri. Hlm 54

beragam konteks tindakan, diproduksi dan direproduksi dalam interaksi. Sangat penting bagi gagasan tentang strukturasi adalah teorema dualitas struktur, yang secara logika terkandung dalam argumen-argumen diatas. Komposisi antara para agen dan struktur bukanlah dua perangkat fenomena yang saling terpisah atau dualisme melainkan mewakili sebuah dualitas. Menurut gagasan tentang dualitas struktur kelengkapan struktural dari sistem sosial adalah sarana sekaligus hasil dari praktik-praktik sosial yang terjadi secara rutin.

2.2.2 Struktur (Aturan dan Sumberdaya)

Dalam analisis sosial struktur merujuk pada kelengkapan-kelengkapan penstrukturasi yang memungkinkan pengikatan waktu ruang dalam sistem-sistem sosial. Struktur meliputi aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi terorganisasi sebagai kelengkapan dari sistem sosial. Sedangkan strukturasi merupakan kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur dan karenanya reproduksi sistem sosial itu sendiri.¹¹ Sebagaimana agen dan struktur mempunyai pola prinsip struktural yang terdiri dari signifikansi (Tata simbolis-wacana), Dominasi berupa penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi), Legitimasi yang berupa skema normative yang ada pada tata hukum.

Dalam teori strukturasi Anthony Giddens memiliki tiga dimensi diantaranya sebagai berikut :

1. Struktur Signifikasi yang menyangkut tata simbolik atau bentuk wacana. Tata simbolik merupakan urutan simbolis sebagai satu dimensi utama penggolongan terhadap institusi-institusi. Tata simbolis atau bentuk wacana adalah fokus institusional utama ideologi. Tata simbolis adalah suatu cara atau aturan.¹² Maksudnya bahwa tata simbolik yang berarti simbolis yang digolongkan terhadap institusi.¹³

¹¹ Ibid

¹² <https://kbbi.web.id/tata>

¹³ Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Strukturasi Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm 52-53

Aspek signifikansi yang masih terpaut pada wacana akan berimplikasi pada aspek dominasi yang menggerakkan seluruh fasilitas yang dimiliki oleh seorang agensi baik dominasi politik maupun ekonomi. Institusi yang dimaksud dalam wacana penelitian pengelolaan potensi wisata di desa Karangpatihan adalah pemerintah desa Karangpatihan dan pengelola Gunung Beruk yaitu Karangtaruna Wirataruna. Keberadaan wisata yang ada di Karangpatihan telah menumbuhkan praktik-praktik sosial baru yang juga mempengaruhi aspek ekonomi maupun sosial yang ada di desa Karangpatihan.

2. Struktur dominasi yang mencakup penguasaan atas orang (politik) kekuasaan dan barang atau hal (ekonomi). Struktur dominasi tergantung pada monilisasi dua jenis sumber berbeda. Sumber daya alokatif mengacu pada kemampuan-kemampuan atau lebih tepatnya pada bentuk kemampuan transformatif yang melahirkan perintah atas objek-objek, benda-benda atau fenomena material. Sumber daya autoriatrif merujuk pada jenis-jenis kemampuan transformatif yang melahirkan perintah atas orang-orang atau para aktor.¹⁴ Dalam hal ini dominasi dalam penelitian ini adalah aktor yang berperan terhadap pengelolaan wisata di desa Karangpatihan. Setiap aktor yang berkuasa mempunyai peran masing-masing dalam memberikan pengaruh terhadap berjalannya pengelolaan wisata di karangpatihan. Dominasi atau penguasaan tersebut kemudian mengikat praktik pengelolaan wisata dalam sebuah tata hukum maupun lahirnya kebijakan yang ada pada organisasi pengelola wisata Gunung Beruk.
3. Struktur legitimasi menyangkut masalah peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum. Maksudnya adalah menyangkut struktur dalam aturan-aturan hukum.¹⁵ Legitimasi hukum yang dimaksud dengan penelitian ini adalah adanya kekuatan

¹⁴*Ibid*

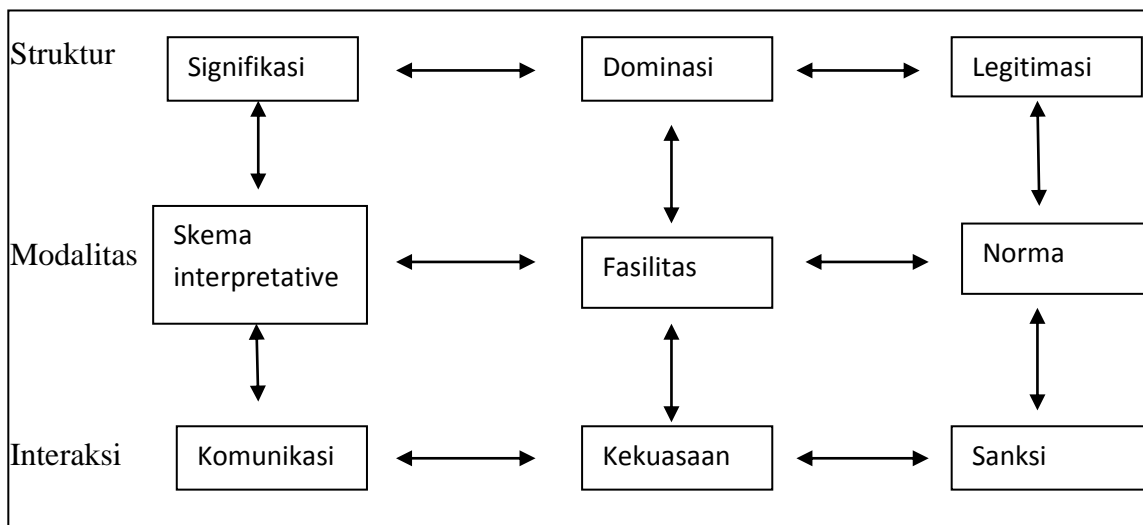
¹⁵ *Ibid*

hukum yang menjamin pengelolaan wisata di desa Karangpatihan. Legitimasi juga menyangkut peraturan-peraturan sosial yang menyangkut tata kelola wisata disana.

Dalam dimensi strukturasi terdapat skema dimensi strukturasi yang digambarkan sebagai berikut.

Bagan 2.1

Skema struktural



Sumber : Anthony Giddens Teori Strukturasi Hlm 30

Struktur signifikasi yakni tata simbolik yang berarti simbolis yang digolongkan terhadap institusi, dominasi yakni penguasaan atas orang (politik) dan barang atau hal (ekonomi) yang dianalogikan dalam dua sumber daya yakni sumber daya autoritatif merujuk pada jenis-jenis kemampuan transformative yang melahirkan perintah atas orang-orang atau aktor yang termasuk dalam politik dan sumber daya alokatif mengacu pada kemampuan-kemampuan atau lebih tepatnya pada bentuk kemampuan transformatif yang melahirkan perintah atas objek-objek, benda-benda atau fenomena material yang termasuk dalam ekonomi dan legitimasi adalah struktur yang tersusun dalam aturan-aturan hukum. Kemudian modalitas yakni sebagai sarana antara strukturasi berfungsi menjelaskan dimensi-dimensi utama dari dualitas struktur dalam interaksi, menghubungkan kapasitas mengetahui para agen

dengan bagian struktural. Maksudnya adalah bahwa modalitas menghubungkan dimensi utama strukturasi dalam interaksi dalam bagian structural.¹⁶

Pada mobilitas terdapat kolom skema interperatif yakni adalah cara penjenisan yang tersimpan dalam gudang pengetahuan para aktor dan diterapkan secara refleksif ketika melangsungkan komunikasi, fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, dan norma yakni aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. pada dimensi interaksi terdapat kolom komunikasi, maksudnya adalah sebagai unsur umum interaksi merupakan konsep yang lebih hendak dikatakan atau dilakukan oleh seorang aktor.¹⁷

Tabel 2.2

Dualitas Struktur (Struktur,Sistem, dan Strukturasi)

| Struktur | Sistem | Strukturasi |
|---|---|---|
| Aturan dan sumberdaya atau seperangkat relasi transformasi,terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial. | Relasi-relasi yang direproduksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-praktik sosial regular. | Kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur dan karenanya reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri. |

Sumber : Anthony Giddens Teori Strukturasi, 2010

Tabel 2.2 di atas secara pejoratif menerangkan skema strukturasi menurut giddens bahwa struktur yang berupa aturan dan sumberdaya (dominasi) merupakan seperangkat relasi transformasi yang juga bersifat terorganisasi dan sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem sosial yang direproduksi melalui struktur yang ada dalam artian pada penelitian ini peran agensi yakni dinas pariwisata, Pemerintah Desa dan Perhutani memberikan peran dalam menciptakan struktur peraturan dan struktur pengelolaan wisata yang berlaku di wisata Gunung Beruk. Kemudian dari struktur tersebut agensi meliputi semua pihak yang terlibat secara langsung dilapangan yakni masyarakat, pokdarwis, dan karangtaruna kemudian

¹⁶*Ibid* Hlm 45-47

¹⁷*Ibid*

terlibat dalam relasi sosial yang berkaitan dengan relasi antara para aktor atau kolektivitas yang juga terorganisasi dalam suatu praktik sosial. Praktik sosial dalam struktur pengelolaan wisata Gunung Beruk menimbulkan relasi transformasi yang mengandaikan adanya konteks produksi dan reproduksi praktik sosial dan struktur sosial yang dapat berubah atau tidak berubah sama sekali.

Para agen secara rutin melibatkan bagian-bagian temporal dan spasial perjumpaan-perjumpaan dalam proses penciptaan makna. Skema dimensi strukturasi di atas saling berkaitan satu sama lain. Para aktor dalam menggunakan sarana antara strukturasi dalam reproduksi sistem interaksi, dan dengan menggunakan tanda (*token*) yang sama, mereka membentuk kembali kelengkapan struktural mereka. Penyampaian makna dalam interaksi harus ditekankan terpisah hanya secara analitis dari bekerjanya sanksi-sanksi normatif. Bekal pengetahuan yang para aktor gunakan dalam produksi dan reproduksi interaksi sama seperti bekal pengetahuan yang membuat mereka mampu menciptakan cerita-cerita, menggunakan alasan-alasan dan lain sebagainya.¹⁸

2.2.3 Pengertian Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata atau yang dapat diartikan dengan manajemen pariwisata merupakan suatu peran yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa merujuk pada fungsi-fungsi yang melekat pada peranan tersebut.¹⁹ Dapat diartikan pula pengelolaan pariwisata diartikan sebagai perangkat yang dilakukan oleh pengelola pariwisata (seseorang atau sekelompok orang) yang merujuk pada fungsi yang melekat pada pengelolaan pariwisata.

Menurut Laiper mengemukakan pengelolaan pariwisata berlandaskan pada prinsip manajemen sebagai berikut :

¹⁸ *Ibid*, hlm 45-47

¹⁹ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta, hlm 80

- a. Fungsi *Planning* (merencanakan)
- b. Fungsi *Directing* (mengarahkan)
- c. Fungsi *Organizing* (mengkoordinasi)
- d. Fungsi *Controlling* (pengawasan)²⁰

Koordinasi adalah fungsi yang paling berperan dalam pengelolaan pariwisata. Merujuk pada aktivitas pengelola untuk menterjemahkan informasi, seperti perencanaan, pengawasan dan pengaplikasian dari informasi tersebut secara sistematis ke dalam semua fungsi manajerial yang diterjemahkan secara nyata dalam kegiatan perencanaan, pengarahan serta fungsi pengawasan.

Sedangkan menurut Soewarno mengemukakan bahwa pengelolaan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai tujuan atau sasaran.²¹ Pengelolaan adalah sumber dasar bagi aktor yang terlibat untuk menggunakan sumber daya alam atau sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Maka dari itu dengan adanya pengelolaan ini akan dapat mengendalikan potensi sumber daya.

Definisi lain muncul yang mengartikan bahwa pengelolaan pariwisata juga dapat dimaknai sebagai kerjasama antar aktor dalam menjaga keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial.²² Dalam pengertian ini pengelolaan pariwisata dimaknai dari sudut pandang peran aktor. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang sangat menguntungkan sehingga berbagai macam aktor hadir untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas pengelolaan pariwisata. Aktor yang terlibatpun juga harus memperhatikan keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial agar mampu dimanfaatkan keberadaannya selama mungkin.

Dapat diambil kesimpulan dari definisi di atas bahwa pengelolaan pariwisata adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu tempat yang

²⁰ *Ibid*, hlm 81

²¹ H Soewarno Darsoprajitno, 2002, *Ekologi Pariwisata*, Bandung, hlm 378

²² I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, op. cit., hlm 83

mengelola sumber daya entah sumber daya manusia atau sumber daya alam yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, nilai-nilai yang ada, dan kesejahteraan. Pengelolaan pariwisata bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang menguntungkan dari sudut pandang peran aktor yang terlibat didalamnya. Kemudian pengelolaan pariwisata akan dimaknai berhasil apabila memegang 4 prinsip, diantaranya fungsi *planning*, *directing*, *organizing*, dan *controlling*.

2.2.4 Pengertian Desa Wisata

Dalam beberapa tahun belakangan sektor pariwisata terus dikembangkan oleh Pemerintah salah satunya adalah pembentukan desa wisata. Pengembangan pariwisata pedesaan mulai mencuat dan dilirik oleh para wisatawan, hal ini merupakan dampak dari adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah destinasi wisata yang dipilih. Tumbuhnya tren wisata yang kembali ke alam, berinteraksi dengan masyarakat desa, serta mempelajari budaya dan keunikan local sehingga mendorong pengembangan wisata beruasa pedesaan. Pariwisata pedesaan merupakan model pariwisata baru yang memiliki daya tarik tersendiri, ditambah dengan kearifan lokal yang dimiliki tiap desa berbeda.

Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum.²³ Menurut Inskeep dalam Made²⁴ mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Sedangkan definisi desa wisata menurut A.J. Muljadi desa wisata sebagai produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya.²⁵ Desa wisata tidak hanya berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan alam, dan nilai-nilai sosial

²³ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm. 34

²⁴ Made Heny Urmila Dewi, loc.cit.

²⁵ A.J. Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.27

budaya setempat. Hal ini tentu berkaitan erat dengan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan. Dengan demikian, kelestarian alam dan sosial budaya pada masyarakat akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang akan berwisata.

Dalam proses pembentukannya desa wisata terlahir pada suatu kawasan daerah pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata, dengan memiliki keunikan yang layak dijual kepada wisatawan. Adapun keunikan tersebut misalnya seperti seni, budaya, sejarah, alam, gaya hidup yang masih tradisional atau industri kreatif masyarakat pedesaan. Selain berbagai keunikan, desa wisata juga harus memiliki fasilitas sebagai penunjang jalannya kegiatan wisata. Fasilitas penunjang tersebut antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, dan akomodasi dan lain-lain. Untuk itulah maka di setiap desa wisata harus terus berinovasi untuk menggali keunikan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah wisata lain. Serta pembangunan menyeluruh pada sektor infrastruktur sebagai penunjang kemajuan wisata.

Untuk mengakui hak-hak dan keistimewaan desa diterbitkanlah UU No.06 Tahun 2014 sebagai revolusi tentang kehidupan masyarakat desa saat ini. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk merubah *mindset* masyarakat umum tentang kehidupan yang ada di desa. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

“ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”²⁶

²⁶Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1

Di dalam Undang-undang ini juga menjamin bahwa desa memiliki kewenangan untuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan social budaya setempat, maka potensi desa yang memiliki otonomi yang memiliki otonomi asli sangat strategis untuk dikembangkan. Prinsip yang dituangkan dalam Undang- Undang no 6 tahun 2014 ini sesuai dengan kaidah desa wisata, dimana dalam prosesnya pemerintah desa dan masyarakat berhak untuk memaksimalkan potensi alam, budaya dan kearifan lokalnya sebagai penunjang pembentukan desa wisata. Dari beberapa definisi diatas maka sudah jelas bahwa desa Karangpatihan memiliki kriteria sebagai desa wisata, keunggulan yang dimiliki berupa potensi alam Gunung Beruk, potensi kesenian atau adat-istiadat seperti reyog, tayub serta berbagai macam kelompok kesenian yang sangat beragam dan yang terakhir potensi produk industri kerajinan dan agrowisata kebun jeruk yang dapat membuat desa Karangpatihan mampu bersaing dengan desa wisata lain di Ponorogo.

Dalam proses pengelolaan dan pengembangan desa wisata peran serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang terbentuknya desa wisata yang kreatif dan mampu menarik wisatawan dalam jumlah banyak.. Menurut Gamal Suwanto partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata baik di dalam obyek maupun di luar kawasan obyek antara lain:

- (1) Jasa penginapan atau homestay
- (2) Penyediaan /usaha warung makan dan minuman
- (3) Penyediaan/toko souvenir/cinderamata dari daerah tersebut.
- (4) Jasa pemandu/ petunjuk jalan
- (5) Fotografi
- (6) Menjadi pegawai perusahaan/pengusahaan wisata alam, dan lain-lain²⁷

Partisipasi seperti contoh diatas, di desa Karangpatihan sudah mulai berjalan sejak ditetapkan sebagai rintisan desa wisata yaitu lewat pengelolaan lewat

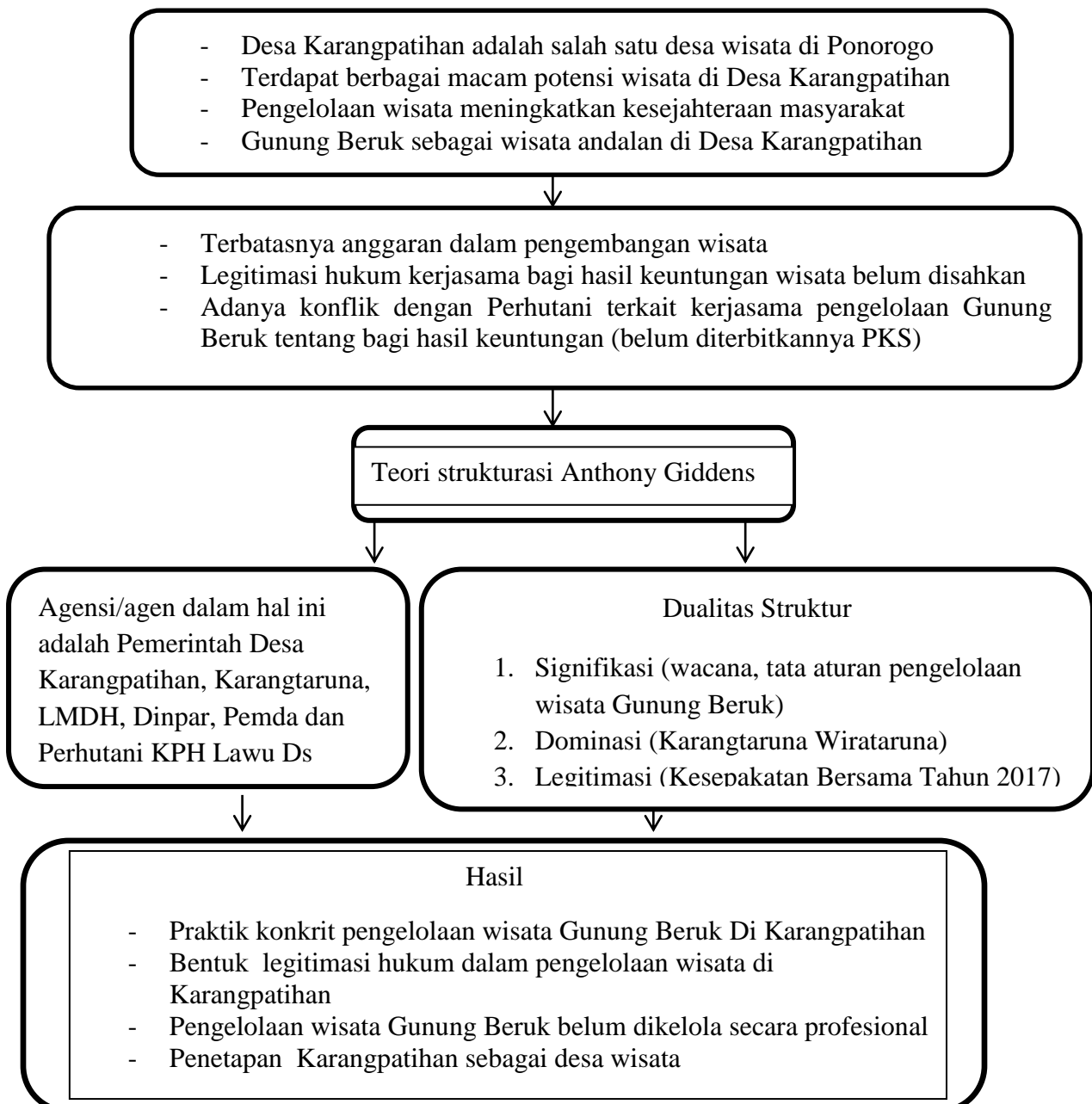
²⁷Gamal Suwanto. *Dasar- dasar Pariwisata*. Yogyakarta, 2004 hlm 86

Pokdarwis, Karangtaruna Dukuh Tanggungrejo serta peran seluruh masyarakat Karangpatihan serta Dinas terkait yang telah terlibat langsung.

2.2 Alur Pikir Penelitian

Sebagai salah satu cara yang memudahkan peneliti untuk mencari data dan menganalisa serta memaparkan hasil analisa, maka dibuatlah sebuah alur pikir sebagai kerangka berfikir dalam proses penelitian. Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah hingga teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menentukan alur pikir penelitian sebagai berikut.:

Bagan 2.2 Alur Temuan Penelitian



Sumber : Data olahan peneliti 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode penelitian berhubungan dengan jenis penelitian, lokasi dan fokus yang diambil dalam penelitian, jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Selain itu dalam bab ini disajikan pula mengenai teknik analisis data dan sistematika.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang dijelaskan secara deskriptif analisis. Pada jenis penelitian ini nantinya hasil dari penelitian dideskripsikan secara jelas dan secara terperinci dalam menggambarkan secara komprehensif dan terpadu mengenai tata kelola desa wisata yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berperan langsung dalam pengelolaan desa wisata di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo

Penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Menurut Kirk dan Miller, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun

¹ Sudarto, 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada Hlm 62

peristilahannya². Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya dalam di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.³

Artinya dalam penelitian kualitatif selain menyajikan data dan fakta yang terjadi di lapangan, penelitian ini juga memeneliti tentang keterkaitannya dengan konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia atau masyarakat yang diteliti. Data deskriptif dapat dihimpun dalam bentuk naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.⁴ Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data). Analisis meliputi mengerjakan data, mengorganisasinya, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang akan anda laporkan. Hasil penelitian kualitatif sendiri dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi pada penelitian yang lain, selama penelitian yang dilakukan masih memiliki kesamaan karakteristik.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis analisis adalah di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo. Penelitian ini tidak terkait dengan dengan pemerintah daerah melainkan hanya pada tingkat pemerintahan desa dengan melibatkan masyarakat desa Karangpatihan dan aparatur pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam pembangunan desa wisata dan pengelolaan wisata di Gunung Beruk. Karangtaruna Wirataruna sebagai motor penggerak pengelolaan wisata serta pemerintah desa Karangpatihan sebagai fasilitator penunjang pembangunan dan pelindung adanya desa wisata.

²Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014. Hlm 6

³*Ibid* hlm 6

⁴*Ibid*. hlm 11

Selain Karangtaruna lembaga yang berperan dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk Di Karangpatihan adalah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang menjadi mitra penghubung masyarakat dengan Perhutani sebagai pemilik lahan hutan di gunung Beruk.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus bertujuan untuk membatasi penelitian agar penelitian tetap terstruktur dan tidak melampaui fokus yang sudah ditentukan. Fokus pada penelitian ini adalah terkait pengelolaan wisata Gunung Beruk yang ada di desa Karangpatihan, dimana dengan di bentuknya desa Karangpatihan menjadi desa wisata maka diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan aspek sosial budaya yang telah dimiliki. Melalui sektor pariwisata membuat desa mampu memaksimalkan potensinya secara mandiri untuk terus membangun.

3.4 Jenis Data

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya membutuhkan banyak sekali data. Data yang dibutuhkan yakni data yang relevan dengan topik penelitian. Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Menurut Loflan dalam Moleong dijelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵

Adapun jenis data yang digunakan dalam proses penelitian terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

⁵ Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.. Hlm. 6

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung ketika mengadakan penelitian di lapangan berkaitan dengan dampak pembangunan desa wisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan di Desa Karangpatihan Ponorogo. Data Primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁶Data primer diperoleh melalui dokumentasi beberapa obyek dan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki kapasitas pada bidangnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan maupun *literature* dan sumber-sumber lain yang tertulis dan relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁷ Apabila data yang dibutuhkan sesuai sebagai data sekunder, maka peneliti cukup studi kepustakaan ataupun mencari melalui internet seperti memilih sumber yang sesuai, serta mengambil dan mencatat yang dibutuhkan, serta mengambil dan mencatat informasi yang diperlukan. Sumber data berupa penjelasan dari narasumber dilakukan dengan mewawancarai informan yang telah ditentukan yang memiliki informasi yang diperlukan dalam rangka proses penelitian dan sumber data dari perilaku melalui observasi atau pengamatan dari aktifitas yang dilakukan di lapangan. Sedangkan, sumber data sekunder yaitu sumber data tertulis, dokumentasi foto, data statistik dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah,

⁶ Saifuddin Azwar.2001,*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar .Hlm 91

⁷*Ibid.*

karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk hipotesis yang sudah dirumuskan.⁸

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu teknik mengumpulkan data dengan metode observasi, metode wawancara, dan studi dokumentasi.⁹

1.5.1 Metode Observasi.

Observasi yaitu melakukan pengamatan atau penginderaan secara langsung terhadap keadaan dan perilaku responden.¹⁰ Aktivitas observasi atau pengamatan ini bisa dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini peneliti harus melihat secara *visual* tentang kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pengelolaan wisata di desa Karangpatihan.

Peneliti telah mengobservasi atau mengamati pengelolaan wisata Gunung Beruk di Desa Karangpatihan yang dilakukan oleh Karangtaruna Wirataruna. Mulai dari aktor yang berperan dalam pengelolaan wisata, dampak dari adanya wisata, perkembangan wisata Gunung Beruk serta hambatan apa saja yang terjadi di lapangan. Dalam observasi ini peneliti dapat melihat fakta di lapangan bagaimana pengelolaan wisata Gunung Beruk dijalankan setiap harinya.

1.5.2 Metode Wawancara.

Penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tujuannya adalah mencari jawaban atas hipotesis kerja, oleh karena itu pertanyaan disusun secara rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama, Semua aspek

⁸ Nazir, M.1999.*Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia ,Hlm 211

⁹ Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta., Hlm 62

¹⁰Darsono Wisadirana *Op, cit*.

dipandanga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.¹¹Wawancara yang dilakukan oleh peneliti membutuhkan naskah/draft pertanyaan. Alat perekam (*voice recorder*) kamera dan alat tulis.

1.5.3 Penentuan Informan Terpilih

Dalam melakukan penelitian kualitatif peneliti membutuhkan data-data yang bisa penulis dapatkan melalui informan kunci. Informan kunci yang penulis telah tentukan adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan fokus tema penelitian yang peneliti ambil yaitu yang mengalami dampak sosial ekonomi setelah adanya desa wisata di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode *purposive*, yang merupakan sebuah teknik pemiilhan kualitas informan. Hal ini mengandung arti bahwa informan yang menjadi sumber informasi peneliti adalah informan yang handal dalam bidangnya dan memahami secara pasti apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Tabel 3.1 Daftar Informan Kunci Penelitian

| No | Nama | Alasan | Profesi/Jabatan |
|----|-------------|----------------------|---|
| 1 | Eko Mulyadi | Narasumber ahli | Kepala Desa Karangpatihan |
| 2 | Teguh | Narasumber kunci | Ketua Pokdarwis dan Karangtaruna |
| 3 | Marjudi | Narasumber pendukung | Kepala pengembangan produk dan promosi Dinas Pariwisata |
| 6 | Dian Suluh | Narasumber pendukung | Akademisi UMPO |
| 7 | Khaidir | Narasumber pendukung | Kepala KPH Lawu Kab Ponorogo |

¹¹ Lexy J. Moelong *Op, cit.* Hlm.190.

| | | | |
|----|---------------------------|----------------------|---|
| 8 | Jarno | Narasumber pendukung | Masyarakat sekitar Gunung Beruk |
| 9 | -Agung -Lina -Ilham | Narasumber pendukung | Pengunjung (3 orang) |
| 10 | Jaimin | Narasumber pendukung | Ketua LMDH |
| 11 | - Yanti - Tumini | Narasumber pendukung | Pedagang sekitar Gunung Beruk |
| 12 | Tukirah | Narasumber pendukung | Pemilik lahan yang dijadikan tempat parkir wisata |

Sumber : Data Olahan Penulis tahun 2017

Informan-informan ini dipilih karena berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. melalui informan-informan tersebut dapat membantu peneliti menjelaskan dan menggali tentang pengelolaan wisata Gunung Beruk di desa wisata Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

1.5.4 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Penggunaan data dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan data-data tentang berbagai hal yang berhubungan dengan dampak desa wisata yang ada di Desa Karangpatihan. Kegiatan pendokumentasian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberiakan penguatan terhadap materi dalam bentuk tertulis yang dibuat manusia. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen, arsip-arsip, berbagai jurnal dan foto ataupun gambar yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah dokumen yang terkait dengan fokus penelitian yang dicari datanya. Saat ini dokumen yang didapatkan peneliti adalah :

1. Surat Kesepakatan Bersama pengembangan wisata alam hutan pinus Gunung Beruk nomor 08/044.6/PKS/LWU/DRIVE-JATIM/2017
2. MoU LMDH Wonorekso dengan Perhutani KPH Lawu DS tahun 2009
3. Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1769/405.29/2017 Tentang Penetapan Desa Wisata
4. RPJMDes Desa Karangpatihan tahun 2017-2022
5. Buku Profil Desa Karangpatihan 2016

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹² Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Proses ini mengalir mulai tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan penelitian. Tahap proses Analisis data mencakup dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu¹³:

1.6.1 Reduksi Data.

Reduksi data adalah tahapan yang penting dalam proses pemikiran yang sensitif dan memerlukan wawasan yang luas. Peneliti yang lama di lapangan akan mendapatkan banyaknya data yang kompleks dan rumit. Pada tahapan ini diperlukan ketelitian dari peneliti untuk memusatkan perhatian terhadap data yang paling berhubungan dengan masalah penelitian. Dari beberapa data yang peneliti temukan dilapangan tentang pengelolaan wisata Gunung Beruk di desa wisata Karangpatihan kemudian di saring untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan tema yang di ambil oleh peneliti. Peneliti memfokuskan pada segala macam informasi dan data yang berhubungan dengan legitimasi desa wisata, legitimasi

¹²Lexy J.Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm 280.

¹³Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. (2009) *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjeep Rohendi Rohidi. Jakarta, Penerbit Univeristas Indonesia (UI-Press).

pengelolaan Gunung Beruk, aktor yang berperan dalam wisata serta dampak dan hambatan dalam pengelolaan wisata.

1.6.2 Penyajian Data.

Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun berbagai kumpulan informasi dan data yang didapat. Penyusunan ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam menyajikan data dan untuk penarikan kesimpulan. Untuk penelitian kualitatif, penyajian data biasanya berupa kata-kata atau teks naratif

Berbagai data dan informasi yang sudah di saring kemudian disusun agar mudah dalam menganalisis. Peneliti menyajikan data awal seperti profil desa Karangpatihan, gambaran potensi wisata yang ada di Karangpatihan, aktor yang berperan dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk dan dokumen legitimasi hukum penggunaan lahan hutan wisata Gunung Beruk. Data yang disajikan merupakan data yang sudah diseleksi peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.

1.6.3 Pengambilan Keputusan.

Pada tahap penarikan kesimpulan dibutuhkan verifikasi dari data yang telah didapatkan peneliti dari awal penelitian. Verifikasi data dimaksudkan agar kesimpulan yang masih diragukan dan belum sempurna yang telah diambil sebelumnya agar mencapai kesesuaian dengan teori dan penelitian yang ada di lapangan. Adapun sekilas kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan wisata yang dilakukan Karangtaruna sudah cukup baik, banyak aktor yang berperan pengembangan pariwisata di Karangpatihan seperti LMDH, pemerintah Desa karangpatihan, Perhutani KPH Lawu DS, Dinas Pariwisata dan Pemda Ponorogo. Legitimasi hukum pengelolaan wisata sudah ada walaupun bersifat sementara.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Dalam BAB IV ini peneliti paparkan gambaran tempat dari objek penelitian yang penulis angkat yaitu gambaran umum tentang Desa Karangpatihan dan gambaran potensi wisata yang ada di Karangpatihan. Gambaran umum desa Karangpatihan adalah untuk menjelaskan kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi perekonomian masyarakat dan sarana infrastruktur yang di desa Karangpatih. Selain itu peneliti juga menggambarkan potensi-potensi yang dimiliki Desa Karangpatihan khususnya potensi wisata yang menjadi objek penelitian utama peneliti. Pentingnya membahas kedua point diatas adalah karena sebagai acuan untuk pembahasan pada bab selanjutnya yang saling berkaitan.

4.1 Gambaran Umum Desa Karangpatihan

Berikut ini uraian yang menggambarkan kondisi umum Desa Karangpatihan. Data Kondisi umum desa ini bersumber dari Profil Desa Karangpatihan.

4.1.1 Demografi

Jumlah penduduk tahun 2017 Desa Karangpatihan seluruhnya berjumlah 5.794 jiwa yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 2.860 jiwa (49,36 %) dan perempuan berjumlah 2.932 jiwa (50,60 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1**Data Penduduk Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016**

| No. | Nama Dusun | Jumlah Penduduk | | Jenis Kelamin | |
|-----|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Jiwa | KK | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Bendo | 1165 | 304 | 576 | 589 |
| 2 | Bibis | 566 | 234 | 262 | 304 |
| 3 | Krajan | 1283 | 435 | 635 | 648 |
| 4 | Tanggungrejo | 2780 | 897 | 1447 | 1333 |
| | Jumlah | 5.794 | 1.870 | 2.860 | 2.932 |
| | % thd jml pddk total | | | 49,36% | 50,60% |

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2016

Adapun jumlah penduduk terbanyak Karangpatihan terletak di Dukuh Tanggungrejo dengan jumlah 2780 jiwa, kemudian Dukuh Krajan sebanyak 1283 jiwa, Dukuh Bendo sebanyak 1165 jiwa, dan terakhir Dukuh Bibis dengan 566 jiwa.

4.1.2 Mata Pencaharian

Penduduk yang tergolong usia produktif di Desa Karangpatihan yaitu sebesar 2.806 atau sebesar 48,42 % dari jumlah penduduk total desa ini. Dimana dari jumlah penduduk sebesar ini terdistribusi ke dalam beberapa jenis mata pencaharian, yaitu buruh tani, petani, pedagang, wiraswasta, dan pegawai. Buruh tani menunjukkan jumlah yang terbesar 2132 jiwa (36,78 %) diikuti oleh petani sebesar 526 jiwa (9,07 %), pedagang sebesar 52 jiwa, wiraswasta sebesar 122 jiwa, pegawai sebesar 38 jiwa sedangkan sebagian kecil lainnya adalah peternak, dan meubel. Disamping itu beberapa penduduk di desa ini juga mempunyai aktivitas tambahan industri rumah tangga yang memproduksi jajanan pasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

| No. | Nama Dusun | Mata Pencaharian | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Buruh tani | Petani | Pedagang | Wiraswasta | Pegawai |
| 1 | Bendo | 402 | 48 | 4 | 38 | 5 |
| 2 | Bibis | 200 | 70 | 18 | 12 | 3 |
| 3 | Krajan | 532 | 2 | 6 | 35 | 29 |
| 4 | Tanggungrejo | 998 | 406 | 24 | 37 | 1 |
| | Jumlah | 2132 | 526 | 52 | 122 | 38 |
| | % thd jml pddk total | 36,79% | 9,07% | 0,89% | 2,10% | 0,65% |

Sumber : Profil Desa KarangpatihanTahun 2016

Adapun untuk jumlah penduduk menurut kelompok usia penduduk usia produktif, yaitu penduduk dengan usia 25 – 65 tahun menunjukkan prosentase yang terbesar (48,42%) dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk kategori manula (> 65 tahun) sebesar 28,82 % dan yang menunjukkan prosentase yang terkecil adalah penduduk usia balita dan usia sekolah sebesar 22,74 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

| No. | Nama Dusun | Struktur Umur | | |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 0 – 25 | 25 – 65 | >65 |
| 1 | Bendo | 269 | 578 | 304 |
| 2 | Bibis | 190 | 498 | 215 |
| 3 | Krajan | 365 | 634 | 380 |
| 4 | Tanggungrejo | 494 | 1096 | 771 |
| | Jumlah | 1318 | 2806 | 1670 |
| | % thd jml pddk total | 22,74% | 48,42% | 28,82% |

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2016

Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagian kecil penduduk sudah mencapai pendidikan SMA, bahkan diantaranya mampu menempuh pendidikan hingga tingkat sarjana (S1), masing-masing untuk lulusan SMA sebanyak 345 jiwa (5,95 %) lulusan

S1 sebesar 37 orang (0,63 %) dan sebagian sisanya sebesar 140 jiwa (tidak dan belum bersekolah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

| No. | Nama Dusun | Pendidikan | | |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Tidak Sekolah | SMA | S-1 |
| 1 | Bendo | 36 | 54 | 5 |
| 2 | Bibis | 34 | 63 | 7 |
| 3 | Krajan | 30 | 156 | 20 |
| 4 | Tanggungrejo | 50 | 72 | 5 |
| | Jumlah | 140 | 345 | 37 |
| | % thd jml pddk total | 2,41 % | 5,95 % | 0,63% |

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2016

4.1.3 Keadaan Sosial

Budaya masyarakat Desa Karangpatihan adalah gotong royong, pelestarian budaya leluhur seperti hajat bumi dan juga bersih desa. Toleransi antara umat beragama dan budaya bermasyarakat. Hal ini dapat menunjang pengembangan tingkat keswadayaan masyarakat baik dalam bentuk materi, sumbangan pemikiran maupun tenaga sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, untuk tujuan pembangunan desa. Masyarakat yang saling bekerjasama juga akan mendukung dalam pengoptimalan pembangunan desa demi kemajuan bersama.

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Yang dimaksud sumber daya ekonomi adalah aktivitas penduduk yang menghasilkan sumber penghasilan bagi masyarakat Karangpatihan. Di Desa Karangpatihan Sumber daya ekonomi meliputi sektor industri rumah tangga yang meliputi jajanan pasar, kripik tempe, rangginang, dan tempe, agrobisnis meliputi sektor pertanian (padi), perkebunan (mangga,

jeruk, kacang, melon, jagung, singkong), peternakan, perikanan darat dan kehutanan yang meliputi komoditi kayu jati. Sedangkan sektor peternakan meliputi peternakan kambing, sapi, ayam, bebek dan itik. Untuk sektor perikanan darat meliputi ikan lele.

Keadaan sumber ekonomi masyarakat sangat beragam, adapun untuk mempermudah dalam mendata mata pencaharian masyarakat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu dari sektor jasa, agribisnis, perdagangan dan wisata. Seperti yang akan dijelaskan ada pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Data Monografi Sumberdaya Ekonomi
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

| No. | Nama Dusun | Tenaga Kerja yang Terserap (orang) | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|
| | | Industri RT | AgroBisnis | Perdagangan | Jasa | Wisata |
| 1 | Bendo | 13 | 48 | 4 | 402 | |
| 2 | Bibis | 7 | 70 | 18 | 200 | |
| 3 | Krajan | 18 | 2 | 6 | 532 | |
| 4 | Tanggungrejo | 26 | 406 | 24 | 998 | 63 |
| | Jumlah | 64 | 526 | 52 | 2132 | |

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

Dari tabel tersebut diketahui sumber daya ekonomi masyarakat Karangpatihan terbesar adalah dari sektor jasa sebanyak 2132 orang , Agrobisnis atau pertanian sebanyak 526 orang, industri sebanyak 64 orang, pariwisata sebanyak 63 orang dan yang paling kecil perdagangan sebanyak 52 orang.

4.1.5 Keadaan Sumber Daya Alam

Kondisi potensi alam di Desa Karangpatihan cukup bervariasi meliputi Bahan galian (batu) Mata air (mata air, sumur, dan air gunung) hasil bumi (mangga, jagung, padi, jeruk, kayu jati, kacang, melon dll) wisata alam (hutan pinus dan curug) . Terkecuali wisata alam ketiga potensi sumber daya alam lainnya langsung dikelola oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6

**Data Monografi Sumberdaya Alam
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016**

| No. | Nama Dusun | Jenis Sumber Daya Alam | | | |
|-----|--------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| | | Bahan Galian | Mata Air | Hasil Bumi | Wisata Alam |
| 1 | Bendo | | Mata Air | Mangga | Wisata Beji |
| | | | Sumur | Jeruk | |
| | | | | Jagung | |
| | | | | Kacang | |
| | | | | Padi | |
| | | | | Singkong | |
| 2 | Bibis | | Sumur | Mangga | |
| | | | | Jeruk | |
| | | | | Melon | |
| | | | | Padi | |
| | | | | Kacang | |
| | | | | Kakao | |
| | | | | Pisang | |
| | | | | Cabai | |
| | | | | Singkong | |
| 3 | Krajan | | Sumur | Padi | |
| | | | | Mangga | |
| | | | | Kacang | |
| | | | | Jagung | |
| | | | | Singkong | |
| 4 | Tanggungrejo | Batu | Sumur | Jeruk | Hutan Pinus |
| | | | Kali | Mangga | Air terjun |
| | | | Air gunung | Sayuran | |
| | | | | Kacang | |
| | | | | Pisang | |
| | | | | Padi | |
| | | | | Jagung | |
| | | | | Singkong | |

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

Dari tabel data tersebut dapat diketahui potensi sumber daya alam di Karangpatihan sangat beragam. Mulai dari bahan galian berupa batu dan pasir, mata air, hasil bumi berupa padi, singkong, jagung dan hasil pertanian lainnya, serta wisata alam berupa hutan, air terjun dan mbeji. Potensi alam terbanyak berada di Dukuh Tanggungrejo sedangkan untuk hasil pertanian hampir merata diseluruh wilayah.

4.1.6 Keadaan Infrastruktur dan Utilitas

4.1.6.1 Jaringan Jalan

Jaringan jalan punya peran sangat penting dalam konteks pembangunan wilayah desa yaitu untuk menghubungkan berbagai aktivitas yang terpisah secara keruangan dan keberadaannya sangat menentukan tingkat perkembangan wilayah desa terkait dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Jaringan jalan berfungsi untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan desa maupun akses untuk menuju desa lainnya.

Segala infrastruktur yang ada di Karangpatihan adalah untuk menunjang perkembangan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Karangpatihan. Pembangunan infrastruktur vital sangat penting fungsinya, seperti jalan, jaringan drainase dan jaringan air bersih. Pembangunan infrastruktur dilakukan di setiap wilayah dukuh yang adadi Karangpatihan. Adapun keadaan infrastruktur tersebut akan dijelaskan dalam tabel 4.7, tabel 4.8 dan tabel 4.9 .

Tabel 4.7
Data Kondisi Jalan Desa Karangpatihan,
Kecamatan BalongTahun 2016

| No | Lokasi Dusun | Panjang Jalan (m) | Lebar Jalan (m) | Kondisi Jalan | | Tingkat Aksesibilitas |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | Fungsi Jalan | Jenis Perkerasan | |
| 1 | Bendo | 7.500 | 4-6 | Jalan dusun- desa | Tanah-aspal | Sepi-ramai |
| 2 | Bibis | 5.000 | 6 | Jalan dusun- jalan desa | Tanah-aspal | Sepi-ramai |
| 3 | Krajan | 11.000 | 6 | Jalan dusun- jalan desa | Tanah-aspal | Sepi-ramai |
| 4 | Tanggungrejo | 16.000 | 6 | Jalan dusun- desa | Tanah-aspal | Sepi-ramai |
| Total panjang jalan | | 39.500 | | | | |

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

Dari data tabel tersebut jumlah total panjang jalan di Desa Karangpatihan adalah 39.500 meter, dengan jumlah jalan paling banyak adalah di Dukuh Tanggungrejo sepanjang 16.000 meter, kemudian Dukuh Krajan sepanjang 11.000 meter, Dukuh Bendo sepanjang 7.500 meter dan terakhir Dukuh Bibis sepanjang 5.000. Lebar jalan di Karangpatihan adalah 4-6 meter dan berupa tanah –aspal.

4.1.6.2 Jaringan Drainase

Jaringan drainase pada suatu kawasan berfungsi untuk mengalirkan air hujan agar kawasan tersebut tidak tergenang, disamping itu drainase juga untuk mengalirkan aliran air hujan pada permukaan jalan agar jalan tidak cepat rusak. Keberadaan jaringan drainase sangat penting untuk keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat agar terhindar dari bahaya banjir.

Tabel 4.8
Data Kondisi Drainase Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong
Tahun 2016

| No. | Lokasi Dusun | Panjang Drainase (m) | Lebar Drainase (m) | Kualitas Drainase | |
|------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Kelas Drainase | Jenis Konstruksi |
| 1 | Bendo | 7500 | 0,5 – 1 | Sekunder-Tersier | Batu-semen-pasir |
| 2 | Bibis | 5000 | 0,5 – 1 | Sekunder-Tersier | Batu-semen-pasir |
| 3 | Krajan | 11000 | 0,5 – 1 | Sekunder-Tersier | Batu-semen-pasir |
| 4 | Tanggungrejo | 16000 | 0,5 – 1 | Sekunder-Tersier | Batu-semen-pasir |
| Total panjang drainase | | 39500 | | | |

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

Dari data tabel tersebut saluran drainase terpanjang terletak di Dukuh Tanjungrejo dengan total panjang 16.000 meter, kemudian Dukuh Krajan dengan panjang 11.000 meter,

Dukuh Bendo sepanjang 7.500 meter dan terakhir adalah Dukuh Bibis dengan panjang 5.000 meter. Lebar rata-rata drainase 0,5-1 meter dengan konstruksi batu semen pasir.

4.1.6.3 Jaringan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan yang pokok bagi kehidupan manusia sehari-hari untuk minum, mencuci, mandi, dsb. Kebutuhan air bersih dan air minum bagi penduduk di Desa Karangpatihandidapatkan dari sumber air bersih yang ada seperti sumur bor, mata air, sumur tradisional.

Tabel 4.9
Data Kondisi Pengguna Sumber Air Bersih Desa Karangpatihan
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016

| NO | Sumber Air Bersih | Bendo | Bibis | Krajan | Tanggungrej o |
|----|-------------------------|-------|-------|--------|------------------|
| 1 | Sumur bor (org) | 115 | 40 | 100 | 7 |
| 2 | Mata air (org) | 1 | - | - | 2 |
| 3 | Sumur tradisional (org) | 73 | 98 | 87 | 185 |

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

Dari data tabeltersebut jumlah sumber air bersih yang dimiliki masyarakat Karangpatihan adalah sumur bor, mata air, sumur tradisional. Dengan presentase Dukuh Bendo sumur bor sebanyak 155, Mata air 1, dan sumur tradisional 73 orang. Dukuh Bibis sumur bor sebanyak 40, Mata air 0, dan sumur tradisional 93 orang. Dukuh Krajan sumur bor sebanyak 100, Mata air 0, dan sumur tradisional 87 orang. Dukuh Bendo sumur bor sebanyak 7, Mata air 2, dan sumur tradisional 185 orang.

4.1.7 Kondisi Pemerintahan Desa

Berdasarkan letak geografis Desa Karangpatihan berada di wilayah selatan Kabupaten Ponorogo yang secara administratif memilki luas wilayah \pm 1.336,6 hektar, dan ketinggian wilayah sekitar 7 mdpl di daerah rendah dan 153,3 mdpl (meter diatas permukaan laut).

Kondisi cuaca dan klimatologi di Desa Karangpatihan memiliki suhu rata-rata harian 31° C. Berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Secara administrasi, Desa Karangpatihan dibatasi oleh :

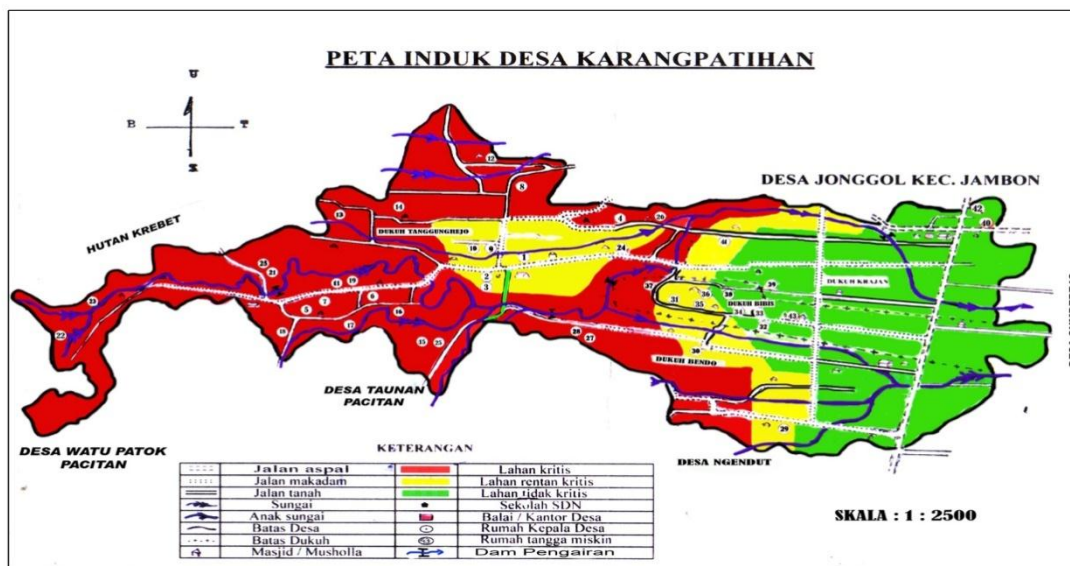
Sebelah Utara : Desa Jonggol Kecamatan Jambon

Sebelah Selatan : Desa Ngendut Kecamatan Balong

Sebelah Barat : Hutan Negara/Kabupaten Pacitan

Sebelah Timur : Desa Sumberejo Kecamatan Balong

Gambar 4.1
Peta Desa Karangpatihan



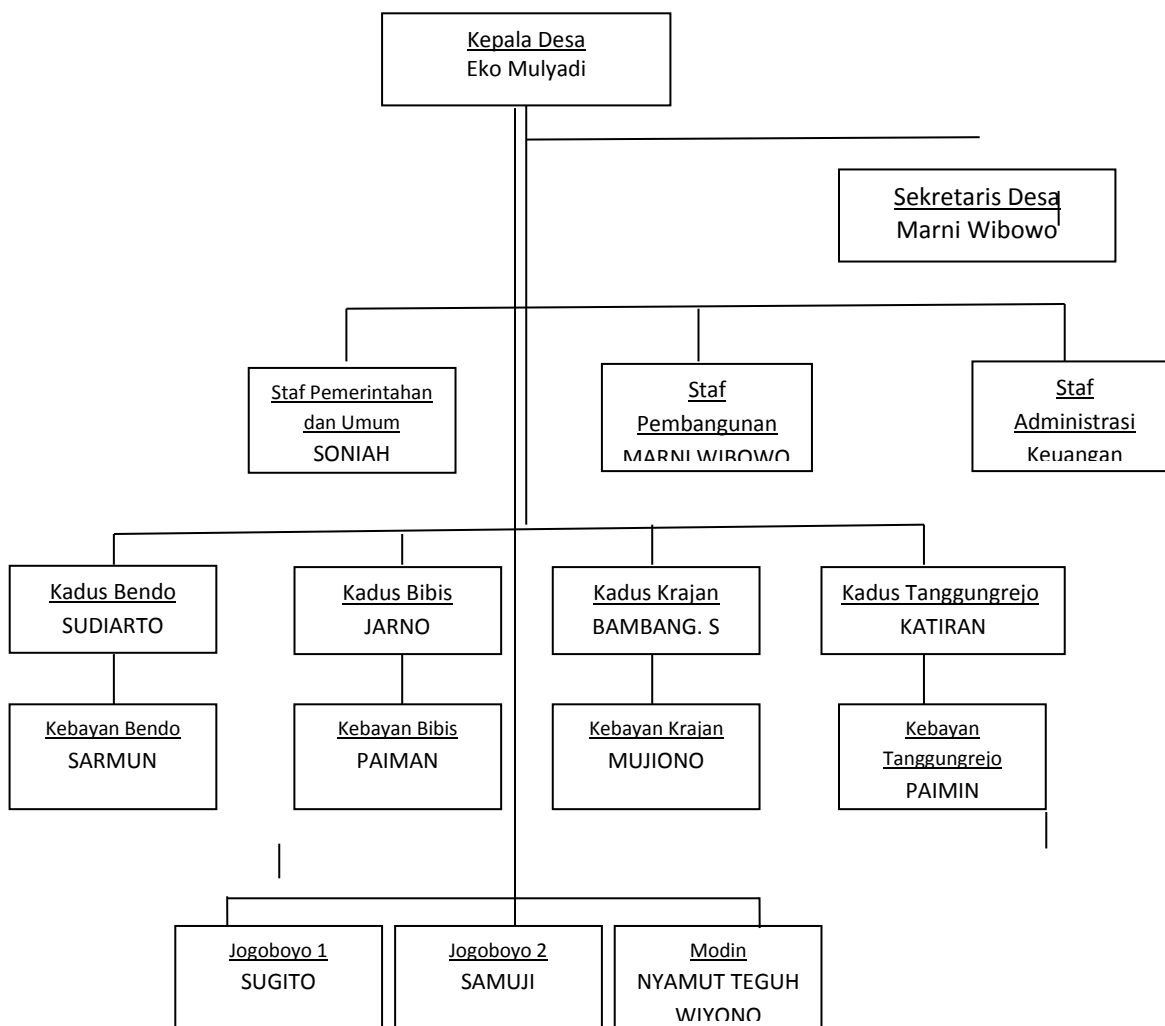
- Dusun Tangungrejo terdiri dari 2 RW dan 12 RT

Desa Karangpatihan memiliki akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekitar 20 Km atau dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan, sementara akses jangkauan ke pusat Kecamatan Balong kurang lebih 5 Km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Sarana layanan transportasi umum yang melalui desa Karangpatihan belum begitu memadai,

jangkauan layanan transportasi umum menuju Desa Karangpatihan dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogodapat dijangkau menggunakan transportasi bis menuju kecamatan Balong dengan jarak tempuh sekitar 15 Km atau dengan waktu tempuh 70 menit, dengan kondisi sarana dan prasarana jalan yang telah memadai dan nyaman untuk segala jenis kendaraan. Kemudian menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju Desa Karangpatihan karena layanan transportasi umum tidak mencapai desa ini.

Bagan 4.10 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karangpatihan

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo



Sumber : Arsip Pemerintah desa Karangpatihan 2017

Dari tabel struktur diatas dapat diketahui bahwa jabatan tertinggi Kepala Desa dimiliki oleh Eko Mulyadi kemudian Sekretaris Desa adalah Marni Wibowo dan terdapat

terdapat beberapa staff dan dibawahnya lagi masih ada jabatan Kadus, Kabayan dan Jogoboyo.

4.1.8 Visi dan Misi Desa Karangpatihan

Visi Desa Karangpatihan tahun 2011–2016 adalah **Dengan Iman dan Taqwa Karangpatihan MANDIRI dalam Pembangunan, Maju, Aman, Nyaman, Damai, Indah, Ramah dan Islami tahun 2016.**

Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan dengan Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Menciptakan hubungan Komunikasi yang baik dengan semua unsur lembaga Desa
3. Menciptakan Jalinan Koordinasi dan Kerjasama yang baik diantara semua unsur lembaga Desa
4. Meningkatkan kualitas pendidikan
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian sebagai basis perekonomian masyarakat
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
7. Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan
8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Desa.

Sumber : Arsip Pemerintah desa Karangpatihan 2017

4.2 Gambaran Umum Wisata Di Desa Karangpatihan

Ponorogo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki beragam Potensi pariwisata, antara lain pariwisata budaya, pariwisata alam, maupun industri kerajinan yang tersebar di berbagai wilayah di Ponorogo. Salah satu potensi pariwisata yang tergolong masih baru adalah wisata alam yang ada di Desa Karangpatihan Ponorogo. Dengan mengusung konsep desa wisata, pemerintah desa Karangpatihan bersama masyarakat dan karangtaruna berusaha memaksimalkan potensi alam yang ada di sekitar wilayah Desa Karangpatihan untuk dimanfaatkan sebagai daerah wisata terutama wisata alam yang dapat menarik minat pengunjung untuk datang berwisata kesana. Potensi yang ada tersebut perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian budaya, pelestarian lingkungan hidup dan sebagai alternatif meningkatkan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan dari pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan Eko Mulyadi kepala desa Karangpatihan yang terletak di Kecamatan Balong Ponorogo ini mempunyai beberapa destinasi wisata yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan. Desa Karangpatihan memiliki kontur wilayah yang berbukit dan dikelilingi gunung dan hutan pinus di sebelah barat. Desa ini menyimpan berbagai potensi wisata yang dimiliki antara lain wisata alam, wisata seni budaya maupun wisata religi. Menurut kepala desa Karangpatihan Eko Mulyadi

Bicara wisata secara keseluruhan, selain punya Gunung Beruk kita juga punya wisata air terjun, wisata edukasi puslitbang, wisata Selo Tundho, wisata situs budaya, dan punya wisata sosial rumah harapan¹

Hal tersebut perlu dikembangkan lebih luas sehingga memiliki dampak ekonomi seperti mensejahterakan masyarakat, khususnya desa Karang Patihan. Keindahan alam desa Karangpatihan beserta objek lainnya merupakan potensi wisata yang membuat desa Karangpatihan menjadi daya tarik yang menarik bagi orang untuk berwisata.

Potensi wisata yang dimiliki Karangpatihan sangatlah beragam mulai dari wisata seni budaya, dimana kerukunan masyarakat yang dimiliki Karangpatihan menjadi modal penting dalam membangun kultur masyarakat yang dinamis khususnya dalam berolah seni. *Yang pertama* adalah seni budaya, Desa Karangpatihan memiliki beberapa kelompok seni yang masih aktif tumbuh dan berkembang sebagai modal wisata yaitu antara lain seni Reyog, seni Gajah-Gajahan dan Seni Ketoprak.² Paguyuban seni yang ada di Karangpatihan merupakan media informasi dan berkumpul masyarakat dalam melestarikan seni dari leluhur mereka. Pertunjukan seni budaya biasanya dilakukan pada saat hari besar penanggalan jawa/islam, peringatan kemerdekaan ataupun hajatan. Saat akan melakukan pertunjukan biasanya akan di informasikan kepada seluruh masyarakat dan luar desa Karangpatihan sehingga mampu mengundang wisatawan untuk datang kesana.

¹ Hasil wawancara Eko Mulyadi Kepala Desa Karangpatihan 29 Agustus 2017 pukul 11.35

² Hasil observasi peneliti tahun 2017

Yang kedua adalah wisata situs sejarah dan budaya Petirtaan Ngoro Den Panji, situs petirtaan Den Ngoro Panji merupakan situs bersejarah pada zaman dahulu, situs ini berupa kolam air atau dalam bahasa lokal disebut dengan Sendang Beji yang di kelilingi oleh banyak arca. Menurut Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan yang telah melakukan penelitian terhadap situs Ngoro Den Panji di perkiraan peninggalan kerajaan Mataram Kuno pada abad 10 Masehi atau pada era Mpu Sendok di Jawa Timur. Berdasarkan ciri-ciri arca yang ditemukan dekat petirtaan diidentifikasi sebagai arca Gupala dan Arca Agesti.³

Ketiga adalah wisata alam, di Karangpatihan ada sekitar tiga tempat wisata alam yang dapat dikunjungi oleh wisatawan yaitu melihat *sunrise* di atas Gunung Bangkong, melihat keindahan air Terjun Dungmimang, melihat petapaan kuno di Goa Selo Jolo Tundho dan yang paling menyedot perhatian wisatawan adalah berwisata di bawah Hutan Pinus Gunung Beruk. Untuk melihat sunrise di Gunung Bangkong wisatawan harus berjalan kaki sekitar satu jam dari desa menuju titik atau spot untuk melihat *sunrise*. Air Terjun Dungmimang atau yang disebut dengan Kedung Mimang terletak di antara dua gunung yaitu Rimbung dan Rajak Wesi. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 15 meter dengan lingkungan udara yang sejuk dan kondisi masih alami. Menurut cerita yang beredar di masyarakat konon air dari sumber Dungmimang ini bisa membuat awet muda.

Wisata alam yang berikutnya adalah Goa Selo Jolo Tundho, dimana goa tersebut memiliki keunikan khususnya batuan goa yang terkesan antik dan berbeda dengan batuan disekitarnya. Goa tersebut juga memiliki lokasi yang menarik diatas perbukitan sehingga sangat bagus dijadikan sebagai tempat foto. Menurut legenda masyarakat Goa Selo Jolo Tundho merupakan bekas pertapaan para resi dari India. Terlepas dari cerita tersebut keberadaan Goa Selo Jolo Tundho menambah keanekaragaman alam yang ada di

³ Hasil wawancara Eko Mulyadi Kepala Desa Karangpatihan 29 Agustus 2017 pukul 11.35

Karangpatihan. Wisata alam yang terakhir adalah wisata Gunung Beruk, sebuah bukit yang banyak ditumbuhi pohon pinus disulap dan dibuat semenarik mungkin oleh masyarakat sekitar Gunung Beruk agar menarik pengunjung untuk datang kesana. Dengan berkiblat pada wisata Kalibiru di Jogjakarta karangtaruna beserta masyarakat mempercantik Gunung Beruk dengan menambah arena bermain, tempat foto berupa rumah pohon dan memperbaiki akses jalan masuk kesana agar lebih mudah dijangkau pengunjung.

Melambungunya nama Gunung Beruk adalah berkat unggahan foto di media sosial dengan latar belakang keindahan alam perbukitan yang ada di Gunung Beruk. Suasana hutan pinus yang asri dan dibangunnya sarana out bond mampu menunjang Gunung Beruk sebagai sarana wisata dan rekreasi. Selain wisata alam dan budaya Karangpatihan juga mempunyai wisata edukasi puslitbang yang bisa dikunjungi. Dahulu Karangpatihan dikenal sebagai desa yang terbelakang, banyak masyarakat yang menderita keterbelakangan mental.

Oleh karena hal tersebut di Karangpatihan banyak dijadikan pusat penelitian dan program pemberdayaan bagi kaum tunagrahita dari berbagai macam lembaga pemerintah dan para akademisi. Beberapa program pemberdayaan dan bantuan dari berbagai insatansi tersebut dapat dijadikan peluang untuk menarik minat masyarakat luar desa bahkan daerah lain untuk belajar program pemberdayaan yang sudah berjalan seperti di desa Karangpatihan.

Potensi wisata edukasi dan puslitbang di Karangpatihan contohnya adalah wisata belajar hidroponik, belajar perkebunan dan beternak/memelihara ikan. Sektor tersebut mampu menunjang keingintahuan pengunjung tentang kehidupan masyarakat di desa Kangpatihan sehingga diharapkan mampu membentuk jiwa yang mandiri. Wisata bertemakan kegiatan pemberdayaan sosial juga menjadi dayak tarik yang menarik lewat program rumah harapan yang dikembangkan oleh pemerintah desa Karngpatihan dan masyarakat kita bisa belajar banyak tentang kegiatan sosial di Karangpatihan, dimana di sana banyak terdapat

pemberdayaan masyarakat yang terbelakang mental. Contohnya adalah pembuatan batik ciprat, pembuatan souvenir keset perca, dan pemberdayaan kolam lele dan bantuan hewan ternak bagi para penderita keterbelakangan mental.

Di Karangpatihan juga terdapat beberapa kebun jeruk, dimana nantinya kebun tersebut mungkin bisa dimaksimalkan sebagai wisata agrowisata sehingga mampu menambah minat pengunjung agar tidak jenuh. Letak kebun jeruk yang dekat dengan lokasi wisata sangat memungkinkan untuk dikembangkan nantinya sebagai penunjang kunjungan wisatawan ke sana. Dalam menunjang berbagai potensi wisata tersebut tidak lengkap kalau tidak ditunjang dengan wisata kuliner, di Karangpatihan kuliner yang terkenal adalah nasi tiwul. Dengan berbagai variasi masakan seperti tiwul goreng dan tiwul sambel teri semakin menambah suasana alami masakan pedesaan dirasakan oleh para wisatawan. Karena kontur yang berbukit potensi produksi pertanian yang paling banyak adalah ketela. Ketela inilah yang dijadikan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan nasi tiwul. Ada sekitar lima belas warung yang ada di sekitar Gunung Beruk, setiap warung menjajakan dan menyajikan tiwul dengan cara masak dan ciri khas rasa yang beragam. Warung tersebut dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung selama berwisata.

BAB V

PEMBAHASAN

Sesuai dengan judul yang ada dalam penelitian maka pada Bab V ini peneliti menjelaskan tata kelola wisata Gunung Beruk yang ada di desa wisata Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Sesuai dengan fokus pisau analisis teori struktural yang peneliti gunakan maka pembahasan ini berfokus pada beberapa indikator, indikator tersebut adalah agen atau aktor pelaku yang terlibat dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk, signifikasi institusi dalam tata kelola wisata Gunung Beruk, dominasi kekuasaan yang ada dalam pengelolaan Gunung Beruk dan yang terakhir adalah legitimasi hukum yang menaungi pengelolaan wisata Gunung Beruk.

Selain itu peneliti juga menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan wisata di Gunung Beruk. Dari ke empat indikator tersebut penulis korelasikan dengan hasil temuan penulis ketika turun ke lapangan, berikut hasil yang dapat peneliti jelaskan :

5.1 Agen Dalam Pengelolaan Wisata Gunung Beruk

Dalam tata kelola wisata di Karangpatihan khususnya wisata Gunung Beruk secara struktural dilakukan oleh beberapa agen. Agen yang paling utama tersebut dimulai dari level bawah ke level atas adalah Karangtaruna Wirataruna dukuh Tanggungrejo, lalu di atasnya adalah LMDH dan terakhir adalah Perhutani yang diwakili oleh Perhutani KPH Lawu DS sebagai penanggungjawab kawasan

hutan yang dipakai sebagai tempat wisata di Karangpatihan. Seperti yang dikatakan oleh Eko Mulyadi selaku kepala desa Karangpatihan. Untuk permasalahan pengelolaan Gunung beruk dari bawah keatas adalah Karangtaruna, LMDH dan yang ketiga adalah perhutani.¹

Selain Karangtaruna, LMDH dan Perhutani ada beberapa instansi dan lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan dan pembentukan wisata di Karangpatihan. Diantaranya adalah Pemerintah desa Karangpatihan, Dinas Pariwisata Ponorogo, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya maka akan dijelaskan peran dan keterlibatan dari setiap agen dalam ulasan tabel 5.1 sebagai berikut

Tabel 5.1

Peran aktor dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk Karangpatihan

| No | Aktor | Peran | Landasan tindakan aktor/legitimasi |
|-----------|----------------------------|---|--|
| 1 | Karangtaruna Wirataruna | -Sebagai inisiator pembentukan Gunung Beruk sebagai daerah wisata -mengelola wisata Gunung Beruk | Kesepakatan bersama pengembangan wisata alam hutan pinus Gunung Beruk nomor 08/044.6/PKS/LWU/DRIVE-JATIM/2017 |
| 2 | LMDH Wonorekso | -Sebagai penghubung kerjasama Karangtaruna dan Perhutani dalam pemanfaatan Gunung Beruk sebagai tempat wisata | -MOU LMDH Wonorekso dengan Perhutani KPH Lawu DS tahun 2009 - Kesepakatan bersama pengembangan wisata alam hutan pinus Gunung Beruk nomor 08/044.6/PKS/LWU/DRIVE-JATIM/2017 |

¹Hasil wawancara Eko Mulyadi Kepala Desa Karangpatihan 29 Agustus 2017 pukul 11.35

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| | | -fasilitator dan pemrakarsa kegiatan penghijauan hutan sekitar Gunung Beruk | |
| 3 | Perhutani KPH Lawu DS | -Sebagai pengelola kawasan hutan lindung kawasan Gunung Beruk -memberikan penyuluhan dan pengawasan pengelolaan hutan lindung kepada masyarakat | Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara |
| 4 | Pemerintah Desa Karangpatihan | -Aktor pendukung terbentuknya desa wisata Karangpatihan -memberikan penyuluhan, kegiatan promosi terkait wisata Karangpatihan | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah desa berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri yaitu segala kegiatan masyarakat desa. -Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1769/405.29/2017 Tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Ponorogo |
| 5 | Dinas Pariwisata Kab Ponorogo | -pembina penyuluhan wisata -fasilitator pembentukan pokdarwis | -menekankan sebagai SKPD di bawah Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pariwisata - Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11PM.17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014 |
| 6 | Pemerintah Daerah Ponorogo | -pemilik kekuasaan pembuat kebijakan legitimasi tentang penetapan desa wisata | -Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo -Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11PM.17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014 -Peraturan Menteri Kebudayaan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | dan Pariwisata Nomor : 18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata |
|--|--|--|---|

Data olahan penulis 2017

5.1.1 Peran Karangtaruna Wirataruna dalam Pengelolaan wisata Gunung Beruk

Wisata Gunung Beruk dikelola oleh Karangtaruna yang ada Di Dukuh Tanggungrejo dengan nama Karangtaruna Wirataruna. Dalam hal ini pengelolaan wisata di Karangpatihan sepenuhnya diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar daerah potensi wisata. Keadaan geografis Gunung Beruk yang berada di wilayah dukuh Tanggungrejo, secara tidak langsung membuat pemanfatannya dilakukan oleh masyarakat sekitar dukuh tersebut.

Tidak ada aturan tertulis mengenai siapa yang berhak mengelola kawasan wisata di Karangpatihan, tetapi pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat masyarakat. Dari penjelasan Eko Mulyadi juga dikatakan bahwa penyetujuan karangtaruna sebagai pengelola wisata adalah bahwa karangtaruna Wirataruna dan LMDH yang mempunyai inisiatif membuka dan menjadikan Gunung Beruk sebagai tempat wisata maka desa memberikan dukungan penuh pengelolaan wisata Gunung Beruk dilakukan oleh karangtaruna Wirataruna bersama LMDH.

Karangtaruna itu kan terbentuk dari masyarakat itu sendiri, melalui musyawarah mufakat. Jadi tidak bisa ditunjuk. Kita tidak memutuskan itu dari masyarakat

sendiri karena tempatnya disitu, yang berinisiatif membuat wisata adalah karangtaruna bersama LMDH maka desa menyetujui aja.²

Karangtaruna sebagai inisiator pembentukan wisata baru dengan memanfaatkan hutan pinus di sekitar Gunung Beruk telah dilakukan sejak 2015. Pembentukan dan penataan arena wisata, jalan akses masuk dan promosi wisata dilakukan secara bersama-sama melalui gotongroyong bersama seluruh anggota karangtaruna dan masyarakat. Selain Gunung Beruk, Dukuh Tanggungreko juga memiliki potensi wisata lain yaitu air terjun Dungmimang dan Goa Selo Jolo Tundho namun kalah terkenal dibandingkan dengan Gunung Beruk.

Untuk saat ini yang masih berjalan ya di Gunung Beruk yang lainnya itu masih belum tertata, sebenarnya banyak poten wisata di Karangpatihan. Cuman kan yang lainnya belum berjalan.³

Pengelolaan wisata Gunung Beruk oleh karangtaruna Tanggungrejo bekerjasama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) diperkuat melalui MoU (Kesepakatan Bersama) yang dilakukan dengan Perhutani KPH Lawu DS. Sambil menunggu PKS (Perjanjian Kerjasama) pembagian hasil yang lebih terperinci maka untuk sekarang sampai satu tahun kedepan payung hukumnya adalah MoU yang di sepakati pada tahun 2017 ini. Lewat perjanjian tersebut sudah dinyatakan bahwa karangtaruna dengan LMDH berhak mengelola kawasan hutan pinus milik Perhutani untuk dijadikan sebagai tempat wisata, walaupun ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, untuk berkas MoU (dapat dilihat pada lampiran dibelakang)

²Hasil wawancara Eko Mulyadi Kepala Desa Karangpatihan 29 Agustus 2017 pukul 11.35

³Hasil wawancara Teguh Cahyono Ketua Karangtaruna Wirataruna 7 September 2017 pukul 9.36

Keterlibatan LMDH dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk sangat besar bagi Karangtaruna. Jika dilihat dalam pandangan legitimasi hukum, LMDH adalah lembaga yang sudah memiliki payung hukum tetap untuk mengelola kawasan hutan di Karangpatihan khususnya hutan Gunung Beruk. Sehingga melalui LMDH Karangtaruna dapat mengadakan negosiasi kerjasama dengan Perhutani walaupun dalam praktik pengelolaannya nantinya tetap sepenuhnya dikelola oleh Karangtaruna Wirataruna.

Dengan menggunakan azas kebersamaan karangtaruna bergerak mengelola Gunung Beruk, semua dikerjakan bersama-sama atas dasar kesadaran dari setiap anggotanya. Tidak ada aturan khusus secara tertulis dalam pelaksanaan pengelolaan Gunung Beruk namun ada aturan yang menikat secara sosial dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi sosial. Setiap aturan, pembagian kerja ataupun keputusan lainnya terkait sistem pengelolaan Gunung Beruk diambil secara musyawarah lewat forum yang ada di karangtaruna.

Kita punya forum, di dalam forumnya karangtaruna, jadi kita rapatkan sistem pengelolaannya, sistem pembagian kerjanya, sistem dalam melaksanakan programnya. Aturan secara khusus gak ada, karena programnya kegiatan itu adalah pemberdayaan masyarakat, jadi sistemnya kita itu dikerjakan secara bersama dan nanti hasilnya bentuk apapun disampaikan di forum karangtaruna setiap satu bulan sekali.⁴

Dalam menjalankan pengelolaan Gunung Beruk karangtaruna membuat sistem pembagian kerja kepada para anggotanya, pembagian kerja tersebut berupa pembentukan penanggungjawab kebersihan dan penanggungjawab keamanan. Disini penanggungjawab keamanan merangkap sebagai penarik uang masuk ke wisata Gunung Beruk, dikarenakan belum adanya rincian khusus perjanjian terkait

⁴*Ibid*, wawancara Teguh Cahyono

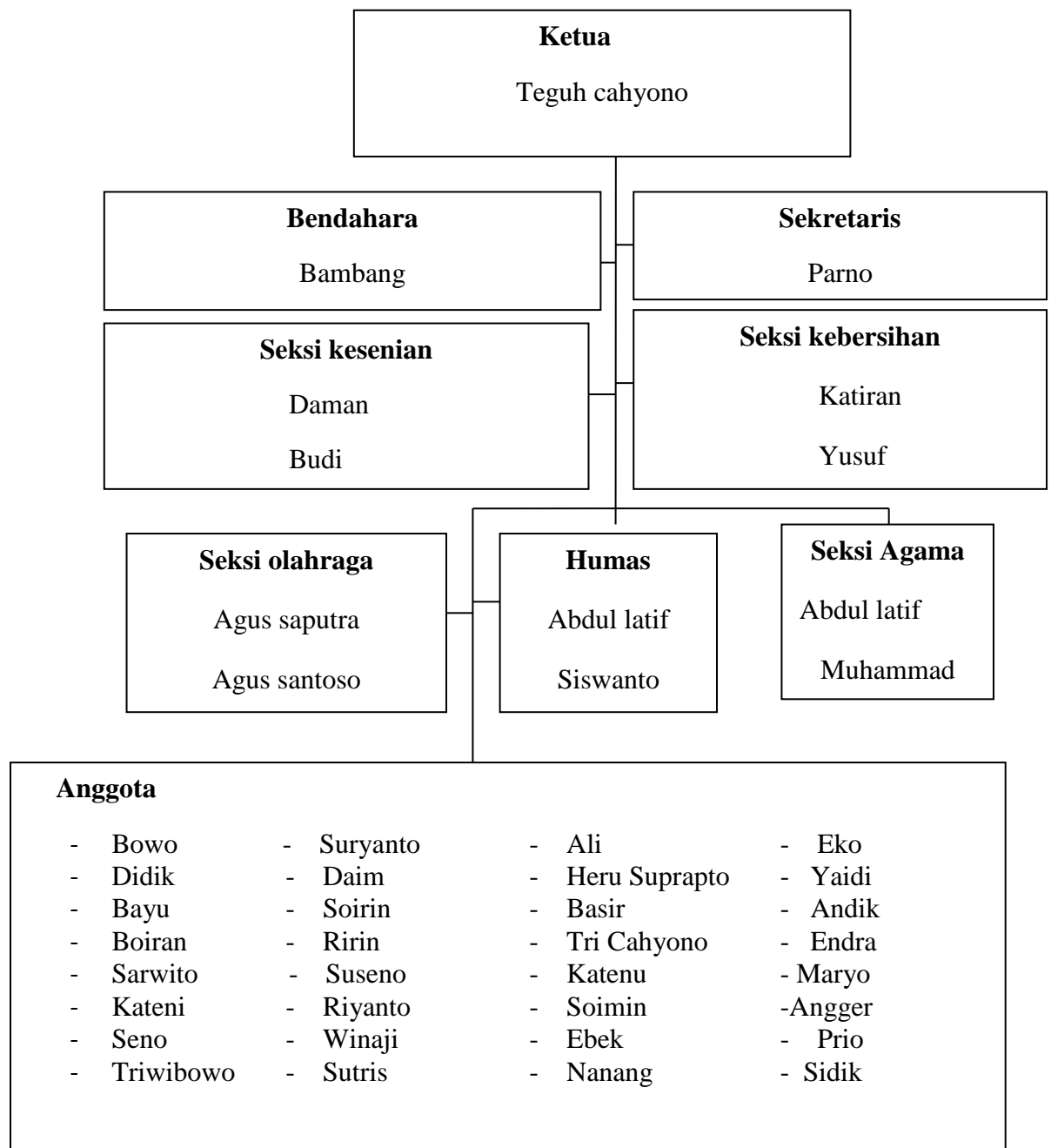
besaran harga tiket masuk ke wisata Gunung Beruk dengan Perhutani dan Dispenda Ponorogo maka untuk saat ini penarikan uang masuk melalui uang biaya jasa parkir kendaraan yang dikelola karangtaruna.

Untuk sementara payung hukum sudah ditangan, hitam putihnya sudah ada. Cuma kan kita terbentur beberapa hal kita terbentur beberapa hal contohnya perijinan dispenda, dinas pendapatan kabupaten. Kemarin kita minta untuk tiketnya terkait perpajakan dari dinas pariwisata untuk sementara Perbupnya belum ada. Jadi untuk saat ini kita belum mendapat korporasi dari dinas pendapatan. Tapi untuk MoU nya udah ada dari Perhutani dan Karangtaruna serta LMDH.⁵

Karangtaruna Wirataruna berdiri pada tahun 2008 beranggotakan pemuda pemudi dari RT1 RW2 dari Dukuh Tanggungrejo. Anggota karangtaruna adalah pemuda pemudi yang masih lajang dan sedang berdomisili atau sedang berada dirumah. Karangtaruna Wirataruna sebagai mesin penggerak dalam kegiatan sosial di masyarakat dan penggerak pengelolaan wisata di Karangpatihan memiliki struktur organisasi yang jelas, berikut struktur organisasi Karangtaruna Wirataruna periode 2017 :

⁵*Ibid*, wawancara Teguh Cahyono

Bagan 5.1 Struktur Organisasi Karangtaruna Wirataruna



Sumber: Data Pengurus Karangtaruna Wirataruna 2017

Berdasarkan struktur organisasi tersebut Teguh sebagai ketua karangtaruna Wirataruna bertanggungjawab sebagai ketua dalam mengatur dan memimpin

setiap kegiatan yang dilakukan oleh karangtaruna wirataruna. Selain berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, karangtaruna juga berkewajiban menjaga dan mengelola kawasan wisata Gunung Beruk yang menjadi maskot wisata andalan dari desa Karangpatihan. Dalam pelaksanaan pengelolaan wisata Gunung Beruk juga dilakukan evaluasi-evaluasi terkait kekurangan dan pengembangan apa saja yang diperlukan dan diharapkan oleh para pengunjung. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan target program yang telah dibuat dapat tercapai sesuai keinginan.

Evaluasi itu sangat penting, karena setiap pengembangan wisata itu perlu progress, dan nanti itu setiap pengunjung kita tanya, kita minta pendapat pengunjung, yang jelas kita selalu mengadakan evaluasi terkait kinerja kita dan apa saja yang perlu kita kembangkan.⁶

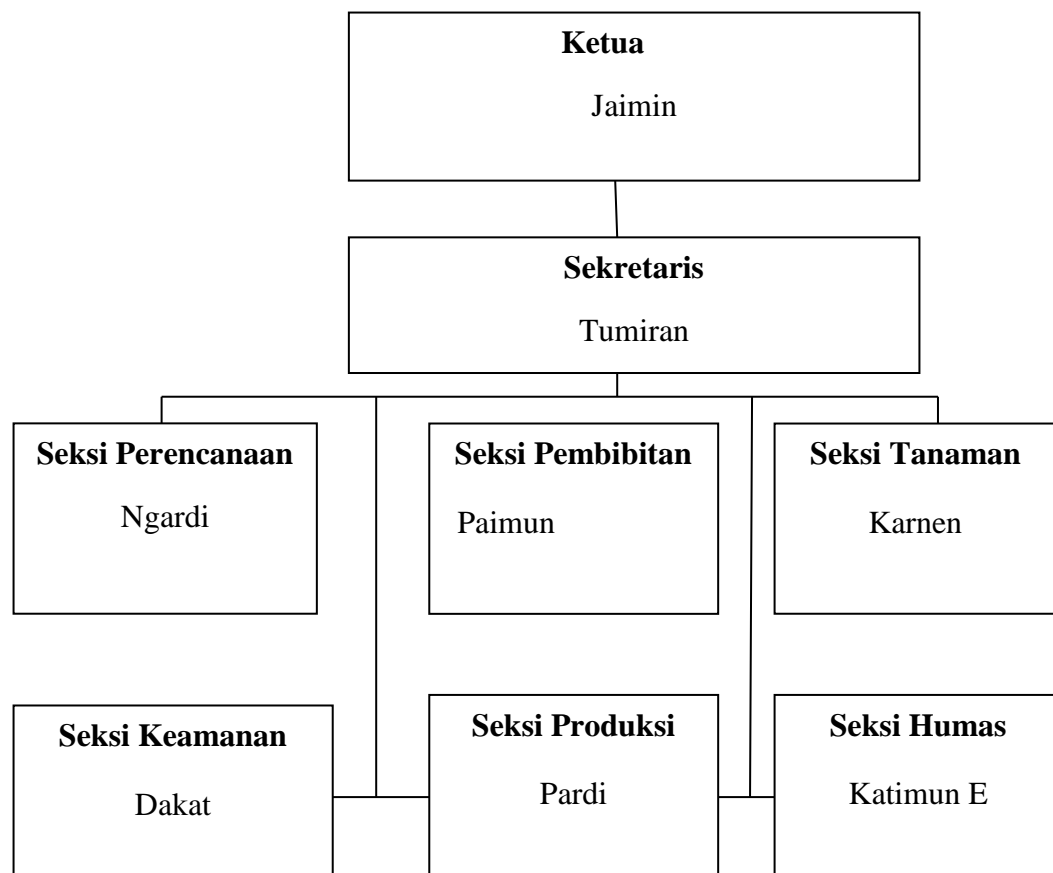
Keberadaan Karangtaruna Wirataruna sebagai pengelola wisata Gunung Beruk memang sangat membantu, dengan adanya karangtaruna maka permasalahan terkait wisata yang ada di karangpatihan dapat dipecahkan melalui ide kreatif dan inovasi yang dilakukan para pemuda disana. Dengan adanya wisata maka mampu membuka peluang usaha dan tenaga kerja untuk para pemuda di dusun Tanggungrejo sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemuda setempat dapat membuka jasa penitipan parkir, masyarakat dapat berjualan makanan minuman disekitar tempat wisata.

⁶ Hasil wawancara Teguh Cahyono Ketua Karangtaruna Wirataruna 7 September 2017 pukul 9.36

5.1.2 Peran LMDH Wonorekso Dalam Pengelolaan Wisata Gunung Beruk

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Karangpatihan berdiri pada tahun 2008 dengan nama LMDH Wonorekso. LMDH lahir untuk menjembatani antara masyarakat dengan pihak Perhutani KPH Lawu DS dalam proses pemanfaatan hutan lindung disekitar Karangpatihan. Dalam melaksanakan program dan tugasnya LMDH Wonorekso memiliki struktur kepengurusan yang telah ditetapkan dalam berita acara perubahan pengurus LMDH Wonorekso Desa Karangpatihan Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo tahun 2008.

Bagan 5.2 Struktur Pengurus LMDH Wonorekso



Sumber : Berita Acara Perubahan Pengurus LMDH Wonorekso tahun 2008

Adapun dari struktur pengurusan pada bagan 5.2 diatas dapat diketahui bahwa dalam kepengurusan LMDH Wonorokso diketuai oleh oleh Jaimin dengan dibantu beberapa seksi seperti seksi perencanaan adalah Ngardi, seksi pembibitan adalah Paimun, seksi tanaman adalah Karnen, seksi keamanan adalah Dakat, seksi produksi adalah Pardi dan seksi humas adalah Katimun. Dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk tidak terlepas dari peran LMDH Wonorekso. Sebelum adanya kerjasama terkait penggunaan kawasan hutan Gunung Beruk sebagai tempat wisata, LMDH terlebih dahulu telah melakukan kerjasama dengan Perhutani Lawu DS terkait pemanfaatan hutan di sekitar desa Karangpatihan.

Kerjasama perhutani dan LMDH ini dilakukan sejak tahun 2009 dengan maksud menjadi dasar dari pengelolaan kawasan hutan dan pembagian hasil hutan kepada masyarakat sekitar hutan di Karangpatihan. Struktur kepengurusan LMDH secara jelas telah dibentuk sejak 2009 dimana diketuai oleh Jaimin. Berdasarkan MoU antara Perhutani KPH lawu DS dengan LMDH Wonorekso tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dijelaskan total petak pangkuan hutan yang dikelola bersama adalah seluas 397,8 Ha. Terdiri dari 3 petak yaitu petak 42 kelas HL seluas 179.40 Ha, petak 43A kelas TKL seluas 86.6 Ha dan petak 43B kelas HL seluas 132.30 Ha . Dalam pasal 9 perjanjian berbunyi bahwa hak LMDH dalam pemanfaatan hutan adalah :

1. Terkait dengan karakteristik dan fungsi utama dari hutan lindung, dengan tanpa mengesampingkan dampak ekologis dan berkelanjutan fungsi hutan lindung, PHBM di kawasan hutan lindung diperkenankan dengan syarat persyaratan dan perlakuan khusus, antara lain :
 - a. Tidak boleh dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak tegakan hutan, dan merubah fungsi hutan sebagai hutan lindung.

- b. Tidak boleh melakukan pengeolahan tanah secara intensif dan penanaman tanaman pertanian semusim yang memerlukan pengolahan tanah secara intensif
 - c. Yang diperkenankan hanyalah pemanfaatan terbatas terhadap lahan di bawah tegakan dengan melakukan penanaman tanaman keras, tanaman perkebunan, tanaman buah-buahan, tanaman penghasil Hijauan Makanan Ternak (HMT) sepanjang tidak mengganggu tegakkan hutannya.
 - d. Sistem penanaman pada point C di atas diutamakan dilakukan dengan sistem tidak mengganggu tegakkan hutannya.
2. PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk mengoptimalkan pengelolaan, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam (keindahan alam, sumber air) di kawasan hutan lindung untuk tujuan pariwisata atau tujuan lain sepanjang tidak merubah fungsi hutan lindungnya sesuai dengan aturan dan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA⁷

Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa hutan yang menjadi *wengkon* Perhutani KPH Lawu DS yang berada di wilayah desa Karangpatihan diperbolehkan untuk dipotimalkan pemanfaatannya sebagai tujuan wisata sepanjang tidak merubah fungsi dan aturan sesuai kesepakatan dengan Perhutani KPH Lawu DS. Dengan adanya MoU ini maka LMDH dan masyarakat sekitar Gunung Beruk menjadikannya sebagai landasan legitimasi pembukaan kawasan hutan Gunung Beruk untuk dijadikan tujuan wisata. Dengan di komersilkannya hutan Gunung Beruk sebagai tujuan wisata maka wilayah hutan yang dulu sepi menjadi ramai oleh para wisatawan.

Pada tahun 2017 terjadi konflik antara pengelola dengan Perhutani. Dimana pengelola dianggap menyalahi aturan dengan menarik retribusi karcis. Sehingga dilakukan kesepakatan kerjasama yang kedua, tetapi fokusnya lebih pada pengembangan wisata. LMDH sebagai lembaga yang sudah bekerjasama

⁷Kesepakatan antara Perhutani KPH lawu DS dengan LMDH Wonorekso tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tahun 2009

dengan Perhutani mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut dengan melakukan kesepakatan bersama pengembangan wisata alam hutan pinus Gunung Beruk pada tanggal 12 April 2017. Menurut penjelasan Khaidir sebagai Asper Perhutani wilayah Barat KPH Lawu Ds menjelaskan bahwa, dalam kerjasama harus dengan lembaga yang memiliki payung hukum tetap.

Jadi gini mas, gini ceritanya . yang berhak mengadakan, bisa kerjasama dengan Perhutani adalah LMDH, nah kebetulan disana ada LMDH. Makanya MoUn nya dengan LMDH, hanya nanti si Karangtarunya ini nge sub di LMDH ini. kan yang boleh bekerjasama itu kan harus berbadan hukum sementara yang sudah berbadan hukum, yang sudah bekerjasama itu LMDH.⁸

LMDH tidak berperan langsung sebagai pengelola wisata Gunung Beruk, namun secara proses legitimasi hukum peran LMDH sangat besar. Dimana LMDH berperan memfasilitasi kerjasama karangtaruna dengan perhutani, LMDH sebagai lembaga yang telah melakukan kerjasama oleh Perhutani maka LMDH memberikan masukan dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi antara Perhutani dan karangtaruna sebagai pengelola wisata Gunung Beruk. LMDH hanya memfasilitasi kerjasama dengan perhutani tentang izin lahan hutan yang dijadikan wisata oleh masyarakat Karangpatihan, disini LMDH hanya ikut kepengurusan tetapi pada pengelolaan diberikan sepenuhnya kepada karangtaruna.⁹

Peran LMDH dulu saya pernah mengajukan pengembangan wisata, bahkan ke dinas pariwisata dan dinas terkait, atas nama LMDH sepenuhnya kita serahkan ke dinas pariwisata kalo LMDH sebenarnya hanya memfasilitasi hutan yang di kelola oleh karangtaruna maka dengan sedemikian LMDH hanya ikut serta dalam kepengurusan kalo pengelolaan sepenuhnya diserahkan oleh karangtaruna. Yang

⁸ Hasil wawancara Khaidir Asper Perhutani KPH Lawu DS Kecamatan Balong pukul 13.47

⁹ *Ibid*, wawancara Jaimin

atas namanya yang tertulis diatas bukan karangtaruna melainkan atas nama LMDH dikelola bersama karangtaruna

Peran penting LMDH dalam pengelolaan hutan Gunung Beruk adalah ikut melakukan penghijaun di sekitar kawasan hutan sekitar Gunung Beruk. Karena yang paling penting dari dibentuknya Gunung Beruk sebagai tempat wisata adalah untuk penyelamatan lingkungan hutan. Dimana dulu banyak terjadi pembakaran hutan dan pencurian kayu disekitar hutan. Menurut pak Jaimin setelah dibukanya kawasan Gunung Beruk sebagai tempatng wisata masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan karena mersakan dampak dari adanya wisata yang sangat bermanfaat bagi mereka.

5.1.3 Peran Perhutani KPH Lawu DS Terkait Pemanfaatan Hutan Gunung Beruk Sebagai Tujuan Wisata

Salah satu aktor yang paling penting dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk adalah pihak Perhutani KPH Lawu Ds. Telah diketahui bahwa lahan hutan wisata Gunung Beruk merupakan wewenang pengelolaan dari Perhutani KPH Lawu DS, sehingga segala macam bentuk pemanfaatan hutan yang berada di lingkup wewenang Perhutani KPH Lawu DS harus mendapatkan izin dari pihak Perhutani KPH Lawu DS. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang perusahaan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Perhutani diberi tugas oleh Pemerintah Untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan dalam wilayah kerjanya.¹⁰

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang perusahaan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Perhutani

Perhutani KPH Lawu DS yang berada di Kecamatan Balong dipimpin oleh seorang Asper yang bernama Khaidir. Asper bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan pengelolaan hutan milik Perhutani yang berada di wilayah kawasan Ponorogo Barat. Sedangkan untuk pengawas dan pembinaan dilapangan Perhutani memiliki Mantri hutan yang bertugas di setiap wilayah. Untuk wilayah hutan Karangpatihan termasuk kawasan Gunung Beruk yang memegang wewenang adalah Mantri hutan bernama Darmanto. Sebagai Perum yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola hutan maka menjadi tanggung jawab Perhutani apabila ada kegiatan pemanfaatan hutan untuk di komersilkan menjadi akomodasi wisata.

Perhutani KPH Lawu DS sebagai *stakeholder* pembuat kebijakan telah mengizinkan dibukanya wisata di wilayah hutan Gunung Beruk, pemanfaatan hutan telah mendapatkan izin ditandai dengan adanya MoU pertama dengan LMDH pada tahun 2009. Kesepakatan yang terbaru adalah Kesepakatan Bersama antara LMDH dengan Perhutani KPH Lawu DS pada tahun 2017.

Peran lain yang dilakukan Perhutani KPH Lawu Ds selain memberikan izin pengelolaan hutan Gunung Beruk untuk dikomersilkan sebagai objek wisata adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dan pengelola wisata disana. Seperti yang dikemukakan oleh Khaidir sebagai Asper Perhutani KPH Lawu DS kecamatan Balong :

Sebagai pemangku kawasan, kami juga wajib sebagai pengawas. Hukumnya wajib sebagai pengawas. Inrtinya , bilamana apabila disitu diketemukan ada hal-hal yang menyimpang kita wajib mengingatkan. Disamping juga untuk penertiban kawasan, terutama maksudnya, jadi selain pengawasa kita juga punya

bimbingan teknis. Seperti contohnya ,arahan dari pak kepala kan untuk lokasi wisata kan harus bebas warung itukan ada warung tapi kan diluar kawasan.¹¹

Pengawasan dan pembinaan oleh Perhutani KPH Lawu DS ditujukan untuk melindungi hutan lindung yang digunakan sebagai wisata dari penyalahgunaan wewenang yang diberikan pada pengelola wisata Gunung Beruk. Yang paling utama adalah dengan turunnya izin pengelolaan wisata Gunung Beruk maka pihak Perhutani telah percaya sepenuhnya kepada masyarakat Karangpatihan bahwa mereka akan menjaga kelestarian alam dan menjaga kelestarian hutan sekitar Gunung Beruk. Namun Perhutani juga tidak lupa tetap melakukan kontrol dan memberikan masukan tentang pengelolaan wisata Gunung Beruk yang lebih baik.

5.1.4 Peran Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pengembangan wisata di Karangpatihan

Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mensyaratkan terpenuhinya hak konstitusional desa beserta kesatuan masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini dijadikan landasan hukum pengoptimalan potensi asli desa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹² Pemerintah desa Karangpatihan terus berupaya mengembangkan potensi asli desa yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan baik itu dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya kepada masyarakat serta mengubah image negatif

¹¹ Hasil wawancara Khaidir Asper Perhutani KPH Lawu DS Kecamatan Balong pukul 13.47

¹² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasa; 1 Ayat 1

Karangpatihan selama ini yang terkenal dengan sebutan kampung idiot karena banyak ditemukan penderita tunagrahita.

Salah satu pengembangan potensi desa adalah melalui pariwisata, dimana banyak potensi alam yang bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata tersebar di beberapa wilayah desa Karangpatihan. Dengan berkembangnya trens desa wisata maka memacu pemerintah desa untuk membuat inovasi membentuk desa Karangpatihan sebagai salah satu destinasi desa wisata baru di Ponorogo. Peran pemerintah desa dalam pembentukan desa wisata Karangpatihan dimulai dengan dibentuknya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) pada tingkat desa. Pembentukan Pokdarwis ini bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Ponorogo sebagai pembina utama dalam melakukan penyuluhan wisata.

Dalam pembentukan pokdarwis, mereka melakukan rapat internal sendiri tentang anggota Pokdarwis. Setelah terbentuk, mereka menyerahkan form pendaftaran pembentukan pokdarwis. Lalu kita yang mengesahkan. Jadi kita disini hanya sebatas memberikan pembinaan dan penyuluhan.¹³

Tugas dan fungsi Pokdarwis adalah melakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata. Pokdarwis Karangpatihan kemudian disahkan oleh Dinas Pariwisata dengan nomor 188.4/06.405.13/2016 dengan nama Pokdarwis Karangpatihan Bangkit Desa Karangpatihan. Kesadaran tentang pariwisata penting karena menjadi piasu analisis menemukan ide-ide baru untuk merubah beragam potensi yang dimiliki desa Karangpatihan, menjadi layak untuk dijual sebagai tujuan wisata.

¹³Hasil wawancara Marjudi Staf Bidang Pengembangan Prodak dan Promosi Dinas Pariwisata Poorogo 14 September 2017 13.02

Sebagai penguat landasan legitimasi, Desa Karangpatihan telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati nomor : 188.45/1769/405.29/2017 tentang penetapan desa wisata. Dengan telah diterbitkannya SK ini maka sudah disahkan bahwa Karangpatihan berstatus sebagai desa wisata. Pengakuan status desa wisata yang diberikan kepada Karangpatihan sesuai dengan harapan pemerintah desa dan masyarakat, agar dalam pembuatan kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan wisata Desa karangpatihan telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Terkait peran pengelolaan wisata khususnya Gunung Beruk, pemerintah desa tidak ikut dalam pngelolaan secara langsung. Pengelolaan secara penuh diberikan kepada karangtaruna dan masyarakat sekitar wisata. Peran pemerintah desa diluar konsep pengelolaan, pemerintah desa lebih berperan dalam meningkatkan kemajuan pariwisata Gunung Beruk. Dalam RPJMDes tahun 2017-2022 juga telah diprogramkan adanya pengadaan *Flyng Fox* untuk wisata Gunung Beruk, anggaran yang dianggarkan sadalah sebesar Rp 25.000.000.¹⁴ Pemerintah Desa membantu melakukan promosi tentang wisata Gunung Beruk, membantu meningkatkan infrastruktur fisik maupun Sumber Daya Manusia, membantu program pelestarian dan penyelamatan lingkungan hutan Gunung Beruk.

Kalau mengelola tidak. Desa tidak mengelola, kita tidak terlibat Kalau mengelola adalah urusan mereka sendiri. nah kita membantunya diluar konsep pengelolaan langsung. Ya banyak to contohnya misalnya dari infrastruktur, promosi, misal ada penghijauan kita membantu menyediakan bibitnya.¹⁵

¹⁴ RPIMDes Desa Karangpatihan Tahun 2017-2022

¹⁵ Hasil wawancara Eko Mulyadi Kepala Desa Karangpatihan 29 Agustus 2017 pukul 11.35

Tabel 5.2
Rencana Pembangunan Pengembangan Wisata Desa
Karangpatihan

| No | Jenis Kegiatan | Lokasi | Perkiraan volume | Waktu Pelaksanaan | Jumlah pembiayaan | Sumber | Pelaksanaan |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Taman Desa | RT 02/ RW 01 / Krajan | - | 2017 | 30.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| 2 | Jembatan Wisata | RT 03/ RW 02/ Tanggung Rejo | 1 Unit | 2022 | 100.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| 3 | Jembatan Besar | RT 03/ RW 02/ Tanggung Rejo | 1 Unit | 2022 | 1.500.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| 4 | Jembatan Kecil | RT 03/ RW 02/ Tanggung Rejo | 1 Unit | 2020 | 10.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| 5 | Pembangunan Rumah Adat | RT 03/ RW 02/ Tanggung Rejo | 1 Unit | 2022 | 100.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| 6 | Jembatan Gantung | RT 06/ RW 02/ Tanggung Rejo | 1 unit | 2020 | 100.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| 7 | Gapura Masuk Wisata Beji | RT 03/ RW 01/ Bendo | 1 unit | 2021 | 50.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| | Jalan Masuk Wisata Beji | RT 03/ RW 01/ Bendo | - | 2020 | 50.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| 8 | Gardu Wisata | RT 03/ RW 01/ Bendo | 1 unit | 2020 | 20.000.0000 | DD/BKD | Swakelola |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------|--------------|-------------|--------|-----------|
| 9 | Kolam Renang | RT 01/ RW 02/ Bibis | 1 unit | 2022 | 100.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| 10 | Pembuatan Website Desa Karangpatihan | Desa | - | 2017 | 5.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| 11 | Pengadaan Flyng Fox Wisata | Desa | - | 2017 | 25.000.000 | DD/BKD | Swakelola |
| | Kegiatan Pembinaan Reyog | Desa | 1 kegiatan | Setiap tahun | 3.500.000 | DD | Swakelola |
| 12 | Kegiatan Pembinaan Karawitan | Desa | 1 kegiatan | Setiap tahun | 2.400.000 | DD | Swakelola |
| 13 | Kegiatan Pembinaan Dan Pelestarian Tradisi Desa | Desa | 1 kegiatan | Setiap tahun | 3.350.000 | DD | Swakelola |

Sumber : RPJMDes Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022

Dalam tabel 5.2 diatas merupakan gambaran rencana pengembangan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam RPJMDes Desa Karangpatihan 2017-2022. Pembangunan infrastruktur dalam rangka penunjang pariwisata mulai di masukan dalam RPJMDes 2017-2022, tepatnya setelah adanya kegiatan wisata di Karangpatihan pemerintah desa mulai peduli akan pengembangan wisata lokal di Karangpatihan. Rencana pembangunan dan pengembangan wisata di Karangpatihan dapat dilihat dari diusulkannya pembangunan jembatan wisata, taman desa, perbaikan jalan Beji, pengadaan perlengkapan *Flyng Fox*, pembangunan rumah adat dan lain-lainnya. Rencana pembangunan jangka menengah Desa Karangpatihan ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah desa dalam mendukung pengembangan wisata di Karangpatihan.

Peran pemerintah desa dalam kemajuan pariwisata di Karangpatihan juga ditunjukkan dengan keikutsertaan Karangpatihan sebagai ASIDEWI (Asosiasi Desa Wisata). ASIDEWI adalah asosiasi bagi desa-desa yang berstatus sebagai desa wisata. Di wakili oleh Eko Mulyadi selaku kepala desa Karangpatihan dan juga salah satu pengurus ASIDEWI Ponorogo menunjukkan bahwa pemerintah Desa Karangpatihan benar-benar serius dalam membangun Karangpatihan sebagai desa wisata percontohan di Ponorogo.

Jadi Ponorogo itu ada ASIDEWI, adalah asosiasi desa wisata. Jadi desa yang menganggap sudah punya desa wisata ini kita bergabung menjadi satu kelompok bernama ASIDEWI. Jadi Asosiasi Desa Wisata, kebetulan saya juga pengurusnya, ada lagi Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Itu organisasinya ya pengurus-pengurus disini.¹⁶

Ada banyak potensi wisata lain yang dimiliki Karangpatihan. Untuk wisata diluar Gunung Beruk, contohnya wisata ekologi, wisata situs sejarah diberikan kekuasaan penuh pada masyarakat sekitar daerah wisata tersebut untuk mengelola dan mengembangkannya. Pemerintah Desa Karangpatihan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan wisata yang ada di sana kepada masyarakat sekitar wisata, namun pemerintah desa juga tidak lepas tangan dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan pariwisata. Dukungan pemerintah desa juga

¹⁶*Ibid*, wawancara Eko Mulyadi

ditunjukkan dengan dibuatnya Pokdarwis sebagai lembaga kreatif penggali potensi wisata di Karangpatihan yang anggotanya berasal dari masyarakat sekitar.

5.1.5 Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan desa wisata di Ponorogo.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo bersama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain juga terus berupaya mengembangkan potensi-potensi lokal yang dimiliki desa disekitar Ponorogo. Langkah tersebut dimulai dengan dibentuknya Pokdarwis Kabupaten Ponorogo yang bergerak untuk memajukan dunia pariwisata dengan pihak terkait serta masyarakat yang peduli dengan potensi wisata di Ponorogo. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata, serta telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo bersama Dinas Pariwisata dan Bappeda melakukan kajian terhadap desa-desa yang mempunyai potensi wisata untuk dapat diangkat statusnya menjadi desa wisata.

Pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Ponorogo mengeluarkan Keputusan Bupati tentang penetapan desa wisata. Terdapat 70 desa yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2017 sebagai desa wisata, termasuk salah satunya adalah desa Karangpatihan. Untuk lebih jelasnya 70 desa yang ditetapkan sebagai desa wisata dapat dilihat pada (lampiran di belakang).

Pemerintah Daerah Ponorogo lewat Bupati Ipong Muchlisoni menyatakan bahwa akan memberikan bantuan anggaran untuk desa wisata setelah verifikasi selesai dilakukan terlebih dahulu.¹⁷ Anggaran sebesar 25 juta akan dibagikan secara bertahap dan difokuskan

¹⁷ Kabardesa.com diakses pada 30 Oktober pukul 20.32

untuk pengembangan fasilitas wisata. Pemberian bantuan tersebut akan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata sebagai SKPD yang bertanggung jawab tentang masalah pariwisata di Ponorogo. Peran pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan dalam pengembangan potensi wisata khususnya terkait desa wisata. Sebagai stakeholder pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap setiap pembuatan kebijakan terkait desa wisata di Ponorogo.

Dengan dibuatnya SK Bupati tentang penetapan desa wisata, dibentuknya Pokdarwis dan bantuan anggaran untuk desa wisata membuat semakin terlihat keseriusan Pemerintah daerah Ponorogo dalam mengembangkan desa wisata. Peran Pemerintah Daerah Ponorogo memang tidak secara langsung memang masuk dalam pengelolaan wisata di Karangpatihan, tetapi melalui pemerintah daerah payung hukum penetapan desa wisata telah disahkan sehingga mampu memberikan legitimasi hukum yang sah apabila nantinya terdapat suatu masalah atau apabila nanti dibutuhkan sebagai syarat turunnya bantuan dari pusat untuk pengembangan desa wisata.

5.1.6 Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Penetapan Desa Wisata Karangpatihan Dan Pembinaan Pengelolaan Wisata Gunung Beruk.

Sebagai salah satu SKPD yang bertanggungjawab dalam pengembangan pariwisata di Ponorogo, Dinas Pariwisata mempunyai beberapa peran penting dalam pengembangan desa wisata di Ponorogo. Secara aktif dinas pariwisata memantau desa-desa yang mempunyai potensi wisata dan mempunyai keinginan kuat dalam pengembangan wisata lokalnya untuk di bina agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Salah satu pembinaan adalah menganjurkan pembentukan Pokdarwis pada desa Karangpatihan untuk menggali potensi yang dimilikinya untuk kemudian dikemas dan dijual kepada masyarakat luar. Bapak Marjudi sebagai staf bidang pengembangan produk dan promosi dinas pariwisata Ponorogo juga menjelaskan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan desa wisata adalah harus ada Pokdarwis.

Didalam desa wisata itu kan harus ada pokdarwisnya juga, itu juga SKnya sudah ada disini. Namanya apa ya kemarin saya lupa. kalo gak salah pokdarwis karangpatihan bangkit mas.¹⁸

Untuk pembentukan Pokdarwis ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu pembuatan pokdarwis dengan SK yang ditandatangani oleh desa setelah itu proposal pokdarwis tersebut di verifikasi oleh Dinas Pariwisata .

Pembentukan pokdarwis itu dari desa, ditetapkan dengan SK desa. Trus diadakan dengan rapat mufakat di internal sana, trus mengajukan proposal ke kita, baru kita menerbitkan SK pokdarwis disana untuk, sebelum diterbitkannya SK kita verifikasi disana. Apakah sana itu layak untuk dijual apa tidak. Kalo layak dijual kita memverifikasi, layak dijual kita buat SK, prosesnya gitu.¹⁹

Peran utama Dinas Pariwisata pada dasarnya adalah sebagai fasilitator desa wisata dalam mengurus legitimasi hukum dan melakukan pembinaan tentang kepariwisataan kepada desa-desa yang serius dalam mengembangkan wisata lokalnya. Dinas Pariwisata sangat mendukung dengan perkembangan desa wisata yang ada di Ponorogo. Banyak cara yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam mengembangkan desa wisata, walaupun untuk masalah bantuan anggaran Dinas Pariwisata masih belum bisa untuk memenuhinya

Kalo masalah anggaran, kita mensupportnya malah bukan masalah anggaran, dukungan kita kaya pembuatan SK, pembinaan trus memverifikasi ke lokasi. kalo kita banyak waktu malah justru kita sering ke lapangannya, proses pembinaannya . nggak cuma lewat ke verifikasi juga lewat WA, telpon dan promosinya. Kita juga memberikan pembinaan tentang sapta pesona. Kita juga memberikan itu mas, poster sapta pesona pada saat verifikasi ke lapangan.²⁰

Namun, peran Dinas Pariwisata dalam memberikan solusi masalah anggaran tidak lepas begitu saja, sebagai tangan kanan Pemda dalam pengembangan wisata lokal Dinas Pariwisata menjadi fasilitator bantuan dana kepada desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata untuk pembangunan fasilitas umum di kawasan wisata. Dengan diterbitkannya SK Penetapan desa Wisata pada tahun 2017, yang dimana Karangpatihan juga masuk

¹⁸Hasil wawancara Marjudi Staf Bidang Pengembangan Prodak dan Promosi Dinas Pariwisata Ponorogo 14 September 2017 13.02

¹⁹*Ibid*, wawancara Pak Marjudi

²⁰*Ibid*, wawancara Pak Marjudi

didalamnya maka Dinas Pariwisata dapat mengupayakan pemberian bantuan yang telah dijanjikan oleh pemerintah daerah kepada pihak desa

Untuk dana baru 20 desa wisata yang mendapat, ning belum cair untuk saat ini. Masih nunggu di bagian keuangan, di Dinas Keuangan daerah. Kita juga sudah mengajukan dengan SK Bupati juga, SK Penetapan Bupati untuk besarannya desa wisata itu kita ngajukan ke keuangan. Nanti langsung di transfer ke rekening desa, dari rekening desa transfer lagi dikasih ke pengelola wisata. Gituu.untuk keperluan MCK, untuk sementara ini untuk kegiatan fasilitas umum,pos kesehatan, MCK sama Mushola.²¹

Sebagai salah satu kaki tangan instansi pemerintahan Dinas Pariwisata telah menunjukkan peran positifnya untuk pengembangan desa wisata di Ponorogo. Meskipun tidak secara langsung masuk dalam pengelolaan wisata di Karangpatihan namun perannya sebagai fasilitator dalam mengurus legitimasi hukum terkait wisata sudah sangat membantu desa – desa yang serius untuk menjadi desa wisata. Pembinaan dengan cara turun langsung ke lapangan, melihat dan memberikan masukan saran kepada para pengelola wisata disana juga dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang dimilikinya.

5.3 Pengelolaan wisata Gunung Beruk secara Signifikasi

Struktur signifikasi (*signification*) yang menyangkut tatasimbolik atau bentuk wacana. Tata simbolik merupakan urutan simbolis sebagai satu dimensi utama penggolongan terhadap institusi-institusi. Tata simbolis atau bentuk wacana adalah lokus institusional utama idiologi.²²

Sesuai dengan tema yang peneliti ambil, menurut Teguh sebagai ketua Karangtaruna Wirataruna bentuk wacana pembukaan wisata Gunung beruk bermula pada saat ada kegiatan mahasiswa UGM Jogjakarta yang sedang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Karangpatihan. Sedangkan institusi-institusi yang berperan melahirkan idiologi dalam

²¹*Ibid*, wawancara Marjudi

²² Giddens, Anthony. 2010. “*Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* “. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hlm 52-53

pencapaian wacana tersebut adalah Karangtaruna, LMDH, Perhutani dan institusi lainnya. Dari hasil analisa lapangan yang dilakukan oleh Karangtaruna dan para mahasiswa tersebut maka muncul ide untuk mengkomersilkan Gunung Beruk kepada masyarakat sebagai tempat wisata alam dengan nuansa pegunungan serta hutan pinus yang dimiliki Gunung Beruk.

Awal dibuka sejak mulai 2015 bulan 8 tanggalnya 27, jadi diawali, awalnya ada KKN disitu memberi gambaran bahwa wisata Gunung beruk itu sangat potensi untuk dijadikan tempat wisata.²³

Kemudian setelah dibentuknya Gunung Beruk sebagai tempat wisata, Karangtaruna Wirataruna sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam pembukaan wsiata Gunung Beruk secara tidak langsung telah ditunjuk sebagai pengelola wisata sampai saat ini oleh Perhutani dan LMDH. Pengelolaan wisata Gunung Beruk yang dilakukan oleh Karangtaruna Wirataruna dilakukan dengan melibatkan para pemuda di Dukuh Tanggungrejo, masyarakat sekitar dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan pengembangan wisata.

Menurut data dari Perhutani luas petak lahan hutan yang digunakan sebagai tempat wisata di Gunung Beruk adalah petak 25 D seluas 1,20 Ha dan petak 26 seluas 1.00 Ha. Dengan vegetasi tanaman utama adalah pohon pinus. Dalam penjelasan Khaidir sebagai Asper Perhutani yang menaungi hutan Gunung Beruk wilayah yang digunakan sebagai wisata cukup kecil dibandingkan dengan luas keseluruhan lahan hutan yang masuk dalam perjanjian dengan LMDH yaitu seluas 397,8 Ha.

Kalo Gunung beruk hanya seper berapanya saja itu, sedikit itu. petak 25 aja kalo itu kalo yang dikelola kan, kalo luas keseluruhannya kan 300 lebih, itu sepuluh persenpun gak ada. Sedangkan yang dipakai cuma 1,25.²⁴

Daya tarik wisata utama yang dimiliki Gunung Beruk adalah menawarkan wisata alamnya, dengan vegetasi hutan pinus yang rindang serta dibuatnya beberapa spot foto yang menawarkan keindahan perbukitan sekitar Gunung Beruk. Penambahan sarana prasana

²³ Hasil wawancara Teguh Cahyono Ketua Karangtaruna Wirataruna 7 September 2017 pukul 9.36

²⁴ Hasil wawancara Khaidir Asper Perhutani KPH Lawu DS Kecamatan Balong pukul 13.47

penunjang pariwisata di Gunung Beruk mengalami perkembangan seiring dengan banyaknya antusias wisatawan yang datang kesana. Dari observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, didapat beberapa data tentang gambaran fasilitas wahana wisata dan fasilitas umum yang ada di wisata Gunung Beruk, berikut data yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan

Tabel 5.3

Sarana Prasarana Wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan Ponorogo

| No | Fasilitas | Jumlah |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Rumah Pohon | 3 |
| 2 | Tempat Selfi (Spot Foto) | 5 |
| 3 | Taman bunga | 1 |
| 4 | Panggung | 1 |
| 5 | Ayunan Kayu | 2 |
| 6 | Jembatan pohon (arena Outbond) | 1 |
| 7 | Gazebo (Gubuk kayu) | 7 |
| 8 | Tempat sampah | 15 |
| 9 | Mushola | 1 |
| 10 | Warung | 14 |
| 11 | Sapta pesona wisata | 1 |
| 12 | Penunjuk arah | 5 |
| 13 | Tempat Parkir | 2 |
| 14 | Lampu (listrik) untuk camp | 2 |

Data olahan penulis 2017

Berdasarkan data yang penulis peroleh dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sarana fasilitas yang di bangun oleh pengelola Gunung Beruk. Ada fasilitas wahana wisata misalnya rumah pohon sebanyak 3 buah, tempat untuk mengambil spot foto sebanyak 5 tempat, panggung semi permanen untuk kegiatan seni 1 buah, taman bunga sebanyak 1 buah, ayunan kayu sebanyak 2 buah, gazebo (tempat beristirahat pengunjung) sebanyak 7 buah, jembatan pohon untuk arena outbond sebanyak 1 buah. Untuk mendukung pariwisata yang ada di Gunung Beruk, pengelola juga melengkapi fasilitas umum untuk menjaga kenyamanan pengunjung saat berwisata. Fasilitas umum yang ada antara lain, mushola kayu yang bernuansa alami, kamar mandi, *baliho* atau *banner* tentang sapta pesona wisata, petunjuk arah untuk masuk ke Gunung Beruk yang dipasang di berbagai tempat, tempat parkir demi menjaga keamanan kendaraan pengunjung, sarana listrik untuk kegiatan camping bagi para pengunjung, dan beberapa warung yang siap memanjakkan pengunjung dengan hidangan lokal yang ditawarkan oleh masyarakat sekitar. Dalam melakukan promosi wisata pihak pengelola dan pemerintah Desa Karangpatihan menggunakan *tagline* Pesona Gunung Beruk dan Karangpatihan Adalah Rindumu dalam setiap postingan di media sosial.

Wisata Gunung Beruk banyak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, mulai dari manfaat ekonomi, manfaat pelestarian alam serta manfaat sosial bagi para penggiat wisata yang ada di Karangpatihan. Seperti diungkapkan oleh Teguh Cahyono bahwa dengan adanya kegiatan wisata di Gunung Beruk memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

Dampaknya setelah adanya wisata itu, masyarakat sekitar ada yang jualan, karangtaruna bisa ada kegiatan dalam bentuk mereka menjaga penitipan kendaraan.²⁵

Terdapat aturan khusus yang dibuat pengelola wisata di Gunung Beruk tentang para pedagang yang berjualan di Gunung Beruk. Seperti yang dikemukakan oleh Teguh bahwa yang boleh berdagang adalah masyarakat asli sekitar Gunung Beruk atau masyarakat desa

²⁵ Hasil wawancara Teguh Cahyono Ketua Karangtaruna Wirataruna 7 September 2017 pukul 9.36

Karangpatihan. Aturan tersebut berdasarkan kesepakatan pengelola bersama dengan masyarakat desa dengan tujuan sebagai pemeberdayaan masyarakat sekitar Gunung Beruk .

Kalau yang jualan disitu, karena kita punya aturan desa, itukan yang jelas yang boleh jualan itukan orang penduduk lokal. Orang luar desa itu sementara belum bisa karena aturan desanya untuk mensejeterahkan masyarakat sekitar.²⁶

Selain membuka lapangan kerja dari berjualan, dengan adanya wisata Gunung Beruk juga membuka beberapa lapangan kerja lain kepada masyarakat yang lain. Berdasarkan observasi di lapangan peneliti mendapati beberapa lapangan kerja lain yang tercipta dengan adanya wisata Gunung Beruk ini. Berikut tabel lapangan pekerjaan sesuai yang peneliti temukan di lapangan

Tabel 5.4 Serapan Tenaga Kerja Pariwisata Gunung Beruk

| No | Lapangan Pekerjaan | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1 | Pedagang warung | 15 |
| 2 | Tukang parkir | 35 |
| 3 | Pemilik lahan parkir | 1 |
| 4 | Tukang sampah | 2 |

Data olahan penulis 2017

Sesuai dengan data di atas terdapat banyak masyarakat yang menerima manfaat dari adanya kegiatan pariwisata di Gunung Beruk. Dimulai dari masyarakat yang berdagang dengan membuat warung disekitar pintu masuk Gunung Beruk sebanyak 15 warung. Warung di Gunung Beruk juga memiliki aturan khusus yang di berikan oleh pihak Perhutani, dimana aturan tersebut melarang masyarakat berdagang di area petak hutan yang dijadikan tempat wisata dan memberikan masukan untuk mengganti atap bangunan warung yang terbuat dari terpal dengan bahan yang alami agar terkesan indah. Seperti yang dikemukakan oleh Asper Perhutani Khaidir.

²⁶ Ibid wawancara Teguh Cahyono

Arahan dari pak Adm kan, area lokasi wisata kan harus bebas warung. Itu ka nada warung tapi diluar kawasan. Itu status warung adalah tanah milik yang dipakai sekarang, tanah milik warga. Batas warung terakhir yang atas itu batas dari kawasan.²⁷

Dari hasil wawancara dengan Tumini sebagai pedagang di sekitar kawasan gunung Beruk, status tanah yang dipakai memang milik perorangan. Beliau menyebutkan bahwa untuk mendirikan warung disani harus menyewa tanah tersebut sebesar Rp 150.000 per bulan.

*Tanahipun sewa mas, perwulane teng mriki satus seket ewu. Soale niki gadahane tiyang mboten gadahane piyambak.*²⁸

Serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Khaidir, setelah kunjungan Adm Perhutani KPH Lawu Ds ke Gunung Beruk ketua LMDH Jaimin juga mengungkapkan bahwa untuk menambah keindahan kawasan wisata maka warung yang menggunakan atap terpal harus dilapisi atau diganti dengan menggunakan bahan yang lebih bernuansa alam

Setelah kunjungan dari pak Adm itu katakanlah itu bukan alami kalo dikasih atap yang namanya terpal itu bahkan dari pihak pengelola kami begitu memperhatikan atau mendengarkan sekali dari kata-kata pak Adm bahwa warung-warung tersebut harus diubah. Dengan atap yang dahulunya terpal harus diubah menjadi yang alami, itu terutama dari warung.²⁹

Pengarahan dari Perhutani juga meliputi perbaikan jalan menuju kawasan wisata Gunung Beruk harus diperbaiki serta penambahan wahana yang harus ditambah. Perbaikan adalah demi kenyamanan pengunjung pada saat berwisata di kawasan Gunung Beruk karena daerah yang berupa perbukitan dan jalan setapak yang masih terbuat dari tanah.

Trus yang lainnya lagi jalan-jalan menuju lokasi itu agar dibuat walaupun hanya setapak jangan sampai jalan itu licin harus dimakadam, diperkeras walaupun belum diaspal. Trus ketiga kalinya wahana yang ada disitu harus di tambah lagi.³⁰

Setiap harinya rata-rata pedagang mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000 - Rp 40.000 jika hari biasa dan jika hari libur mencapai Rp 200.000.

²⁷ Hasil wawancara Khaidir Asper Perhutani KPH Lawu DS Kecamatan Balong pukul 13.47

²⁸ Hasil wawancara Tumini Pedagang Sekitar gunung Beruk 8 September 2017 pukul 15.19

²⁹ Hasil wawancara Jaimin Ketua LMDH Wonorekso 8 September 2017 pukul 14.38

³⁰ *Ibid*, wawancara Jaimin

*Nek penghasilan mboten tentu mas, koyo saiki nek hari biasa kimau oleh telungpuluh ewu mas. Nek dek ingi pas hari minggu iso satus seket sampek rongatus ewu.*³¹

Karangtaruna sebagai pengelola wisata sekaligus pengusaha wisata membuka jasa penitipan kendaraan yang dikelola oleh anggota Karangtaruna dengan membagi tugas shift kerja per hari untuk pemerataan tugas kepada para anggotanya. Jumlah 35 orang tersebut merupakan kalkulasi dari petugas parkir yang disepakati dengan shift 4 orang perhari dan dikerjakan secara bergantian sesuai jadwal yang sudah buat dan disepakati bersama. Dengan adanya parkir tersebut ternyata juga memberikan dampak yang baik untuk pemilik lahan dengan sisitem bagi hasil penyewaan lahan. Biasanya setiap hari pemilik lahan mendapatkan bagi hasil parkir berkisar Rp 30.000 saat hari biasa dan Rp 50.000 saat hari libur atau saat kunjungan wisatawan sedang ramai.

*Sedino nggeh mboten mesti mas, kadang kulo diparingi telungpuluh ewu. Pokok nggeh mboten mesti nek rame nggeh skeet ewu. Dino minggu ngoten biasane rame. Turahane hasile nggeh kagem kagem lare-lare sing njogo niku.*³²

Dampak yang kurang baik dari adanya pariwisata adalah masalah lingkungan. Dengan adanya kegiatan wisata pasti akan menimbulkan polusi berupa sampah. Pengunjung wisata Gunung Beruk masih banyak yang tidak peduli dengan kebersihan alam, dari pengamatan peneliti dan wawancara dengan pengelola Gunung Beruk memang dibenarkan adanya banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya oleh para pengunjung sehingga membuat lingkungan sekitar Hutan Gunung Beruk menjadi kotor dan tidak asri. Banyak sampah plastik botol sisa minuman dan makanan disekitar wisata. Namun untuk masalah sampah pengelola mempunyai cara tersendiri yaitu memperkerjakan dua orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan sampah dari kawasan wisata untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah yang letaknya diluar kawasan Gunung Beruk³³.

³¹ Hasil wawancara Yanti Pedagang Sekitar gunung Beruk 8 September 2017 pukul 15.40

³² Hasil wawancara Tuklrah Pemilik Lahan Parkir 8 September pukul 16.07

³³ Hasil wawancara Yanti Pedagang Sekitar gunung Beruk 8 September 2017 pukul 15.40

*Nek masalah sampah wonten piyambak mas sing mendeti. Sing dodol teng mriki ditariki patang ewu per minggunipun. Kagem mbayari tiyang ingkang guwak i sampah.*³⁴

Di kawasan Gunung Beruk petugas yang ditunjuk sebagai petugas sampah adalah Katiran dan Gimun. Bayaran yang mereka terima berasal dari iuran pedagang yang ada di Gunung Beruk. Walaupun tergolong kecil tetapi bayaran yang mereka terima setidaknya dapat menjadi penghasilan tambahan untuk membantu kebutuhan ekonomi mereka.

Dampak dengan adanya wisata Gunung Beruk juga dirasakan oleh LMDH dan Perhutani, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan hutan dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan seperti penebangan liar, pencurian kayu, pembakaran hutan dan penanaman lahan hutan lindung yang bukan untuk peruntukannya. Ketua LMDH Wonorekso sebagai pemerhati lingkungan hutan di kawasan Karangpatihan menjelaskan bahwa banyak sekali manfaat bagi lingkungan alam dengan adanya wisata di Karangpatihan.

Banyak sekali perubahannya mas, dulu sebelum adanya wisata itu seperti penebangan liar, truss pengolahan, tanah yang seharusnya tidak digarap oleh petani, digarap, padahal nggak haknya. Setelah adanya wisata sekarangpun sudah ndak ada orang yang mencuri kayu lagi atau penebangan liar bahkan lokasi sekitar wisata ternyata sudah ditanami penghijauan. Orang yang disekitar wisata sudah tidak boleh menanam tanaman seperti ketela dan lain-lain. banyak sekali mas manfaatnya.³⁵

Manfaat serupa juga dikatan oleh pihak Perhutani dimana semenjak dibukanya wisata di Karangpatihan, kebakaran hutan di sekitar Karangpatihan tidak terjadi kembali.

Dulu sebelum dikelola, hampir tiap tahun pasti terbakar, tapi semenjak ini, semenjak dikelola hampir gak ada kebakaran ya Pak Dar..gak ada kebakaran.³⁶

Selain berbagai manfaat yang disebutkan diatas keberadaan wisata Gunung Beruk di Karangpatihan juga mampu merubah stigma pandangan masyarakat selama ini terhadap Desa Karangpatihan. Dahulu Karangpatihan identik dengan daerah terbelakang dan banyak masyarakatnya yang terbelakang mental. Bahkan pada tahun 2010an desa Karangpatihan

³⁴ Hasil wawancara Yanti Pedagang Sekitar gunung Beruk 8 September 2017 pukul 15.40

³⁵ Hasil wawancara Jaimin Ketua LMDH Wonorekso 8 September 2017 pukul 14.38

³⁶ Hasil wawancara Khaidir Asper Perhutani KPH Lawu DS Kecamatan Balong pukul 13.47

dijuluki sebagai kampung idiot, namun sekarang dengan berkembangnya wisata di karangpatihan masyarakat mulai mengenal Karangpatihan yang sekarang dengan wisata Gunung Beruknya dan bukan dengan stigma kampung idiotnya. Asumsi peneliti ini diperkuat dengan wawancara peneliti dengan Bu Dian suluh akademisi dari Unmuh Ponorogo, sebuah Universitas swasta di Ponorogo yang mengatakan memang untuk sekarang stigma masyarakat tentang kampung idiot sudah berubah.

Perubahan stigma menjadi hal yang pasti. Desa Karangpatihan yang selama ini terkenal sebagai desa yang terbelakang berangsur merubah dirinya menjadi desa wisata. Tentu ini tidak mudah. Akan tetapi Desa Karangpatihan dapat menunjukkan bahwa mereka dapat bangkit dari kondisi keterbatasan.³⁷

Adanya kegiatan wisata manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang memiliki keadaan jasmani rohani di Desa Karangpatihan saja. Namun manfaat juga dirasakan oleh penderita tunagrahita atau orang keterbelakangan mental yang ada di Karangpatihan. Karangtaruna sebagai pengelola wisata memiliki program sosial memberikan bantuan sembako ataupun santunan yang dikhususkan untuk para penderita tunagrahita.

Karena hasil dari penarikan tersebut kita kembangkan untuk kegiatan wisata. Yang kedua untuk kita donasikan kepada Tunagrahita itu untuk kegiatan sosialnya, kita memberikan sembako dan segala macam, santunan dan yang selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan lingkungan yang kita utamakan.³⁸

Pemberdayaan pemerintah desa terhadap penderita tunagrahita lewat rumah harapan menghasilkan beberapa produk yang dihasilkan oleh para penderita tunagrahita. Misalnya ada batik ciprat, keset kain perca dan yang lainnya. Dengan adanya wisata maka pemasaran produk akan lebih mudah, hasil karya penderita tunagrahita tersebut dapat di promosikan kepada wisatawan sebagai oleh-oleh sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat miskin yang mengalami keterbelakangan mental.

³⁷ Hasil wawancara Dian Suluh Akademisi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 5 Oktober 2017 pukul 19.34

³⁸ Hasil wawancara Teguh Cahyono Ketua Karangtaruna Wirataruna 7 September 2017 pukul 9.36

Yang terakhir dalam setiap pengelolaan pastilah diperlukan transparansi dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program yang sudah di rencanakan. Transparansi dilakukan melalui forum yang dibuat oleh Karangtaruna untuk menyampaikan hasil laporan seperti pemasukan, pengeluaran dan lain lainnya.

Untuk forumnya itu dalam satu bulan sekali, jadi laporannya satu bulan sekali kita pemasukan, dari situ kita laporkan kalo ada pemasukan, kalo ada kas masuk sekian pengeluaran sekian.³⁹

Transparansi antar anggota menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari konflik di dalam organisasi. Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari Karangtaruna untuk meningkatkan minat wisatawan untuk datang di Gunung Beruk adalah dengan melakukan pengembangan wisata disana. Terkait pengembangan wisata di Gunung Beruk sangat tergantung pada jumlah pengunjung yang datang kesana. Terbatasnya dana adalah masalah utama dalam pengembangan wisata di gunung Beruk.

Kalo pengembangannya, kita itu tergantung dari banyaknya pengunjung. Kalo pengunjungnya rame kita itu bisa mengembangkannya cepat. Karena untuk pengembangan itu kita ambikan alokasi dari parkir atau penitipan jadi itu, proses mengembangkannya kita seperti itu.⁴⁰

Dalam setiap bulannya pihak pengelola mengatakan mendapat pemasukan sebesar Rp 2.000.000.00 sampai dengan Rp 4.000.000.00 dari hasil pengelolaan wisata Gunung Beruk. Rata-rata pengunjung yang datang ke Gunung Beruk dalam sehari adalah sebanyak 50 orang pada hari biasa dan sekitar 100 orang pada saat hari libur. Untuk mendorong wisata Gunung Beruk pengelola wisata juga mengadakan beberapa agenda acara seperti pertunjukan musik dangdut yang digelar saat perayaan tahun baru dan mengadakan acara-acara bertemakan budaya seperti pertunjukkan reyog, seni tari, dan camping outbond.

Dalam sehari rata-rata pengunjung kita sekitar 50an orang mas, beda lagi kalau hari libur bisa mencapai dua sampai tiga kali lipatnya. Kalo penghasilan tidak pasti ya, sekitar 2 juta sampai 4 juta perbulan, tapi kan itu semua tergantung berapa pengunjung yang datang. Tapi kalo tahun baru kemarin ada ribuan mas yang datang,

³⁹*Ibid*, Teguh Cahyono

⁴⁰*Ibid*, Teguh Cahyono

memang kalo untuk perayaan tahun baru kita khusus membuat acara di sana, seperti pertunjukkan dangdutan. Kita juga mempersilahkan kalau ada yang mau bikin acara disana, selama tidak menyalahi aturan dari kita.⁴¹

Untuk yang terakhir adalah masalah evaluasi, Karangtaruna juga menyadari pentingnya melakukan evaluasi kinerja dalam pengelolaan Gunung Beruk selama ini.

Kalo masalah evaluasi itu sangat penting ya, karena eeee setiap pengembangan wisata itu kan perlu progress dan itukan nanti setiap pengunjung selalu kita tanya kurangnya apa.⁴²

Terdapat berbagai potensi yang dapat dikembangkan di Karangpatihan, salah satunya di kembangkan dan dikelola oleh Karangtaruna Wirataruna yaitu wisata Gunung Beruk. Terbukti dengan adanya wisata banyak membawa manfaat bagi masyarakat sekitar Gunung Beruk. Perekonomian masyarakat meningkat, membuka banyak lapangan pekerjaan serta terjaganya kelestarian alam. Pengelolaan wisata yang dilakukan Karangtaruna dapat dikatakan sudah cukup baik, walaupun belum secara profesional. Tetapi jika melihat dari tahun ke tahun perkembangan wisata yang dilakukan oleh Karangtaruna semakin membaik.

5.3 Pengelolaan Wisata Gunung Beruk Secara Dominasi

Struktur dominasi yang mencakup penguasaan atas orang (politik) dan barang atau hal (ekonomi). Struktur dominasi tergantung pada mobilisasi dua jenis sumber daya berbeda. Melihat dari sudut pandang struktur dominasi, ada dua hal yang perlu digaris bawahi dalam melihat dominasi pengelolaan wisata di Karangpatihan⁴³.

Yang pertama dominasi pengelolaan wisata pada tingkat desa dengan cakupan seluruh pengelolaan potensi wisata di Desa Karangpatihan serta yang kedua adalah dominasi yang lebih spesifik merujuk pada pembahasan tema peneliti yaitu dominasi pengelolaan wisata di Gunung Beruk. Telah dijelaskan bahwa pada level desa tidak ada dominasi pengelolaan wisata yang dilakukan oleh stakeholder ataupun aktor-aktor yang ada di Karangpatihan.

⁴¹Ibid, wawancara Mas Teguh Cahyono

⁴² Ibid, wawancara Mas Teguh Cahyono

⁴³ Giddens, Anthony. 2010. *“Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hlm 52-53

Pemerintah desa Karangpatihan menyerahkan pengelolaan wisata kepada setiap wilayah untuk mengembangkan wisata yang dimilikinya. Setiap wilayah RT/RW atau dukuh yang di Karangpatihan berhak mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang dimilikinya.

Sedangkan pada wisata Gunung Beruk, aktor yang paling mendominasi dalam pengelolaannya adalah Karangtaruna. Secara dominasi politik, pengelolaan Gunung Beruk dikuasai oleh Karangtaruna Wirataruna Dukuh Tanggungrejo. Seperti diungkapkan Mas Teguh bahwa Karangtaruna merupakan aktor yang paling mendominasi dalam pengelolaan wisata di Gunung Beruk

Untuk sekarang yang jelas yang paling mendominasi tetap dari Karangtaruna. Karena pengelolaan sepenuhnya diberikan ke Karangtaruna.⁴⁴

Dominasi Karangtaruna dalam pengelolaan juga mendapat dukungan dari LMDH dengan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan wisata Gunung Beruk kepada Karangtaruna. Dengan adanya PKS yang dilakukan oleh LMDH dan Perhutani pengelolaan wisata Gunung Beruk dapat digunakan sebagai dasar oleh Karangtaruna dalam dominasinya mengelola wisata Gunung Beruk. Dominasi dalam konteks teori strukturasi Anthony Giddens juga menyangkut tentang dominasi secara ekonomi (keuangan) dalam kasus di Gunung Beruk tidak ada dominasi ekonomi yang dilakukan oleh aktor untuk menguasai pengelolaan wisata yang ada di sana. Asumsi tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Mas Teguh yang mengatakan bahwa untuk selama ini tidak ada yang menggunakan dominasi ekonomi dalam kekuasaan pengelolaan wisata di Gunung Beruk

Untuk sementara nggak ada. Untuk pengelolaan itu sepenuhnya sementara diserahkan ke Karangtaruna dan masyarakat sekitar. jadi kita memanfaatkan dana yang ada dan kita kembangkan dana yang ada. Jadi nggak ada ikatan siapa yang memberi banyak itu nggak ada.⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara Teguh Cahyono Ketua Karangtaruna Wirataruna 7 September 2017 pukul 9.36

⁴⁵ *Ibid*, wawancara Teguh Cahyono

Namun pengelolaan yang dilakukan oleh Karangtaruna tetap memiliki batas aturan yang tidak boleh dilanggar. Perhutani sebagai pemilik lahan hutan yang digunakan sebagai kawasan wisata memiliki kontrol dalam mengawasi pengelolaan wisata yang dilakukan oleh Karangtaruna. Sebagai Asper Perhutani KPH Lawu Ds pan Khaidir menjelaskan bahwa dulu ada kasus penyalahgunaan wewenang pengelola dengan mengkomersilkan wisata Gunung Beruk

Dulu pernah gini mas, sebelum ada MoU pihak Karangtaruna pernah menarik karcis. Dikomersilkan, itu saya buat surat teguran tembusan kemana-mana lah itu, ke Muspika. Artiinya kan gini jadi sebelu adanya PKS kan nggak boleh dikomersilkan, boleh menarik karcis tapi diluar kawasan. Kan begitu..Itu termasuk salah satu sanksi.⁴⁶

Maka dalam proses pengelolaan wisata Gunung Beruk meskipun Karangtaruna mendominasi secara penuh, tetapi tetap ada kontrol yang mengatur proses pengelolaan wisata dari berbagai pihak. Karangtaruna sebagai organisasi yang dibina dibawah naungan Perhutani KPH Lawu DS dan LMDH Wonorekso harus sejalan dengan peraturan yang berlaku, dengan begitu maka pengelolaan wisata Gunung Beruk dapat dilakukan dengan baik tanpa melanggar aturan hukum dan tetap berfokus pada penyelamatan alam.

5.4 Legitimasi dalam pengelolaan Wisata Gunung Beruk Karangpatihan

Struktur legitimasi yang menyangkut peraturan normatif yang lengkap dalam tata hukum. Maksudnya adalah struktur yang tersusun dalam aturan-aturan hukum.⁴⁷ Berdasarkan tema masalah yang peneliti ambil, secara legitimasi ada dua legitimasi hukum yang akan peneliti bahas pada point legitimasi di penelitian ini. Yang pertama adalah legitimasi hukum dalam lingkup desa, yaitu lahirnya legitimasi hukum tentang penetapan Desa Karangpatihan sebagai desa wisata. Sedangkan yang kedua adalah legitimasi hukum yang menaungi pengelolaan wisata Gunung Beruk di Desa Karangpatihan.

⁴⁶ Hasil wawancara Pak Khaidir Asper Perhutani KPH Lawu DS Kecamatan Balong pukul 13.47

⁴⁷Giddens, Anthony. 2010. *“Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat “*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hlm 52-53

Legitimasi hukum tentang desa wisata di Karangpatihan, diterbitkan pada tahun 2017 lewat Keputusan Bupati Ponorogo nomor 188.45/1769 /405.29/2017 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Ponorogo. Mengacu pada keluarnya Surat Keputusan Bupati tersebut maka secara legalitas hukum Desa Karangpatihan berubah statusnya dari desa menjadi desa wisata. Dengan lahirnya Desa Karangpatihan menjadi desa wisata diharapkan mampu menunjang segala potensi yang dimilikinya untuk terus mengembangkan wisata lokal kearah yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya legitimasi hukum desa wisata akan mempermudah Desa Karangpatihan dalam mendapatkan program bantuan pemberdayaan wisata dari Pemerintah. Karena salah satu syarat penting yang harus dipenuhi agar dapat menerima program bantuan dari pemerintah adalah desa yang menenyebut dirinya sebagai desa wisata harus mempunyai legitimasi hukum yang sah. Dalam wawancara dengan kepala bidang pengembangan produk dan promosi Marjudi menjelaskan bahwa akanada bantuan senilai kurang lebih 25 juta yang akan diberikan pada desa wisata untuk pengembangan fasilitas wisata. Namun dalam pemeberian bantuan tersebut desa harus mendapatkan Surat Keputusan terlebih dahulu yang menyebutkan bahwa desa tersebut sudah ditetapkan sebagai desa wisata.

Kamu gak bilangin ke pak lurah eko, eee jadi gini kalo mau dapat bantuan itu harus ditetapkan dulu sebagai desa wisata lo pak, gitu. Kalo belum ada penetapan dari pemerintah ya bantuannya nggak bisa diproses.⁴⁸

Legitimasi penetapan desa wisata semakin menguatkan branding Karangpatihan sebagai desa wisata yang siap untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Desa wisata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terbukti dengan diterbitkannya SK, pemberian bantuan dan ikut mempromosikan potensi lokal desa-desa di sekitar Ponorogo lewat berbagai media.

⁴⁸Hasil wawancara Marjudi Staf Bidang Pengembangan Prodak dan Promosi Dinas Pariwisata Poorogo 14 September 2017 13.02

Wisata yang diunggulkan di Karangpatihan adalah wisata Gunung Beruk, dalam hal legitimasi hukum pengelolaan wisata Gunung Beruk banyak mengalami berbagai dinamika. Dasar hukum pengelolaan dan pembukaan wisata Gunung Beruk adalah adanya kerjasama masyarakat yang di wakikan oleh LMDH Wonorekso dan Perhutani KPH Lawu DS sebagai pemangku hutan di wilayah Gunung Beruk. Bermula pada tahun 2009 kerjasama yang dilakukan LMDH dan Perhutani melahirkan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Atas dasar ini maka Karangtaruna meminta bantuan kepada LMDH untuk melakukan permohonan izin kepada Perhutani untuk membuka hutan Gunung Beruk sebagai tempat wisata. Pihak Perhutani KPH Lawu DS memperbolehkan pembukaan Gunung Beruk dengan status rintisan wisata. Rintisan wisata berlaku selama tiga bulan masa percobaan, kemudian dilihat perkembangannya. Dengan adanya perjanjian tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa Karangtaruna dan LMDH secara legal berhak memanfaatkan hutan Gunung Beruk sebagai wisata. Hal ini di kuatkan dengan penjelasan oleh Jaimin bahwa dengan adanya kerjasama pengelolaan seharusnya sudah dapat dikatan legal.

Bahkan LMDH kan udah ada perjanjian kerjasamanya. Maka sebenarnya salah kalo kita dikatakan illegal , ndak benar mas, ndaak benar itu. Kita kan sudah mempunyai izin walaupun belum izin sepenuhnya wisata. Tapi akan disitu sudah ditulis ada pasal-pasal nya. Di perjanjian itu.⁴⁹

Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh LMDH dan Perhutani tahun 2009 ternyata tidak cukup kuat dalam legitimasi hukum pengelolaan wisata Gunung Beruk. Dalam perjanjian izin pembukaan wisata, status rintisan wisata hanya berlaku selama tiga bulan. Pada bulan Mei 2017 terjadi konflik karena pihak pengelola mengkomersilkan Gunung Beruk dengan menarik uang tiket kepada pengunjung tanpa meminta izin kepada Perhutani. Untuk menyelesaikan konflik tersebut maka pada tanggal 25 April 2017 dilakukan kesepakatan yang

⁴⁹ Hasil wawancara Jaimin Ketua LMDH Wonorekso 8 September 2017 pukul 14

membahas kerjasama pengelolaan wisata di Gunung Beruk antara LMDH dan Perhutani disaksikan oleh Muspika, Pemerintah Desa dan Karangtaruna.

Dengan keluarnya kesepakatan nomor 08/044-6/PKS/LWU/DRIVE-Jatim/2017 Tentang Kesepakatan Bersama Pengembangan Wisata Alam Hutan Pinus Gunung Beruk Antara Perum Perhutani Dengan LMDH Wonorekso maka akan memperjelas legitimasi hukum izin pengelolaan wisata yang dilakukan oleh Karangtaruna sejak lama. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi pariwisata terpadu di Desa Karangpatihan dalam kawasan hutan sehingga memperoleh manfaat ekologi, sosial dan ekonomi. Dalam pasal 2 Kesepakatan Bersama LMDH dan Perhutani ada beberapa ruang lingkup yang menjadi objek kesepakatan yaitu⁵⁰:

1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wisata terpadu yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola pihak kesatu yang merupakan wilayah pengakuan pihak kedua, meliputi
 - a. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
 - b. Pengembangan pariwisata terpadu di obyek yang ada di wilayah Perhutani/ Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Ponorogo Barat yaitu wana wisata hutan pinus Gunung Beruk.
2. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Meningkatkan pendapatan para pihak dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pariwisata terpadu utamanya wana wisata alam hutan pinus Gunung Beruk
 - b. Pengembangan ekonomi masyarakat dan promosi pariwisata terpadu
 - c. Peningkatan kualitas masyarakat dan mutu sumber daya hutan melalui optimalisasi fungsi dan manfaatnya, dibidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pariwisata

Lewat perjanjian tersebut juga telah disepakati beberapa hak dan kewajiban antara Perhutani dan pengelola. Mengacu pada pasal 5 Kesepakatan Bersama hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola wisata Gunung Beruk antara lain sebagai berikut :

Hak Pihak Kedua

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pengelolaan objek kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kesepakatan ini

⁵⁰ Kesepakatan Bersama nomor 08/044-6/PKS/LWU/DRIVE-Jatim/2017 Tentang Kesepakatan Bersama Pengembangan Wisata Alam Hutan Pinus Gunung Beruk Antara Perum Perhutani Dengan LMDH Wonorekso

- b. Mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kesepakatan
- c. Memperoleh data dan informasi dari pihak pertama yang terkait dengan pelaksanaan kesepakatan dan
- d. Memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan wana wisata

Kewajiban pihak kedua

- a. Mengadakan penataan, pembenahan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana wana wisata sesuai kemampuan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang dikomunikasikan terlebih dahulu dengan para pihak, diantaranya ;
 - Menata warung yang ada disekitar lokasi wisata, di dalam maupun di luar kawasan
 - Menata fasilitas umum. Yang bisa mencemari lokasi wisata/air terjun
 - Penataan parkir, agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, sehingga terjaganya keselamatan berlalulintas
 - Penjual, pemilik warung, petugas lokasi wisata agar memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung
 - Selama masih dalam bentuk kesepakatan ini tidak dibolehkan ada tiket masuk wisata Gunung Beruk.
- b. Bersama para pihak melindungi dan mengamankan sumber daya hutan pada lokasi kesepakatan dan di sekitarnya secara berkelanjutan
- c. Bersama para pihak membantu memelihara alur batas hutan/batas areal objek yang dikerjasamakan
- d. Bersama para pihak menjaga dan meningkatkan fasilitas wana wisata pada lokasi kesepakatan
- e. Bersama para pihak melaksanakan konservasi dan rehabilitasi lahan pada dan sekitar lokasi yang menjadi objek kerjasama secara berkelanjutan, dengan bimbingan teknis dari pihak kesatu
- f. Memberikan fasilitas pelaksanaan perlindungan masyarakat apabila terjadi bencana dan pada objek kesepakatan ini termasuk upaya kesiagaan (mitigasi bencana, pemasangan plang peringatan dan lain-lain) dalam hal ini dilakukan oleh lembaga yang membidangi penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun

Dalam pengambilan keputusan kerjasama pengelolaan kawasan hutan Perhutani tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan kawasan hutan dalam wilayah kerjanya, sedangkan LMDH Wonorekso adalah sebagai lembaga yang merupakan mitra dari Perhutani. Aturan lain yang menjadi landasan adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Secara garis besar pengelolaan wisata Gunung Beruk sudah dapat dikatakan sah dan legal dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut. Melalui perjanjian tersebut kedua belah pihak telah mensepakati bahwa tujuan utama pengelolaan kawasan hutan wisata Gunung Beruk adalah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar Karangpatihan. Namun ada sesuatu yang menjadi persoalan bahwa PKS perjanjian pembagian hasil belum diterbitkan oleh Perhutani. Apabila sudah keluar perjanjian pembagian hasil, maka nantinya kawasan Gunung Beruk dapat dikomersilkan secara penuh dan lebih mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

5.4 Faktor Pendukung

Lahirnya pariwisata di Karangpatihan mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya setiap aktor mempunyai peran masing-masing terhadap kemajuan wisata di Karangpatihan. Mulai dari masyarakat sekitar yang sangat mendukung dengan adanya wisata di Gunung Beruk. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagian besar masyarakat sekitar Gunung Beruk mendapatkan dampak yang luar biasa dengan adanya wisata, sehingga mereka sangat mendukung adanya wisata ini.

Ya kami sangat mendukung mas., semenjak enek wisata masyarakat sini iso jualan mas. Iso kenek kanggo nambahi kebutuhan mas, jadi kami sangat mendukung.⁵¹

Selain masyarakat, dukungan juga diberikan oleh para stakeholder yang berperan dalam membantu proses lahirnya wisata dan legitimasi hukum pengelolaan wisata di Gunung Beruk. Dimulai dari Pemerintah Desa, LMDH, Perhutani KPH Lawu DS, Dinas Pariwisata Ponorogo serta Pemerintah Daerah Ponorogo. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan dukungan serta peran lembaga-lembaga tersebut, diharapkan mampu memberikan kemajuan dalam pariwisata Karangpatihan khususnya wisata Gunung Beruk.

⁵¹Hasil wawancara Masyarakat Karangpatihan 17 September Pukul 09.45

5. 5 Faktor Penghambat

Kegiatan pariwisata di Desa Karangpatihan masih berjalan kurang lebih 3 tahun, awal dibuka pada 2015 sampai saat ini mengalami banyak dinamika dan perkembangan. Dalam pengelolaan wisata di Gunung Beruk ada beberapa masalah yang menjadi penghambat dalam pengembangan wisata disana. Faktor penghambat dalam pengelolaan wisata di Gunung Beruk misalnya adalah terbatasnya dana dalam pengembangan wisata. Seperti yang diungkapkan oleh Teguh bahwa dalam pengembangan kita sangat bergantung pada jumlah kunjungan pengunjung.

Dalam pengembangan kita, tergantung pengunjung kalo pengunjung banyak kita lebih mudah. Karena dana didapat dari situ, dari parkir yang dilakukan anak-anak. Dan kita kerjakan secara bersama-sama, karena konsep kita adalah kebersamaan.⁵²

Faktor dana juga berpengaruh pada kurangnya fasilitas yang menunjang wisata di Karangpatihan. Fasilitas umum dan wahana wisata yang masih terbatas serta akses jalan masuk wisata yang rusak dapat mengganggu pengunjung. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa pengunjung yang ditemui oleh peneliti yang mengatakan bahwa mereka sedikit kecewa dengan fasilitas dan kebersihan di wisata Gunung Beruk.

Untuk kekurangannya, yang saya rasakan ya mas. Yaitu banyak sampah diatas. Sampah tidak dimasukkan oleh pengunjung ke tempat sampah. Sehingga mengganggu pemandangan. Wahana juga perlu ditambah mas, seperti spot foto. Walaupun tidak sesuai ekspektasi tapi saya cukup senang lah mas datang kesini.⁵³

Akses masuk yang masih susah juga mendapat kritikan dari akademisi Unmu Ponorogo Bu Dian. Yang menyayangkan akses masuk menuju wisata yang masih kurang baik.

Kritik saya adalah tentang susahnya akses jalan. Karena desa karangpatihan cukup jauh dari kota dan jalan menuju kesana cenderung rusak, maka perlu difikirkan agar memudahkan wisatawan yang akan datang ke lokasi wisata.⁵⁴

⁵² Hasil wawancara Teguh Cahyono Ketua Karangtaruna Wirataruna 7 September 2017 pukul 9.36

⁵³ Hasil wawancara Agung Pengunjung wisata Gunung Beruk 24 September 2017 pukul 14.22

⁵⁴ Hasil wawancara Dian Suluh Akademisi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 5 Oktober 2017 pukul 19.34

Melihat secara lebih mendalam, faktor penghambat lain dalam pengelolaan wisata adalah belum diterbitkannya Surat Perjanjian Kerjasama pembagian hasil keuntungan antara Perhutani dan pengelola wisata. Kenapa pembagian hasil menjadi penghambat, karena dengan belum dikeluarkannya keputusan bagi hasil ini maka Gunung Beruk belum bisa dikomersilkan secara sepenuhnya. Telah diketahui bahwa untuk saat ini pendapatan pengelola hanya berasal dari uang jasa parkir, dalam perjanjian kesepakatan sementara memang tidak diperbolehkan adanya pemungutan tiket masuk kepada pengunjung. Hasil wawancara dengan mas Teguh menjelaskan bahwa karena kesepakatan bagi hasil belum ada jadi sementara yang dipakai adalah aturan yang ada dalam Kesepakatan Bersama tahun 2017.

Untuk tiket kita nggak narik, karena untuk urusan itu kita harus ada aturan pembagian hasilnya dari Perhutani, Dispenda. Kita kemarin sempat ke Dinas pariwisata tetapi aturannya belum ada jadi dispenda juga belum memproses.⁵⁵

Asper Perhutani KPH Lawu Ds Khaidir juga mengatakan bahwa memang untuk sementara ini perjanjian kerjasamanya pembagian hasil antara Perhutani dan pengelola belum ada.

Jadi gini mas, untuk legitimasi sementara mereka memakai kesepakatan yang kemarin. Untuk kesepakatan bagi hasil masih belum keluar, masih diproses di Divre Surabaya. Kalo nggak salah dua sampai tiga bulan jadi.⁵⁶

Terlihat bahwa memang dalam pengelolaan wisata yang ada di Karangpatihan masih memiliki beberapa masalah yang dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan wisata khususnya wisata Gunung Beruk. Diperlukan kerjasama seluruh stakeholder dan aktor-aktor yang berperan dalam pengembangan wisata di Gunung Beruk.

⁵⁵ Hasil wawancara Teguh Cahyono Ketua Karangtaruna Wirataruna 7 September 2017 pukul 9.36

⁵⁶ Hasil wawancara Pak Khaidir Asper Perhutani KPH Lawu DS Kecamatan Balong pukul 13.47

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Potensi pariwisata di Desa Karangpatihan sangatlah besar, meskipun memiliki banyak potensi tetapi untuk selama ini perkembangan yang paling mengalami kemajuan adalah wisata Gunung Beruk. Dari beberapa potensi wisata yang ada, yang sudah dikelola dengan serius adalah wisata Gunung Beruk. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapati beberapa fakta yang ditemui oleh penulis.

Hasil dari analisa penulis yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Agen

Dalam pengelolaan pariwisata Gunung Beruk di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo terdapat beberapa agen atau aktor yang terlibat. Aktor tersebut memiliki peran sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisa peneliti dari hasil penelitian di lapangan terdapat enam aktor yang berperan dalam pengelolaan wisata di Gunung Beruk. Ke enam aktor tersebut adalah Karangtaruna Wirataruna, LMDH Wonorekso, Pemerintah Desa Karangpatihan, Perhutani KPH Lawu DS, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari ke enam aktor tersebut Karangtaruna Wirataruna merupakan aktor yang paling mendominasi dalam pengelolaan Gunung Beruk. Karangtaruna Wirataruna mengambil peran sebagai pengelola wisata/pengusaha wisata yang menjalankan kegiatan pariwisata di Gunung Beruk. Sedangkan aktor yang lain merupakan mitra kerjasama Karangtaruna dalam mengembangkan wisata di Karangpatihan, melalui LMDH Wonorekso kemudian mereka melakukan kerjasama dengan Perhutani KPH Lawu DS untuk menerbitkan surat izin pengelolaan hutan di Gunung Beruk. Peran dari para stakeholder seperti Pemda Ponorogo, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pariwisata adalah memberikan fasilitas pengembangan wisata lewat peneyuluhan, promosi, bantuan dan pengurusan legitimasi hukum yang dibutuhkan dalam pembentukan daerah wisata baru. Semua aktor memiliki peran yang saling berkaitan dalam memajukan wisata di Karangpatihan, khususnya adalah wisata Gunung Beruk.

Signifikasi

Wacana pembukaan awal wisata di sekitar hutan pinus Gunung Beruk adalah pada tahun 2015, kemudian dibuka secara umum kepada masyarakat pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagai rintisan wisata baru di Desa Karangpatihan. Inisiator pembukan wisata Gunung Beruk adalah Karangtaruna bersama mahasiswa yang sedang melakukan KKN di Karangpatihan. Pembukaan rintisan wisata baru di Karangpatihan kemudian mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dalam pengelolaan wisata yang di ambil oleh Karangtaruna terhadap wisata Gunung Beruk telah memberikan manfaat bagi banyak masyarakat. Menurut hasil yang ditemukan oleh peneliti sejak dengan adanya wisata di Karangpatihan memiliki banyak manfaat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, penghijauan kembali hutan Gunung Beruk, kepedulian masyarakat terhadap alam dan lingkungan semakin tinggi, serta mulai berubahnya stigma masyarakat luar terhadap Desa Karangpatihan yang sebelumnya dikenal sebagai kampung idiot menjadi desa wisata.

Banyak perkembangan yang telah terjadi selama pengelolaan wisata Gunung Beruk sejak pertama kali dibuka. Setelah 2 tahun dibuka terdapat perkembangan yang sangat signifikan, seperti mulai adanya Perjanjian Kerjasama secara serius tentang pengelolaan wisata dengan Perhutani, mulai tertatanya warung-warung yang ada disekitar Gunung Beruk, adanya penambahan fasilitas wahana wisata dan fasilitas umum serta bertambahnya pengetahuan pengelolaan tentang pariwisata oleh para anggota karangtaruna. Semua lebih tertata walaupun memang dapat dikatakan karangtaruna dalam melaksanakan pengelolaan wisata belum bisa dikatakan di kelola secara professional.

Dominasi

Dominasi terbesar dalam pengelolaan wisata di Gunung Beruk di pegang oleh Karangtaruna Wirataruna. Karangtaruna Wirataruna bertindak sebagai pengusaha wisata yang mengelola wisata Gunung Beruk dengan tujuan memberdayakan masyarakat sekitar. Dengan azas kebersamaan semua kegiatan pengelolaan wisata dilakukan secara bersama-sama dengan para anggota Karangtaruna. Meskipun memegang kendali dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk, Karangtaruna Wirataruna tetap mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari lembaga lain. LMDH dan Perhutani sebagai mitra kerjasama pengelolaan wisata memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wisata agar tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Intinya secara garis besar adalah Karangtaruna merupakan organisasi yang memiliki power/kekuatan untuk berhak mengelola dan mengambil manfaat dari adanya pariwisata di Gunung Beruk, tetapi tetap tidak terlepas dari pengawasan LMDH dan Perhutani sebagai mitra kerjasama yang lebih tinggi kedudukannya secara legitimasi hukum.

Legitimasi

Peneliti menemukan dua pandangan legitimasi hukum dalam menganalisa masalah yang peneliti teliti. Pandangan legitimasi hukum yang peneliti temukan adalah adanya legitimasi hukum yang menaungi Pemerintah Desa Karangpatihan terkait desa wisata dan legitimasi hukum yang menaungi pengelolaan wisata di Gunung Beruk. Dua hal ini berkaitan satu sama lain, yang pertama adalah setelah diterbitkannya surat penetapan desa wisata 188.45/1769 /405.29/2017 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Ponorogo oleh Bupati Ponorogo maka status Desa Karangpatihan berubah menjadi desa wisata. Legitimasi hukum ini adalah bukti keseriusan Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pengembangan potensi wisata yang dimilikinya.

Yang kedua adalah legitimasi hukum dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk. Legitimasi hukum pengelolaan wisata Gunung Beruk berlandaskan pada kesepakatan kerjasama pada tahun 2009 yang dilakukan LMDH dan Perhutani melahirkan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kemudian perjanjian tersebut lebih diperinci kepada aspek pemanfaatan hutan sebagai wisata dengan kesepakatan kedua nomor 08/044-6/PKS/LWU/DRIVE-Jatim/2017 Tentang Kesepakatan Bersama Pengembangan Wisata Alam Hutan Pinus Gunung Beruk Antara Perum Perhutani Dengan LMDH Wonorekso.

Untuk saat ini hukum tersebut sudah dapat menjadi dasar yang sah Karangtaruna dan masyarakat melakukan pemanfaatan hutan sebagai wisata. Namun dalam pengelelolaan wisatanya Karangtaruna masih menunggu di tetapkannya Perjanjian Kerjasama tenang bagi hasil uasaha pariwisata yang masih belum ditentukan oleh Perhutani. Nantinya apabila Perjanjian Kerjasama bagi hasil sudah keluar maka pengelola wisata dapat mengkomersilkan dan mengembangkan wisata Gunung Beruk jauh lebih besar dari yang sekarang.

6.2 Rekomendasi

Dalam pengelolaan wisata Gunung Beruk di Desa Karangpatihan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Adanya masalah-masalah tersebut dapat mengganggu kelangsungan bisnis pariwisata yang di kembangkan oleh masyarakat sekitar Karangpatihan. Ada beberapa rekomendasi yang penulis berikan terkait masalah-masalah yang ditemukan dari hasil penelitian penulis

- Perlunya legitimasi hukum yang sah dalam pembagian hasil usaha wisata antara pengelola wisata dan Perhutani.
- Diperlukannya investor atau pengembang dalam menata management wisata di Karangpatihan agar dapat berkembang lebih baik lagi.
- Dalam melaksanakan pengelolaan wisata diperlukan keseriusan dan cara berfikir yang inovatif agar wisata di Karangpatihan dapat berkembang dan terus hidup.
- Pemerintah Daerah, SKPD dan Pemerintah Desa harus memberikan dukungan dan apresiasi terhadap upaya masyarakat Karangpatihan yang bangkit membangun ekonomi lewat pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Daddi H. Gunawan. 2014. Perubahan Sosial di Pedesaan Bali: Dualitas, Kebangkitan Adat, dan Demokrasi Lokal.. Serpong: Marjin Kiri

Gamal Suwanto.2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi

Giddens, Anthony. 2010. Teori Strukturalisme Dasar-Dasar Pembentukan Strukturasi Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

H Soewarno Darsoprajitno, 2002, *Ekologi Pariwisata*, Bandung,

I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta

Lexy J.Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

A.J, Muljadi, 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. (2009) *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjeep Rohendi Rohidi. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Nazir, M.1999.Metode Penelitian. Jakarta:Ghalia Indonesia

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung:Alfabeta

Suryo Sakti, 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta

Saifuddin Azwar.2001,*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka

Sudarto.1997. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014

Hasil Penelitian

Nur Rika Puspita Sari, " *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata Oleh Kelompok Sadar Wisata DewaBejo Di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten GunungKidul*". Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 2012 diunduh dari eprints.uny.ac.id tanggal 13 Maret 2017, pukul 18.50 WIB

Anggris Yudo Asmoro. " *Peranan Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Sebagai Desa Wisata Dalam Mempertahankan Budaya local*". Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2009 diunduh dari lib.unnes.ac.id pada tanggal 13 Maret 2017, pukul 18.40 WIB

Yuliana Titis Wahyuningrum, " *Dampak Ekonomi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Rumah Dome, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*", Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015. Diunduh dari <http://eprints.uns.ac.id/>, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 19.20 WIB.

Susi Lestari, " *Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum, Sleman)*", Skripsi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. Diunduh dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 20.13 WIB.

Undang Undang Peraturan Pemerintah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang perusahaan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1769/405.29/2017 Tentang Penetapan Desa Wisata

RPIMDes Desa Karangpatihan Tahun 2017-2022

Website

[http://www.solopos.com/2017/01/31/wisata-ponorogo-jadi-des-wisata-25-des-bakal-digelontor-rp25-juta-789091](http://www.solopos.com/2017/01/31/wisata-ponorogo-jadi-desa-wisata-25-des-bakal-digelontor-rp25-juta-789091) di akses pada tanggal 19 maret 2017 pukul 20.30

www.kompasiana.com diakses tanggal 3 Mei 2017 pukul 19.30

<https://madiunraya.com/2017/03/28/permasalahan-clear-perhutani-dukung-pengembangan-wisata-gunung-beruk/> diakses 30 April 2017 pukul 11.20

<http://www.ponorogoinfo.com/2017/03/wisata-gunung-beruk-karangpatihan-belum.html> diakses 30 April 2017 pukul 13.20

Kabardesa.com diakses pada 30 Oktober pukul 20.32

Wawancara

Wawancara Teguh Ketua Pokdarwis Karangpatihan 29 April 2017 pukul 10.20

Wawancara Eko Mulyadi Kepala Desa Karangpatihan 29 Agustus 2017 pukul 11.35

Wawancara Teguh Cahyono Ketua Karangtaruna Wirataruna 7 September 2017 pukul 9.36

Wawancara Jaimin Ketua LMDH Wonorekso 8 September 2017 pukul 14.38

Wawancara Khaidir Asper Perhutani KPH Lawu DS Kecamatan Balong pukul 13.47

Wawancara Marjudi Staf Bidang Pengembangan Prodak dan Promosi Dinas Pariwisata Poorogo 14 September 2017 13.02

Wawancara Tumini Pedagang Sekitar gunung Beruk 8 September 2017 pukul 15.19

Wawancara Tuklrah Pemilik Lahan Parkir 8 September pukul 16.07

Wawancara Yanti Pedagang Sekitar gunung Beruk 8 September 2017 pukul 15.40

Wawancara Dian Suluh Akademisi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 5 Oktober 2017
pukul 19.34